

Nirwan Dessibali dan Wahyu Chandra

# MENGGURITA DI PULAU





Nirwan Dessibali dan Wahyu Chandra

# MENGGURITA DI PULAU



**Sanksi Pelanggaran Pasal 27****Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) di pidana dengan pidana penjara masingmasing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda yang paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran. Hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Nirwan Dessibali dan Wahyu Chandra

# MENGGURITA DI PULAU



# **MENGGURITA DI PULAU**

Penulis

**Nirwan Dessibali dan Wahyu Chandra**

Penyunting dan Prolog

**Wahyu Chandra**

Epilog

**Alief Fachrul Raazy**

Tata letak

**Nirwan Dessibali**

Copyright © YKL Indonesia 2026

Hak cipta ada pada penerbit Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia

All rights reserved

Cetakan pertama, Februari 2026

xii + 228 Halaman

15,55 x 23 Cm

ISBN : 978-634-05-0072-1

Diterbitkan oleh



**YAYASAN  
KONSERVASI  
LAUT INDONESIA**

(INDONESIAN - MARINE CONSERVATION FOUNDATION)

Perumahan Bumi Pesona Pelangi,

Jl. Kuning No.15, Minasa Upa, Kota Makassar

Email : [info@yklindonesia.org](mailto:info@yklindonesia.org)

Website: [www.yklindonesia.org](http://www.yklindonesia.org)

# DAFTAR ISI

Daftar isi .....	viii
PENGANTAR.....	xi
PROLOG.....	1
MENGGURITA DI PULAU .....	5
Bersama-sama Masyarakat Pulau Langkai dan Lanjukang Menyusun Profil Perikanan Gurita.....	8
Gurita dan Tantangan Tata Kelola Perikanan Skala Kecil di Makassar.....	12
Terbang untuk Belajar di Wakatobi: Tekad Nelayan Pulau Langkai dan Lanjukang Menjaga Gurita.....	18
Program Pengelolaan Gurita ternyata juga Lindungi Spesies Terancam Punah di Perairan Makassar .....	24
Penting dalam Ekosistem Laut, Hiu dan Pari di Indonesia Justru Terancam .....	30
Nelayan Makassar Sepakat Tutup Sementara Wilayah Tangkap Gurita ...	36
Inisiatif Anas dan Harapan Baru Konservasi Penyu di Pulau Lanjukang..	42
Sistem Buka-Tutup Diharapkan Perbaiki Ekosistem Laut yang Rusak Akibat <i>Destructive Fishing</i> .....	48
Sinergi dan Kolaborasi untuk Perikanan Berkelanjutan di Sulsel .....	54
Buka-Tutup Kawasan Tangkap Gurita di Makassar Sukses. Bagaimana Keberlanjutannya?.....	60
Keempat kalinya, Nelayan Pulau Langkai dan Lanjukang Tutup Sementara Lokasi Penangkapan Gurita.....	66

## MENGGURITA DI PULAU

Patroli Bersama Lindungi Perairan Pulau Langkai – Lanjukang dari <i>Destructive Fishing</i> .....	74
Mendorong Keberlanjutan Sistem Buka- Tutup Gurita di Pulau Lanjukang dan Pulau Langkai.....	80
“Berdansa dengan Laut”, Cerita Keberhasilan Konservasi di Pulau Langkai dan Lanjukang Makassar .....	84
Dari Pulau ke Kampus: Kisah Konservasi Laut Berbasis Masyarakat di Langkai dan Lanjukang .....	90
Begini Cara Perempuan Nelayan Pulau Langkai Hadapi Perubahan Iklim.....	94
Kuatkan Pasar dan Nilai Jual, Nelayan Langkai dan Lanjukang Kerjasama dengan 2 Perusahaan .....	100
Perkuat Mutu Tangkapan Nelayan Gurita Lewat Pelatihan CPIB.....	106
Perempuan Pemutus Rantai Kemiskinan Nelayan .....	112
Strategi Penerapan Ekonomi Biru dan Konservasi di Perairan Sulsel .....	118
Program Buka-Tutup, Sukses Tingkatkan Hasil Tangkapan Gurita di Makassar.....	124
Hak Kelola Masyarakat Pulau Langkai dan Lanjukang Didukung Para Pihak .....	132
Saatnya Perkuat Buka Tutup Area Tangkap Gurita di Makassar .....	136
Komitmen Para Pihak Mengawal Pengakuan Hak Kelola Masyarakat Lokal di Pulau Langkai dan Lanjukang.....	142
Nelayan Langkai dan Lanjukang Panen Gurita di Kawasan Buka-Tutup	148
Jalan Panjang Jaga Laut Sulawesi Selatan .....	154
Belajar dari Langkai dan Lanjukang, Masyarakat Pulau Bonetambu Siap Kelola Laut Sendiri.....	158

Nelayan Bonetambu Terapkan Buka Tutup Tangkap Gurita .....	162
Jambore Nelayan dan Harapan bagi Pesisir dan Laut .....	168
Pengawasan Laut Berbasis Masyarakat, Pokmaswas Bonetambu Diperkuat Lewat Kegiatan SETARA .....	192
Pembukaan Perdana Buka Tutup, Nelayan Bonetambu Memulai Babak Baru Tata Kelola Lokal.....	196
Cerita Perjuangan Hak Kelola Laut Masyarakat Pulau Langkai dan Lanjukang.....	200
Cerita Nelayan Pulau Kecil Spermonde, dari Gurita ke Tata Kelola .....	206
Upaya Nelayan Bonetambu Jaga Wilayah Tangkap Gurita .....	212
EPILOG.....	217
Gurita Pintu Masuk: Menjaga Laut, Pemenuhan Hak, dan Masa Depan Masyarakat Lokal Pulau-Pulau Kecil.....	217
GLOSARIUM.....	223
Daftar Istilah .....	223
Daftar Singkatan.....	225
PROFIL PENULIS.....	227

# PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kesempatan-Nya, buku *Menggurita di Pulau: Cerita Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat di Spermonde Kota Makassar* ini akhirnya dapat hadir di tangan pembaca.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari Nirwan Dessibali dan Wahyu Chandra yang merekam perjalanan pelaksanaan program penguatan ekonomi dan konservasi gurita berbasis masyarakat di Kepulauan Spermonde, Kota Makassar. Seluruh proses yang dituliskan dalam buku ini lahir dari pengalaman langsung mendampingi masyarakat Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang melalui Program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat (PROTEKSI GAMA), serta program penguatan hak kelola masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Program ini terlaksana atas dukungan Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan Burung Indonesia, sementara penguatan hak kelola masyarakat mendapat dukungan dari Turning Tides. Serta beberapa program dari dukungan pihak lainnya. Dukungan tersebut tidak hanya berbentuk pendanaan, tetapi juga ruang belajar, jejaring, serta penguatan perspektif dalam mendorong konservasi yang berbasis pada masyarakat lokal.

Selain itu, buku ini juga lahir dari kolaborasi banyak pihak: pemerintah dari tingkat kelurahan hingga provinsi, akademisi, sektor swasta, jurnalis, aparat penegak hukum, serta berbagai lembaga dan komunitas yang percaya bahwa pengelolaan sumber daya laut harus berpihak pada keberlanjutan ekosistem sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Tulisan-tulisan dalam buku ini sebelumnya telah terbit di Mongabay Indonesia dan website resmi YKL Indonesia, kemudian dihimpun, disusun ulang, dan dirangkai menjadi satu narasi perjalanan program sejak 2021 hingga 2025. Ia bukan laporan teknis yang kaku, melainkan rekaman proses: percakapan dengan nelayan, kegelisahan atas kerusakan

terumbu karang, upaya menyusun profil perikanan gurita secara partisipatif, belajar lintas pulau, membangun sistem buka-tutup, memperkuat kelembagaan, hingga mendorong pengakuan hak kelola masyarakat.

Perjalanan ini menunjukkan bahwa gurita bukan sekadar komoditas. Di Pulau Langkai dan Lanjukang, gurita menjadi pintu masuk untuk membicarakan hal yang lebih besar: tata kelola perikanan skala kecil, perlindungan spesies kunci, penguatan peran perempuan, peningkatan mutu tangkapan, akses pasar, hingga pengawasan laut berbasis masyarakat.

Buku ini juga menjadi catatan bahwa perubahan tidak selalu lahir dari kebijakan besar di tingkat pusat. Ia bisa tumbuh dari pulau-pulau kecil, dari kesepakatan lokal, dari keberanian nelayan untuk menutup sementara wilayah tangkapnya sendiri, dan dari kesadaran bahwa menjaga laut berarti menjaga masa depan anak cucu.

Kami menyadari bahwa perjalanan ini belum selesai. Apa yang dituliskan di sini adalah proses yang terus berkembang, dengan tantangan dan dinamika yang tidak selalu mudah. Namun kami percaya, pengalaman di Spermonde dapat menjadi pembelajaran bagi wilayah pesisir dan pulau kecil lainnya di Indonesia yang menghadapi tekanan serupa.

Akhirnya, kami berharap buku ini tidak hanya menjadi dokumentasi, tetapi juga inspirasi—bahwa konservasi dan penguatan ekonomi masyarakat bukan dua hal yang bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan ketika masyarakat menjadi subjek utama dalam pengelolaan sumber daya mereka sendiri.

**Tim Penulis**

# PROLOG

*Oleh Wahyu Chandra*

Saya selalu percaya satu hal: kerja-kerja sosial yang tidak ditulis, cepat atau lambat akan hilang. Ia mungkin pernah mengubah hidup orang, pernah menggerakkan komunitas, pernah memantik kesadaran. tetapi tanpa jejak, ia hanya menjadi cerita yang samar di ingatan.

Buku ini lahir dari kesadaran itu.

Tulisan-tulisan di dalamnya sebagian besar adalah reportase saya di Mongabay Indonesia. Awalnya berdiri sendiri-sendiri. Ada cerita tentang nelayan yang sepakat menutup wilayah tangkap gurita.

Ada kisah perjalanan belajar ke Wakatobi. Ada diskusi tentang hiu dan pari yang terancam. Ada inisiatif anak muda menjaga telur penyu. Ada dinamika konflik dan negosiasi antar-nelayan. Semua saya tulis sebagai peristiwa.

Namun ketika dirangkai, saya melihat ia bukan lagi sekadar kumpulan berita. Ia adalah kronik perubahan.

Di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang, gurita bukan sekadar komoditas, namun juga menjadi pintu masuk. Dari gurita, orang-orang mulai berbicara tentang terumbu karang yang rusak. Tentang hasil tangkapan yang mengecil. Tentang destructive fishing yang dulu dianggap biasa. Tentang wilayah tangkap yang makin padat. Tentang masa depan anak-anak mereka.

Saya menyaksikan bagaimana kegelisahan itu tumbuh pelan. Tidak meledak. Tidak dramatis. Hanya obrolan-obrolan kecil di dermaga, di rumah panggung, di sela memperbaiki jaring. Dari obrolan itulah lahir ide sederhana: bagaimana kalau sebagian laut kita tutup dulu, beri waktu untuk pulih?

Menutup laut, bahkan sementara, bagi nelayan harian bukan keputusan ringan. Itu artinya menunda penghasilan. Itu artinya percaya pada sesuatu yang belum tentu hasilnya. Tetapi mereka mencobanya. Dan ketika dibuka kembali, ukuran gurita membesar. Nilainya naik. Kepercayaan diri ikut tumbuh.

Sebagai jurnalis, saya terbiasa menjaga jarak. Tetapi dalam proses ini, saya juga belajar. Saya melihat bagaimana perubahan perilaku tidak lahir dari ceramah panjang, melainkan dari pengalaman konkret. Ketika nelayan melihat sendiri terumbu karang rusak, ketika mereka tahu angka tutupan karang, ketika mereka menyadari gurita bertelur dan mati setelah menjaga telurnya—pengetahuan itu mengubah cara pandang.

Di titik inilah saya merasa buku menjadi penting.

Buku adalah arsip gerakan. Banyak organisasi kuat dalam aksi, tetapi lemah dalam pencatatan. Padahal konflik ruang laut, perubahan musim tangkap, strategi adaptasi nelayan, hingga transformasi kelembagaan adalah bagian dari sejarah sosial yang tak boleh hilang. Jika tidak ditulis, ia hanya jadi cerita yang beredar dari mulut ke mulut, lalu perlahan mengabur.

Dokumentasi adalah jejak peradaban.

Saya sengaja memakai kata itu. Peradaban tidak hanya dibangun oleh gedung tinggi dan kebijakan besar. Ia juga dibangun oleh kesepakatan kecil di pulau terpencil. Oleh keputusan sekelompok nelayan untuk berhenti sejenak demi masa depan. Oleh anak muda yang memagari telur penyu agar tak lagi diambil. Oleh kelompok masyarakat pengawas yang mulai sadar bahwa kelembagaan bukan soal bantuan, tetapi soal tanggung jawab.

Tanpa dokumentasi, semua itu bisa dianggap tak pernah ada.

Buku juga memberi posisi yang berbeda bagi gerakan masyarakat sipil. Di tengah riuh media sosial, suara NGO sering terdengar reaktif—mengkritik, memprotes, merespons. Tetapi ketika pengalaman lapangan, data sosial-ekologi, dan refleksi kritis disusun dalam buku, ia berubah

menjadi produksi pengetahuan. Dari sekadar bersuara menjadi memberi rujukan.

Saya melihat betapa kayanya data lapangan yang dimiliki YKL Indonesia dan komunitas nelayan. Wawancara nelayan, catatan musim, perubahan struktur ekonomi rumah tangga, dinamika bagi hasil, hingga pemetaan partisipatif wilayah tangkap.

Jika hanya disimpan sebagai laporan internal, ia berhenti sebagai arsip organisasi. Tetapi ketika dibukukan, ia bisa menjadi bahan ajar, bahan diskusi, bahkan dasar kebijakan.

Yang lebih penting lagi, buku adalah bentuk pengakuan.

Ketika nelayan melihat kisah mereka ditulis dan diterbitkan, ada rasa yang berbeda. Mereka tidak lagi sekadar “penerima program”. Mereka adalah subjek yang pengetahuannya dihargai. Pengetahuan tentang arus, musim, lokasi bertelur, dan perilaku gurita—yang selama ini dianggap biasa—menjadi bagian dari narasi besar tentang keberlanjutan.

Dalam konteks krisis iklim dan degradasi laut, cerita dari Spermonde bukan cerita pinggiran. Ia adalah cermin masa depan. Kota Makassar bergantung pada lautnya. Terumbu karang bukan hanya ekosistem, tetapi benteng pangan dan ekonomi. Jika perikanan kecil runtuh, dampaknya tidak kecil.

Karena itu, buku ini bukan nostalgia. Ia adalah investasi intelektual. Ia bisa dikutip, diperdebatkan, dikritik, bahkan diperbaiki. Tetapi ia ada. Ia menjadi pijakan.

Saya membayangkan dua puluh tahun ke depan, mungkin anak-anak dari Langkai dan Lanjukang membaca buku ini. Mereka tahu bahwa pernah ada fase ketika orang tua mereka memilih menutup laut demi memberi kesempatan gurita tumbuh. Bahwa pernah ada upaya kolektif menjaga hiu, pari, dan penyu. Bahwa perubahan tidak datang dari luar, tetapi dari kesadaran sendiri.

Menulis buku ini bagi saya adalah cara menjaga ingatan kolektif. Dan menjaga ingatan berarti menjaga arah.

Laut selalu berubah. Ombak datang dan pergi. Tetapi jejak yang ditulis akan bertahan lebih lama dari gelombang.

Jika gurita mengajarkan kita tentang adaptasi dan kecerdikan, maka dokumentasi mengajarkan kita tentang keberlanjutan. Tanpa yang kedua, yang pertama mudah hilang.

Dan mungkin, di situlah makna terdalam buku ini.

# MENGGURITA DI PULAU







## Bersama-sama Masyarakat Pulau Langkai dan Lanjukang Menyusun Profil Perikanan Gurita

Pagi itu, beberapa nelayan duduk melingkar di atas lantai kayu rumah panggung di Pulau Langkai. Di hadapan mereka terbentang kertas besar. Garis-garis mulai ditarik. Titik-titik ditandai. Laut yang selama ini mereka jelajahi setiap hari, kini sedang mereka gambar dari ingatan. Bukan untuk sekadar mengenang, tetapi untuk memahami.

Ini langkah awal Program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat (PROTEKSI GAMA) di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang, Kota Makassar. Sebelum berbicara tentang intervensi, pelatihan, atau penguatan kelembagaan, satu hal dianggap paling penting: mendengarkan masyarakat dan menyusun profil perikanan gurita bersama mereka.

Selama sepekan, tepatnya 1–8 Juni 2021, diskusi-diskusi kecil berlangsung di rumah warga, di dermaga, bahkan di sela waktu nelayan memperbaiki perahu. Tidak ada presentasi panjang. Yang ada adalah percakapan.

Tentang bagaimana dulu mereka melaut dengan perahu layar. Tentang kapan gurita mulai menjadi primadona. Tentang musim yang kini terasa berubah. Tentang hasil tangkapan yang tak lagi seperti dulu. “Banyak hal yang sebenarnya kami lakukan setiap hari, tapi baru sekarang kami duduk bersama untuk membicarakannya,” ujar Erwin, salah satu nelayan Pulau Langkai.

Proses ini bukan sekadar pengumpulan data, tetapi ruang refleksi bersama. “Kami memfasilitasi masyarakat untuk memetakan sendiri wilayah tangkapnya, menggambarkan profil perikananannya, dan merekam pengalaman mereka tentang perubahan yang terjadi. Profil ini bukan milik kami, tapi milik masyarakat,” ujar Alief Fachrul Raazy, Project Coordinator PROTEKSI GAMA.

Menurut Fahri sapaan akrab dari Alief, sebelum berbicara tentang penguatan tata kelola, masyarakat perlu memiliki gambaran utuh tentang kondisi perikanannya sendiri. “Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah ke depan berbasis pada pemahaman bersama, bukan asumsi,” tambahnya.

### **Menggambar Laut, Membaca Kondisi Ekosistem**

Proses penyusunan profil tidak berhenti pada diskusi dan pemetaan wilayah tangkap. Masyarakat juga terlibat langsung dalam melihat kondisi ekosistem yang menjadi rumah bagi gurita. Pendataan tutupan terumbu karang dilakukan menggunakan metode *Rapid Reef Assessment* (RRA) dengan snorkeling pada area 10 x 10 meter di beberapa titik survei. Warga ikut turun langsung ke laut, mengamati, menghitung, dan mencatat kondisi karang.

“Dengan keikutsertaan masyarakat, mereka bisa mengetahui kondisi terumbu karang di sekitar pulau dan memahami perannya sebagai habitat penting bagi gurita,” jelas Fahri.

Dari hasil pengamatan lapangan, rata-rata tutupan karang hidup di Pulau Langkai tercatat sekitar 20 persen. Sementara di Pulau Lanjukung berkisar antara 20 hingga 55 persen di beberapa titik. Mengacu pada kriteria baku tutupan lahan dalam Kepmen LH No. 4/2001, kondisi tersebut termasuk dalam kategori rusak ringan.

Bagi sebagian nelayan, pengalaman ini membuka cara pandang baru. Ramil, nelayan Pulau Langkai, mengaku sangat senang dilibatkan secara penuh dalam proses penyusunan profil.

“Banyak hal yang sebenarnya kami lakukan dan lihat sehari-hari. Sebelumnya kami sudah tahu kalau kondisi laut, khususnya terumbu karang, semakin rusak, tapi tidak tahu angkanya berapa. Ini kami diajak langsung mengukur dan tahu hasilnya,” ujar Ramil.

Baginya, mengetahui angka bukan sekadar soal data, tetapi soal kesadaran. Ia berharap, profil perikanan gurita yang sedang disusun ini dapat menjadi bahan bersama untuk meningkatkan kelestarian laut di

Pulau Langkai dan Lanjukang, sekaligus memberi dampak ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat.

### **Sebuah Awal, Bukan Kesimpulan**

Di pulau-pulau kecil di Kota Makassar, gurita yang oleh nelayan disebut “gama” bukan sekadar komoditas. Ia adalah bagian dari strategi bertahan hidup. Ketika harga ikan lain turun, gurita bisa menjadi penyelamat. Ketika cuaca tidak bersahabat, nelayan menyesuaikan lokasi tangkapnya.

Namun perubahan juga datang perlahan. Permintaan pasar yang meningkat membuat semakin banyak nelayan beralih menangkap gurita. Wilayah tangkap semakin luas. Perjalanan semakin jauh. Biaya operasional tak selalu sebanding dengan hasil.

Di tengah situasi itu, PROTEKSI GAMA hadir bukan untuk membawa aturan dari luar, melainkan membuka ruang diskusi tentang masa depan: bagaimana menjaga sumber daya tetap ada, sekaligus memastikan nelayan tetap sejahtera.

Penyusunan profil perikanan gurita ini masih dalam proses. Ia adalah langkah awal untuk memahami, bukan untuk menyimpulkan. Hasilnya kelak diharapkan menjadi pijakan bersama. Bukan hanya bagi YKL Indonesia, tetapi bagi masyarakat sendiri.

Di Pulau Lanjukang yang penduduknya tak sampai seratus jiwa, dan di Pulau Langkai yang lebih ramai, percakapan tentang gurita kini tak lagi sebatas soal harga. Ia mulai menyentuh soal keberlanjutan.

*Nirwan Dessibali - 9 Juni 2021*



## Gurita dan Tantangan Tata Kelola Perikanan Skala Kecil di Makassar

Erwin baru saja datang dari melaut. Dalam kantong kresek yang dibawanya terdapat beberapa kilogram gurita. Perahu kecil yang oleh masyarakat lokal disebut *jolloro* terombang-ambing dihantam arus saat Erwin menepikan dan menambatkannya di pantai.

Di Pulau Langkai, Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Sangkarrang, Makassar, Sulawesi Selatan, gurita masih tergolong komoditas baru. Selama ini nelayan setempat lebih banyak menangkap ikan-ikan karang, seperti sunu dan tenggiri. Di musim tertentu mereka mencari telur ikan terbang, bisa dengan dipungut di antara sampah-sampah laut, atau bisa dicari dengan menggunakan alat tradisional, berupa daun kelapa yang dihamparkan di daerah tertentu.

Erwin sedikit senang karena hasil tangkapan gurita cukup banyak. Gurita-gurita ini biasanya disimpan di kantong kresek agar bisa tetap segar tiba di pulau.

Untuk menangkap gurita mereka biasanya menggunakan beberapa alat pancing tradisional. Salah satu yang cukup unik disebut *pocong-pocong* karena bentuknya yang mirip pocong atau tepatnya gurita, dengan tentakel palsu menjumbai berwarna-warni. Ada juga alat pancing yang disebut *bole-bole*, yang berisi beberapa mata pancing. Kedua alat pancing ini ramah lingkungan.

Hasil tangkapan biasanya langsung disetor ke pengepul di pulau yang langsung menimbang dan menilai *grade*-nya, dan langsung dimasukkan ke lemari pendingin untuk menjaga kualitas.

Menangkap gurita memiliki makna tersendiri bagi Erwin dan masyarakat pulau lainnya. Gurita dikenal memiliki habitat di terumbu karang, sehingga ketersediaannya akan sangat tergantung pada kondisi terumbu karang.



*Erwin memperlihatkan alat pancing yang disebut pocong-pocong, berguna menarik perhatian gurita agar muncul di permukaan. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*

“Kalau terumbu karang rusak, maka akan sangat berpengaruh pada hasil tangkapan kami, jadi kami berkepentingan untuk menjaga kondisi terumbu karang,” kata Erwin, awal Oktober 2021 silam.

Wilayah sekitar pulau, tepatnya perairan Spermonde atau Sangkarrang selama ini terancam oleh praktik *destructive fishing*, seperti bius dan bom ikan. Pelaku selain dari masyarakat pulau juga dari pulau-pulau lain sekitar. Beberapa nelayan gurita di Pulau Langkai, termasuk Erwin, dulunya adalah pelaku *destructive fishing*, namun tidak lagi karena merasakan dampaknya. Apalagi dengan adanya penangkapan gurita yang membutuhkan kondisi terumbu karang yang bagus.

### **Tata Kelola Perikanan Gurita Skala Kecil**

Menurut Nirwan Dessibali, Direktur YKL Indonesia, program yang didorong adalah melalui penangkapan gurita secara berkelanjutan, yaitu pembatasan penangkapan gurita. “Program yang kami dorong adalah bagaimana nelayan bisa mengelola atau mengatur penangkapan gurita

yang berkelanjutan. Salah satunya dengan mendorong sistem penangkapan secara buka-tutup penangkapan, sehingga dengan sistem ini gurita yang ditangkap, setelah ditutup selama tiga bulan, adalah gurita yang besar, *grade* A dan B, yang bernilai lebih tinggi,” jelasnya.

Dengan adanya tata kelola ini, lanjut Nirwan, diharapkan nelayan juga akan menjaga kelestarian terumbu karang, yang merupakan ekosistem gurita untuk hidup dan berkembang biak. “Dengan adanya tata kelola perikanan ini, kami berharap nelayan menjadi garda terdepan untuk mencegah hal ini terjadi, sehingga nelayan-nelayan tersebut tidak lagi melakukan penangkapan ikan secara merusak.”

Masih adanya *destructive fishing* di perairan Makassar, menurut Nirwan, disebabkan antara lain penegakan hukum yang masih lemah, serta kurangnya kesadaran nelayan. Penyebab lainnya adalah faktor kemiskinan, di mana penggunaan alat tangkap *destructive* ini dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan, di mana nelayan bisa mendapatkan ikan secara banyak dan cepat.

### **Nilai Ekonomis Tinggi**

Di Indonesia sendiri gurita memiliki nilai ekonomis penting di mana dalam beberapa tahun terakhir mengalami tren peningkatan ekspor. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2020 ekspor gurita berada pada peringkat ketiga setelah udang dan tuna-tongkol-cakalang. “Itu pun gurita digabungkan dengan cumi-cumi dan sotong dengan nilai mencapai USD131,94 juta. Indonesia termasuk 10 besar eksportir gurita global dengan volume ekspor Indonesia sekitar 19 ribu ton per tahun dengan nilai rata-rata USD 98 juta/tahun, yang diekspor ke Italia, Amerika Serikat dan China,” ujar Nirwan.

Penangkapan gurita di Indonesia didominasi nelayan tradisional dan nelayan skala kecil dengan menggunakan alat tangkap sederhana dan mesin perahu di bawah 10 *Gross Tonnage* (GT). Hal yang sama ditemukan di Kota Makassar yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Spermonde. Gurita menjadi salah satu pilihan yang memiliki potensi besar untuk perekonomian nelayan.



*Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia melakukan pendampingan masyarakat untuk tata kelola perikanan kecil berkelanjutan. Foto: YKL Indonesia*

Di samping karena penangkapan gurita di Kepulauan Spermonde didominasi oleh penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, komoditi ini juga menjadi salah satu primadona dengan permintaan ekspor yang tinggi dari banyak negara.

Menurut Nirwan, kurangnya data dan informasi terkait gurita di perairan Spermonde khususnya Kota Makassar menjadi tantangan yang perlu diatasi. Tren yang terjadi adalah terjadinya peningkatan harga gurita di pasaran yang menyebabkan para nelayan setempat mulai menjadikan gurita sebagai sasaran tangkapan dan sumber pendapatan mereka. “Beralihnya target jenis tangkapan para nelayan ini perlu diantisipasi dengan adanya suatu rencana pengelolaan gurita yang berkelanjutan sebelum mengalami over eksploitasi, degradasi dan deplesi atau hilangnya sumberdaya tersebut.”

### **Kebutuhan Riset**

Menurut Mardiana Ethrawaty Fachry, dosen Perikanan di Universitas Hasanuddin, gurita adalah salah satu komoditas perikanan yang kurang mendapat perhatian padahal secara global sudah dianggap sebagai

kebutuhan penting, sehingga harus dilihat sebagai potensi perikanan yang perlu dikembangkan.

Gurita juga kurang mendapat perhatian dari peneliti-peneliti, termasuk di Unhas. “Dalam 3 tahun terakhir tak ada riset secara spesifik pada gurita. Minat untuk gurita sangat rendah sekali. Kalaupun ada itu lebih pada aspek pengolahan seperti dibuat kripik, sosis, yang berorientasi lokal,” katanya.

Menurutnya, peran riset di bidang perikanan sangat besar karena akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk yang dihasilkan. Sayangnya, pemerintah belum melihat riset sebagai aspek penting, bisa dilihat dari segi pembiayaan yang menempati urutan 43 secara global.

“Masalah lainnya bahwa kalaupun riset ini dilakukan namun sebagian besar hanya untuk menggugurkan kewajiban pemerintah dan kampus, kurang implementasi dan mencari solusi atas masalah-masalah yang terjadi. Kadang kita sudah tahu model dan pendekatan-pendekatannya, namun tak ada tindak lanjut dan pengawasan hasil riset yang telah dihasilkan. Ini harusnya dikembangkan sehingga bisa efisiensi. Faktanya tak ada solusi jangka panjang yang dihasilkan padahal dana yang telah digunakan luar biasa besarnya.”

Riset tentang gurita dinilai penting karena akan terkait upaya apa yang harus dilakukan nelayan agar ketersediaan gurita tetap terjaga. Misalnya, sebuah riset menunjukkan bahwa ketika gurita hidup di karang maka beratnya akan meningkat secara cepat. “Karakter produksi gurita kalau sudah bertelur dan dititip di karang dan rumput laut, betinanya menjaga, selalu semprot dengan air agar segar, betinanya kemudian mati. Karakter-karakter ini harus dipahami oleh nelayan, kalau masa-masa bertelur jangan berada di sekitar lokasi tersebut. Telurnya akan terangkat. Ini hanya terjawab dengan riset sehingga peran riset sangat besar,” pungkasnya.

*Wahyu Chandra – 20 Oktober 2021*



## Terbang untuk Belajar di Wakatobi: Tekad Nelayan Pulau Langkai dan Lanjukang Menjaga Gurita

Lima nelayan dari Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang berangkat dari Kota Makassar menuju Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, pada 8–13 November 2021. Ada rasa bahagia dan waswas dalam perjalanan itu. Namun yang lebih kuat dari semuanya adalah tekad untuk belajar.

Bagi sebagian dari mereka, ini adalah pengalaman pertama naik pesawat. Namun kisah ini bukan tentang pengalaman terbang, melainkan tentang kegelisahan yang mereka bawa dari pulau: ukuran gurita makin kecil, hasil tangkapan tidak menentu, dan tekanan terhadap terumbu karang kian terasa.

Di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang, gurita adalah komoditas penting. Harganya relatif stabil dan menjadi sumber penghasilan harian bagi banyak keluarga. Penangkapannya pun dikenal lebih ramah lingkungan dibanding metode destruktif lain. Tetapi tanpa pengaturan, sumber daya tetap bisa menurun. Ketika terlalu banyak yang ditangkap tanpa memberi waktu tumbuh, siklus alam terganggu.

Itulah sebabnya lima nelayan ini memutuskan belajar ke Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi.. Di lapangan, mereka berdiskusi dengan Forum Kahedupa Toudani (Forkani), yang mendampingi masyarakat Desa Derawa menerapkan sistem buka-tutup penangkapan gurita.

### **Ketika Hasil Menurun, Diskusi Dimulai**

Di Desa Derawa, cerita perubahan bermula dari situasi yang tidak jauh berbeda dengan yang dirasakan nelayan Spermonde. Beberapa tahun sebelumnya, nelayan setempat mengeluhkan gurita besar semakin sulit ditemukan. Hasil tangkapan didominasi ukuran kecil. Pendapatan berkurang, sementara kebutuhan rumah tangga tidak menunggu.

## MENGGURITA DI PULAU

Alih-alih menambah intensitas tangkap, masyarakat Derawa memilih berdiskusi. Tokoh adat, nelayan, dan warga duduk bersama membahas kondisi laut mereka. Dari pertemuan itu lahir satu kesepakatan: sebagian wilayah tangkap akan ditutup sementara waktu. Setelah periode tertentu, kawasan itu dibuka kembali secara bersama-sama.

Langkah itu tidak mudah. Ada kekhawatiran kehilangan pendapatan dalam jangka pendek. Namun masyarakat sepakat bahwa tanpa jeda, gurita tidak akan sempat tumbuh.

Sudarmin, nelayan dari Pulau Langkai, mengaku terkejut melihat hasilnya. “Dulu di sini lebih banyak yang kecil-kecil. Setelah ada buka-tutup, yang ditangkap sudah besar-besar. Karangnya juga kelihatan lebih bagus,” ujarnya.

Baginya, yang menarik bukan hanya perubahan ukuran gurita, tetapi bagaimana masyarakat mematuhi aturan yang mereka buat sendiri. “Pendekatan adat di sini kuat. Jadi orang segan melanggar,” kata dia.



*Nelayan dari Pulau Langkai dan Lanjukang berdiskusi di pesisir Wakatobi saat kunjungan belajar, mengamati wilayah perairan sebagai bagian dari upaya memahami pengelolaan gurita berkelanjutan. Foto: YKL Indonesia.*

## Lebih dari Sekadar Tutup dan Buka

Selama di Kaledupa, rombongan nelayan tidak hanya melihat lokasi penutupan. Mereka belajar tentang proses sosial di baliknya. Bagaimana membangun kesadaran, bagaimana menyusun aturan, siapa yang mengawasi, dan bagaimana sanksi disepakati.

Erwin RH dari Langkai menilai keberhasilan di Derawa tidak hanya soal ekologi. “Ternyata kalau nelayan sendiri sadar, hasilnya bisa kita rasakan bersama. Bukan cuma pencari gurita, tapi yang lain juga, termasuk perempuan yang bantu ekonomi keluarga,” katanya.

Ia melihat bahwa perubahan terjadi karena masyarakat merasa memiliki aturan tersebut. Peran tokoh adat dan lembaga lokal memang penting, tetapi kunci utamanya adalah kesadaran kolektif. “Semua itu terjadi karena nelayan mau berubah.”

Anas dari Pulau Lanjukang juga mengungkapkan kesannya saat melihat langsung hasil tangkapan di Derawa. “Ada yang 2 kilo, 3 kilo sampai 5 kilo. Mereka mau buka-tutup karena sebelumnya pendapatan berkurang dan kebanyakan yang kecil. Jadi mereka sepakat coba cara ini.”

Bagi Anas, ukuran tersebut menjadi bukti bahwa memberi waktu bagi laut untuk pulih dapat berdampak langsung pada pendapatan.

## Tantangan dan Realitas

Meski terlihat berhasil, sistem buka-tutup bukan tanpa tantangan. Para nelayan dari Langkai dan Lanjukang juga mendiskusikan kemungkinan resistensi di kampung mereka sendiri. Tidak semua orang mudah menerima pembatasan, terutama jika menyangkut penghasilan harian.

Syarif dari Lanjukang menyadari pentingnya dukungan kelembagaan dan pemerintah. “Kami ingin ada perubahan di pulau kami. Tapi perlu dukungan supaya bisa jalan,” katanya.

## MENGGURITA DI PULAU

Menurutnya, jika aturan hanya disepakati sebagian orang, risiko pelanggaran akan tinggi. Dukungan regulasi dan pendampingan akan membantu memperkuat kesepakatan masyarakat.

Sementara itu, Amiruddin dari Langkai melihat pembelajaran ini sebagai langkah awal yang penting. “Kalau kita atur sama-sama, gurita bisa dinikmati anak cucu. Jangan sampai habis di kita saja,” ujarnya. Ia menekankan bahwa tujuan utama bukan hanya peningkatan pendapatan sesaat, tetapi keberlanjutan jangka panjang.



*Nelayan Pulau Langkai dan Lanjukung berfoto bersama fasilitator dan mitra lokal di Wakatobi usai sesi pembelajaran pengelolaan gurita berbasis masyarakat. Foto: YKL Indonesia.*

### **Membawa Pulang Gagasan, Bukan Menyalin Mentah**

Perjalanan pada 7–12 November 2021 itu berlangsung enam hari. Waktu yang singkat untuk menyerap banyak pengalaman. Namun bagi lima nelayan tersebut, kunjungan ini membuka perspektif baru. Laut bukan hanya ruang tangkap, tetapi ruang kelola bersama.

Mereka menyadari bahwa model Derawa tidak bisa dipindahkan begitu saja ke Langkai dan Lanjukung. Kondisi sosial, budaya, dan ekologis berbeda. Tetapi prinsip dasarnya relevan. Ketika masyarakat sepakat

mengatur sumber dayanya sendiri, peluang keberlanjutan menjadi lebih besar.

Sepulang dari Wakatobi, mereka tidak membawa aturan jadi atau dokumen resmi. Mereka membawa cerita, contoh nyata, dan keyakinan bahwa perubahan mungkin dilakukan.

Bagi nelayan Langkai dan Lanjukang, menjaga gurita bukan berarti berhenti melaut. Menutup sementara bukan berarti kehilangan selamanya. Justru dengan memberi waktu bagi laut untuk pulih, hasil tangkapan bisa lebih besar dan lebih stabil. “Kami ingin masyarakat di pulau kami bisa mengerti dan mau mencoba,” kata Amiruddin.

Perjalanan mereka mungkin dimulai dengan rasa waswas di bandara. Namun ia berakhir dengan refleksi yang lebih dalam. Keberlanjutan tidak datang dari luar, melainkan dari kesepakatan dan komitmen masyarakat sendiri.

Lima orang mungkin terlihat kecil dalam skala perubahan. Tetapi jika gagasan yang mereka bawa mampu memicu dialog di pulau, melibatkan tokoh adat, perempuan, dan pemerintah setempat, maka langkah kecil itu bisa menjadi awal perubahan besar.

Di tengah tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut, pengalaman belajar lintas pulau ini menjadi pengingat sederhana. Menjaga laut adalah investasi jangka panjang. Dan kadang, keberanian untuk belajar adalah langkah pertama menuju laut yang tetap produktif bagi generasi berikutnya.

*Nirwan Dessibali – 14 November 2021*



## Program Pengelolaan Gurita ternyata juga Lindungi Spesies Terancam Punah di Perairan Makassar

Erwin terlihat sumringah dan bersemangat hari itu, ia bersama belasan nelayan lainnya dari Pulau Langkai dan Lanjukang datang ke Makassar untuk berdiskusi perihal program yang baru saja mereka jalankan. Dengan antusias ia menjelaskan bagaimana progres program dan menunggu beberapa minggu lagi untuk melihat hasilnya.

“Inshaallah pertengahan Mei nanti kita mulai buka perairan yang baru saja ditutup, semoga bapak bisa berkunjung ke sana nanti,” ujarnya, Kamis (28/4/2022). Hari itu, Erwin berkesempatan menghadiri kegiatan “pertemuan pelibatan para pihak” mengenai sistem buka tutup perikanan gurita skala kecil.

Erwin adalah nelayan gurita di Pulau Langkai, yang secara administrasi berada di Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Makassar, Sulawesi Selatan. Pertemuan hari itu adalah bagian dari program penguatan ekonomi dan konservasi gurita berbasis masyarakat di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang Kota Makassar. Program ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan perikanan gurita skala kecil berbasis masyarakat.

Menurut Erwin, penerapan sistem buka-tutup sebagai bagian program ini sudah berlangsung selama 2 bulan lebih dengan wilayah tutupan mencakup 1 mil bujur sangkar, berada di wilayah perairan antara Pulau Langkai dan Lanjukang. “Sejauh ini berlangsung baik, nelayan juga menerima dengan baik dan bahkan sangat antusias. Kita belum tahu hasilnya seperti apa, namun semoga hasilnya bisa maksimal,” katanya.

Meski mendapat dukungan nelayan di kedua pulau, tantangan justru datang dari luar, yaitu nelayan-nelayan dari luar yang melakukan aktivitas penyelaman di lokasi tersebut.

“Mungkin mereka tidak tahu kalau wilayah tersebut ditutup untuk sementara, namun kami datangi mereka dan bicara baik-baik. Mereka bisa mengerti dan menangkap ikan di wilayah lain,” jelas Erwin.

### Tata Kelola Gurita dan Perlindungan Spesies Terancam Punah

Menurut Alief Fachrul Raazy, Program Manager YKL Indonesia, program Proteksi Gama adalah salah satu upaya untuk mengurangi ancaman kerusakan ekosistem terumbu karang dan tekanan terhadap kelestarian sumber daya perikanan dengan memberikan pilihan atau alternatif komoditas perikanan yang bernilai ekonomis, yang masih melimpah dan bisa ditangkap secara ramah lingkungan, agar pemanfaatannya dapat berkelanjutan.

Di antara beberapa jenis komoditas sumber daya ikan yang relatif masih melimpah dan dapat ditangkap secara ramah lingkungan adalah gurita, yang masih melimpah di perairan laut Kepulauan Spermonde termasuk perairan Pulau Langkai dan Lanjukang. “Agar pemanfaatan gurita ini dapat terus dilakukan secara jangka panjang dan berkesinambungan, maka diperlukan upaya pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” katanya.



*Masyarakat nelayan di Pulau Langkai mendapat pendampingan intensif dari fasilitator YKL Indonesia terkait tata kelola gurita. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia*

Menurut Fachrul, tujuan strategis dari program itu adalah meningkatkan nilai dan kualitas hasil tangkapan menjadi “insentif” yang dapat menggerakkan perubahan perilaku penangkapan ikan dan meminimalisir perilaku penangkapan ikan yang merusak.

Sedangkan tujuan yang akan dicapai adalah terbangunnya tata kelola perikanan gurita yang berkelanjutan dan terlindunginya ekosistem terumbu karang, termasuk terlindunginya biota laut penting lainnya di wilayah Kepulauan Spermonde khususnya di Pulau Langkai dan Lanjukang.

Dijelaskan Fachrul, sistem buka-tutup gurita ini pada dasarnya memberikan area untuk gurita dapat bertumbuh dan bertambah besar melalui penutupan wilayah dan dengan waktu tertentu (temporal) akses penangkapan pada area tersebut akan kembali dibuka.

“Model buka–tutupnya adalah sistem di mana terdapat kawasan yang dalam waktu tertentu ditutup dan dibuka, dalam hal ini untuk biota gurita. Kita berharap gurita dalam 3 bulan ditutup kualitasnya meningkat dan beratnya bisa lebih baik.”

Selama ini, lanjut Fachrul, gurita yang berada di sekitar dua pulau itu didominasi oleh gurita di bawah *grade* A dan B yang bernilai ekonomis tinggi. “Justru yang banyak ditangkap selama ini adalah kualitas rendah *grade* C, D dan bahkan di bawahnya lagi, kualitas lokal. Melalui penerapan sistem ini kita berharap penutupan itu bisa berdampak, memberi kesempatan gurita untuk tumbuh dengan baik, kalau besar maka nilainya bertambah, menambah ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Dijelaskan Fachrul, program ini tidak semata untuk tata kelola gurita, namun juga menjadi pintu masuk untuk perlindungan spesies kunci terancam punah di kawasan tersebut, utamanya terhadap spesies kunci yang terancam punah, seperti hiu berkepala martil dan hiu putih.

“Jadi dengan adanya pengelolaan gurita, penangkapan yang ramah lingkungan, kemudian pada akhirnya nelayan sadar bahwa wilayah yang dikelola lewat program ini adalah wilayah yang betul-betul terlindungi secara ekosistem dan biotanya.”



*Gurita grade A adalah gurita dengan nilai ekonomis tinggi yang sudah sulit ditemukan nelayan. Melalui program Proteksi Gama diharapkan bisa membantu dalam mengembalikan kondisi laut menjadi lebih baik, yang bagus untuk perkembangan gurita. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia*

Selama ini, di kedua pulau tersebut terdapat situasi kritis di mana masih marak perilaku penangkapan merusak oleh nelayan, seperti bom dan bus. Padahal perairan sekitar dua pulau itu adalah salah satu spot dengan keanekaragaman yang tinggi dengan biota sumber daya yang banyak, sehingga nelayan dari pulau-pulau lain banyak datang ke sana untuk menangkap ikan. “Kalau tidak ada pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal maka akan sangat tereksploitasi,” tambahnya.

Program ini Proteksi Gama sendiri dimulai sejak Mei 2021. Dalam program ini, ada sejumlah kegiatan yang dilakukan, antara lain profiling perikanan terkait perikanan gurita skala kecil baik itu dari aspek sosial ekonomi, wilayah tangkap, dsb. “Kita juga melakukan pendataan hasil tangkapan gurita nelayan, yang pendataannya dilakukan oleh nelayan sendiri. Ada juga kegiatan peningkatan kapasitas terkait kelembagaan, penanganan tangkapan gurita, tata kelola, biologi gurita, dan

melibatkan *best practice* dari daerah lain yang sudah melakukan inisiatif ini, dalam hal ini kami mengundang pihak Japesda dari Gorontalo, kemudian ada juga nelayan studi banding nelayan ke Kabupaten Wakatobi.”

### **Solusi Konflik**

Menurut Hamzah, Lurah Barrang Caddi, program yang dilaksanakan YKL Indonesia ini telah lama dinantikan masyarakat mengingat adanya potensi konflik nelayan antar-nelayan selama ini, program ini bisa jadi sebuah solusi konflik.

“Dulu memang terjadi konflik antara warga Pulau Langkai, Lumu-lumu dan Bone Tambung terkait warga Barrang Caddi yang melakukan penangkapan dengan sistem tidak ramah lingkungan, sehingga warga memburu nelayan-nelayan tersebut. Di Lanjukang dan Langkai memang daerah di mana orang dulu mencari ikan karena kondisi terumbu karang yang masih bagus, ikan tenggiri dan cakalang juga melimpah di sana.”

Menurutnya, keberadaan program YKL Indonesia membina masyarakat melalui sistem buka-tutup sangat membantu dan mendukung masyarakat dengan memberi pengetahuan dan pemahaman tidak hanya terkait perikanan ramah lingkungan namun juga terkait tata kelola gurita agar bisa memberi hasil tangkapan yang lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya.

Menurut Hamzah, pemerintah kelurahan selama ini memberi dukungan dengan secara aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat, khususnya di pulau-pulau lain yang tidak terkait program.

“Penting dilakukan sosialisasi ke nelayan-nelayan di pulau lain bahwa sistem buka-tutup sementara ini bukan larangan permanen, jangan sampai menimbulkan konflik karena merasa dilarang, ini perlu disampaikan secara baik akan tujuannya untuk perbaikan kualitas hasil tangkapan dan untuk upaya melindungi.”

*Wahyu Chandra - 17 Mei 2022*



## Penting dalam Ekosistem Laut, Hiu dan Pari di Indonesia Justru Terancam

Hiu dan pari di Indonesia mengalami keterancaman. Khusus untuk hiu, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara penangkap hiu terbanyak di dunia dengan rata-rata tangkapan sebanyak 111.445 metrik ton per tahun, merujuk pada data dari *Food and Agriculture Organization (FAO)* yang disampaikan pada Simposium Hiu dan Pari Indonesia ke-3 yang dilaksanakan pada 2020 silam.

Hal ini disampaikan oleh Abdy Hasan, *Elasmobranch Science and Management Coordinator* Yayasan Konservasi Indonesia, dalam diskusi bertema “Urgensi Penyelamatan Biota Laut Dilindungi dan Terancam Punah”, yang dilaksanakan oleh Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia, di Makassar, Sulawesi Selatan, pertengahan Juni 2022 silam.

Diskusi ini adalah bagian dari Program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat (Proteksi Gama) di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang Kota Makassar.

Menurut Abdy, penangkapan dan perdagangan sirip hiu telah mempengaruhi status konservasinya, sehingga populasinya mengalami penurunan. Di sisi lain, hiu rentan terancam karena memiliki waktu untuk matang kelamin yang cukup lama dengan rata-rata usia matang kelamin 15-20 tahun. “Itu berarti hiu baru bisa kawin dan memperbanyak populasinya setelah umur 15-20 tahun. Di sisi lain, hiu juga mempunyai jumlah telur atau anakan yang sedikit, hanya 1-2 anakan per individu. Sehingga, rendahnya tingkat reproduksi ini menyebabkan spesies ini sangat rentan terhadap penangkapan ikan secara berlebihan,” jelas Abdy.

Hal yang sama terjadi untuk pari yang mengalami penangkapan yang intensif dan luas, serta akibat produktivitas biologisnya yang sangat rendah, seperti pertumbuhan dan kematangannya yang lambat, waktu generasi lama serta kesuburannya juga rendah, yang menyebabkan pemulihan populasinya menjadi lambat.



*Diskusi bertema “Urgensi Penyelamatan Biota Laut Dilindungi dan Terancam Punah”, yang dilaksanakan oleh Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia, di Makassar, pertengahan Juni 2022 silam. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*

Menurut Abdy, spesies hiu, pari dan hiu hantu di Indonesia teridentifikasi sebanyak 116 untuk hiu, pari sebanyak 96 spesies, dan hiu hantu sebanyak 4 spesies. Dari seluruh spesies tersebut terdapat 63 spesies prioritas pendataan.

Dijelaskan Abdy bahwa status konservasi hiu di Indonesia berdasarkan regulasi perlindungan hidup terbagi menjadi tiga, yaitu perlindungan penuh, dilarang ditangkap, dilarang diperjualbelikan, harus segera dilepasliarkan bila tidak sengaja ditangkap dan dilaporkan ke pihak berwenang.

Abdi kemudian merinci status hiu dan pari di Indonesia berdasarkan status perlindungannya, yaitu satu spesies hiu dan 9 spesies pari berkategori dilindungi penuh. “Untuk kategori Apendiks II CITES untuk hiu sebanyak 9 spesies, pari sebanyak 14 spesies. Kemudian kategori

untuk potensial Apendiks CITES II, yaitu hiu sebanyak 22 spesies dan pari sebanyak 7 spesies.”

Selain regulasi perlindungan secara nasional, dikenal juga kategori keterancaman atau kepunahan secara global. Berdasarkan kategori yang dikeluarkan oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) terdapat 37 persen spesies hiu dan pari yang masuk dalam kategori terancam.

Kemudian kategori keterancaman spesies hiu dan pari secara global, ada beberapa kategori yang dikeluarkan oleh IUCN, yaitu kategori Critically Endangered (CR) karena terancam punah, sebanyak 4 spesies, kemudian Endangered (EN) atau terancam punah 9 spesies, Vulnerable (VU) sebanyak 6 spesies, Near Threatened (NT) 13 spesies. “Untuk spesies pari yang masuk kategori CR sebanyak 11 spesies, EN sebanyak 16 spesies, VU sebanyak 1 spesies dan NT sebanyak 2 spesies.”

### **Peran Hiu untuk Ekosistem**

Menurut Abdy, hiu bisa ditemukan di beberapa habitat di pantai dari pesisir sampai ke laut dalam, di mana hiu biasanya akan datang ke daerah laut dalam untuk bertelur dan beranak.

Hiu berperan sebagai predator puncak dalam suatu ekosistem di mana dia menjaga agar semua populasi di bawahnya tetap stabil dan tetap berkelanjutan.

“Di sini kita bisa lihat saat hiu hilang atau terancam keberadaannya pada suatu ekosistem pada suatu daerah maka spesies di bawahnya itu akan bertumbuh lebih banyak.”

Kondisi ini, lanjut Abdy, terlihat menguntungkan, namun pada faktanya akan terjadi lonjakan ikan tuna yang kemudian akan menghabisi populasi ikan kakap, Akibatnya jumlah ikan kecil yang akan terus menerus menurun sejalan dengan hilangnya habitat ikan kakap.

“Saat semua ikan kecil habis di mana ikan tuna, ikan kecil dan ikan kakap tidak punya kesempatan untuk bertelur, dan akhirnya ikan tuna itu akan

kehabisan sumber makanannya. Dan akhirnya semua spesies pada ekosistem tersebut akan punah karena sudah tidak adanya sumber makanan dan terus meningkatnya tekanan terhadap perikanan.”

Menurut Abdy, hiu dikenal sebagai ‘dokter’ di ekosistemnya di mana dia akan memakan ikan yang sakit dan yang cacat di suatu kelompok dan hanya meninggalkan ikan yang sehat.

“Kumpulan ikan yang sehat ini akan memiliki kemungkinan besar untuk hidup sampai dewasa dan bertelur kembali. Ikan itu berhasil menyelesaikan siklus hidupnya dan mendapatkan lagi statusnya spesies tersebut.”

Dijelaskan Abdy, saat ini tengah didorong pemanfaatan hiu dan pari secara non ekstraktif. Sebuah studi yang dilakukan Conservation International (CI) menunjukkan bahwa valuasi dari pengelolaan hiu dan pari secara berkelanjutan bisa menyumbang sekitar 140 juta USD ketika dikelola dalam bentuk hidup, dibanding dalam kondisi mati yang hanya memiliki valuasi ekonomi sebesar 5 juta USD. “Kita bisa membandingkan di sini bahwa kita bisa mendapatkan sebanyak 140 juta USD kalau bisa mengelola spesies ini dengan pemanfaatan yang berkelanjutan. Tentunya itu yang perlu diperhatikan, sebelum melakukan pariwisata itu wajib untuk selalu mengikuti kode etik atau adat istiadat setempat,” jelasnya.

### **Perlindungan Spesies di Perairan Pulau Langkai-Lanjukang**

Salah satu target yang ingin dicapai YKL Indonesia melalui program Proteksi Gama adalah perlindungan spesies penting di kawasan perairan Pulau Langkai dan Lanjukang Makassar melalui pemberdayaan masyarakat nelayan menangkap gurita secara ramah lingkungan dan menerapkan sistem buka-tutup.

“Sejauh ini dapat dinyatakan bahwa inisiasi uji coba sistem buka-tutup di wilayah perairan Pulau Langkai-Lanjukang, nelayan penangkap gurita dan masyarakat lokal telah bersepakat untuk bersama-sama menutup sementara waktu beberapa wilayah perairan khususnya yang merupakan lokasi penangkapan gurita,” ungkap Alief Fachrul Raazy, Program Manager YKL Indonesia.

Di sisi lain, lanjut Fachrul, nelayan telah berinisiatif mengawasi wilayahnya dari ancaman nelayan dari mana pun yang melakukan *destructive fishing*, penangkapan spesies lindung yang disengaja, maupun *by catch*.

Dikatakan Fachrul, pengaturan zona-zona yang ditetapkan dalam sistem buka-tutup ini secara tidak langsung akan melindungi ekosistem terumbu karang sehingga akan menjadi lebih baik, biota di dalamnya berkesempatan berkembang biak dan melimpah, termasuk dua spesies hiu, *silky shark* dan *scalloped hammerhead shark* yang menjadi rantai makan tertinggi di laut.

“Intervensi proyek ini secara bertahap telah berhasil mengubah pola pikir nelayan lokal dalam mengelola gurita secara berkelanjutan, menjaga kesehatan ekosistem terumbu karang termasuk menjaga spesies biota laut yang dilindungi dan terancam langka, serta mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal,” tambahnya.

*Wahyu Chandra - 16 Juli 2022*



## Nelayan Makassar Sepakat Tutup Sementara Wilayah Tangkap Gurita

Nelayan di Pulau Langkai dan Lanjukang, di Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, membangun kesepakatan tidak menangkap gurita selama tiga bulan di wilayah Perairan Biring Batua, sebuah kawasan tak jauh dari wilayah perairan Pulau Lanjukang.

Kesepakatan itu sebagai kelanjutan dari kegiatan uji coba di wilayah antara Pulau Langkai dan Lanjukang, sebagai bagian dari pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat (PROTEKSI GAMA) untuk mendorong tata kelola perikanan gurita skala kecil di kedua pulau tersebut.

Acara penandatanganan kesepakatan ini dilakukan di Pulau Langkai, Rabu (27/7/2022), dimulai dengan diskusi, dilanjutkan dengan penyampaian ikrar dari perwakilan nelayan dan penandatanganan kesepakatan dari nelayan dan perwakilan sejumlah institusi pemerintahan dari tingkat provinsi hingga kelurahan, termasuk perwakilan dari kepolisian dan polisi perairan (Polair) untuk wilayah kerja Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Makassar.

Terdapat lima poin kesepakatan yang dibacakan oleh Erwin, perwakilan nelayan dari Pulau Langkai. Pertama, mereka bersepakat menutup sementara waktu, lokasi penangkapan gurita, di wilayah Perairan Biring Batua, terhitung dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai 31 Oktober 2022.

Kedua, semua kegiatan penangkapan gurita di wilayah ini tidak diperbolehkan selama masa penutupan, kecuali nelayan pemancing yang menggunakan *kedo-kedo*, nelayan pemancing ikan tenggiri, *ande-ande* dan sebagainya. "Kesepakatan ketiga, memberi tanda batas-batas pada wilayah penutupan sementara berupa pelampung dan bendera dengan dilengkapi papan pengumuman tentang larangan penangkapan gurita," ungkap Erwin.



*Haji Mansyur, tokoh masyarakat di Pulau Langkai turut membubuhkan tanda tangan menyepakati penutupan sementara penangkapan gurita di perairan di wilayah Perairan Biring Batua, sebuah kawasan tak jauh dari wilayah perairan Pulau Lanjukang, Makassar, Sulsel. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*

Terdapat lima poin kesepakatan yang dibacakan oleh Erwin, perwakilan nelayan dari Pulau Langkai. Pertama, mereka bersepakat menutup sementara waktu, lokasi penangkapan gurita, di wilayah Perairan Biring Batua, terhitung dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai 31 Oktober 2022.

Kedua, semua kegiatan penangkapan gurita di wilayah ini tidak diperbolehkan selama masa penutupan, kecuali nelayan pemancing yang menggunakan *kedo-kedo*, nelayan pemancing ikan tenggiri, *ande-ande* dan sebagainya. “Kesepakatan ketiga, memberi tanda batas-batas pada wilayah penutupan sementara berupa pelampung dan bendera dengan dilengkapi papan pengumuman tentang larangan penangkapan gurita,” ungkap Erwin.

Poin keempat adalah melakukan pengawasan secara bersama-sama, pada lokasi penangkapan gurita yang ditutup sementara waktu tersebut. Poin terakhir bahwa apabila didapati menangkap gurita dan/atau menggunakan alat tangkap yang tidak termasuk dalam pengecualian di wilayah penutupan sementara, maka akan diberikan teguran dan pemahaman terkait maksud melakukan penutupan sementara.

“Jika mengulangi perbuatan tersebut, akan diberi sanksi berupa hasil tangkapannya akan disita; dan hasil sitaannya akan disumbangkan untuk kepentingan masyarakat umum dan akan dilaporkan pada pihak yang berkewajiban.”

Alief Fachrul Raazy, Program Manager YKL Indonesia, mengapresiasi nelayan Langkai-Lanjukang yang mampu membuat kesepakatan lokal terkait lokasi dan waktu penangkapan gurita sebagai kelanjutan uji coba sistem buka-tutup wilayah penangkapan gurita seluas 203,41 Ha selama bulan Februari hingga Mei 2022. “Hasil uji coba awal ini memberikan pembelajaran secara langsung dan penyadaran bagi mereka, bahwa sistem buka tutup memberi dampak pada pertumbuhan gurita, termasuk biota lain seperti ikan demersal dan memberikan proses pemulihan bagi ekosistem,” katanya.

Nelayan juga memahami bahwa dampak dari sistem ini cukup menekan ancaman aktivitas *destructive* seperti penangkapan menggunakan bom dan bius. Nelayan juga pada akhirnya memahami bahwa ada kaitan musim penangkapan dengan lokasi yang ditutup, termasuk masa bertelur dan perkembangbiakan gurita.

“Kesepakatan yang telah nelayan Langkai-Lanjukang buat dan laksanakan dengan baik, perlu mendapatkan respons yang baik dari semua pihak dan mendukung inisiatifnya. Kehadiran berbagai pihak untuk pertemuan bersama masyarakat Langkai-Lanjukang sebagai bentuk pelibatan *stakeholders* dalam mendukung inisiatif tata kelola gurita berbasis masyarakat. Harapannya adalah agar sistem ini dapat terus diterapkan oleh masyarakat dan tentunya berkelanjutan.”

### **Saling Berbagi Pengetahuan**

Andi Muhammad Ibrahim, *technical advisor* di YKL Indonesia, menyampaikan bahwa sebelum lahirnya kesepakatan tersebut, selama setahun terakhir telah dilakukan serangkaian pendampingan ke masyarakat di dua pulau, baik melalui sosialisasi maupun dengan pengembangan kapasitas nelayan untuk bisa mendata sendiri potensi dan hasil-hasil laut, khususnya gurita, yang mereka dapatkan di laut.

Dikatakan Ibrahim bahwa berbagai proses panjang tersebut adalah bagian dari membantu mentransformasi pengetahuan, memindahkan pengetahuan dan belajar satu sama lain. “Dari setahun kami berprogram kami juga banyak belajar dari nelayan, jadi ada sebuah upaya pertukaran pengetahuan yang saling mengisi.”

Ibrahim kemudian menekankan pentingnya upaya konservasi dilakukan agar ekosistem perairan tetap terjaga, apalagi perairan sekitar dua pulau tersebut dulunya memiliki ikan yang melimpah, namun semakin berkurang akibat maraknya aktivitas penangkapan ikan yang tak ramah lingkungan.

“Seingat saya, sekitar dua pulau ini sangat gampang cari ikan, paling lima menit nelayan sudah bisa tangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan tradisional *kedo-kedo*, namun sekarang semakin sulit. Gurita menjadi perhatian karena bagian dari upaya mempersiapkan jangka panjang untuk generasi yang akan datang. Kita akan bantu maksimal, namun kami tidak bisa berbuat tanpa energinya dari masyarakat,” ungkapnya.

Dampak berkurangnya ikan ini, lanjut Ibrahim, juga semakin dirasakan di Kota Makassar akhir-akhir ini, di mana segala jenis ikan merosot drastis, sehingga sebagian besar ikan yang dijual di pasaran saat ini adalah ikan bandeng yang merupakan ikan budi daya tambak.

Dikatakan Ibrahim bahwa apa yang dilakukan nelayan di dua pulau ini dalam menjaga laut serta mengembangkan pengetahuan sendiri dan melakukan pencatatan hasil tangkapan dengan baik telah menjadi perhatian berbagai pihak, bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari dunia internasional.

Terkait upaya konservasi melalui penangkapan gurita secara berkelanjutan yang dilakukan saat ini, tak terlepas dari adanya tren gurita semakin bernilai ekonomis tinggi, khususnya di Sulsel, yang menempati urutan tertinggi ketiga setelah tuna dan udang, sehingga rentan akan *overfishing* atau penangkapan berlebihan. “Sehingga penting untuk jangan terus ditangkap, namun ditangkap secara ramah lingkungan dan berkelanjutan serta selektif melihat ukurannya. Kalau di

luar ukuran yang diperkenankan dilepas saja, diberi kesempatan untuk berkembang biak. Inilah gunanya ditutup untuk sementara waktu.”

Penutupan sementara waktu, lanjut Ibrahim, akan memberi kesempatan bukan hanya kepada gurita, tetapi juga menjaga terumbu karang sehingga ikan-ikan pun akan melimpah. “Pengalaman ujicoba lalu, ternyata menutup 3 bulan di perairan Taka Salangang menyebabkan ikan karang dan kakap kerapu yang punya nilai jual bagus meningkat. Jadi kita memperbaiki secara jangka panjang dan lebih luas.”

Penutupan sementara kawasan tertentu ini, lanjut Ibrahim, nantinya akan dilakukan di kawasan lain di kedua pulau tersebut, sehingga bersifat rotasi, yang penentuannya berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat. “Nantinya, masyarakat sendiri yang akan menentukan mana yang akan ditutup terlebih dulu, dan setelah selesai akan berpindah ke lokasi lain.”

Haji Mansyur, tokoh masyarakat setempat, berharap agar seiring dijalankannya program ini ada pengawasan lebih ketat dari Polair. “Gurita dan kerapu itu tempatnya di batu (karang), kalau batunya rusak maka ikan juga hilang. Batu itu rumahnya ikan, seperti halnya manusia kalau rumahnya rusak maka tak ada lagi tempat untuk menetap.”

Hamzah, Lurah Barrang Caddi, menyatakan sangat mendukung program ini dan berharap agar bisa juga dilakukan di pulau lain di wilayah kerjanya yang mencakup 5 pulau.

“Dengan adanya program ini kita berharap aktivitas *illegal fishing* bisa berkurang dan nelayan beralih ke kegiatan-kegiatan yang bisa membuat ekosistem laut dan pesisir menjadi lebih bagus. Selama ini masyarakat masih banyak melakukan kegiatan *illegal fishing*, yang sulit dihindari karena alasan butuh hidup. Namun harus disampaikan ke mereka menjaga ekosistem laut untuk keberlanjutan anak cucu. Apalagi dengan kondisi saat ini saya merasakan banyak ikan yang hilang. Ini pelajaran bagi kita, kalau tidak sadar dari sekarang bagaimana menjaga ekosistem ini maka kapan lagi?” kata Hamzah.



## Inisiatif Anas dan Harapan Baru Konservasi Penyu di Pulau Lanjukang

Anas (27) terlihat sumringah sambil menunjuk ke sebuah gundukan pasir yang telah dipagari seng dan kayu, tempat di mana puluhan telur penyu berada. Tak jauh dari tempat itu terdapat wadah gabus berisi puluhan tukik yang sebentar lagi akan rilis ke alam.

Anas adalah pemuda dan nelayan di Pulau Lanjukang, Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ia adalah nelayan penangkap gurita di musim-musim tertentu. Di sela-sela waktunya ia gunakan untuk berjalan di pesisir pantai mencari lubang-lubang di mana penyu bertelur di musim tertentu.

Kebiasaan ini baru dilakukan beberapa bulan lalu. Bersama temannya Yusri, ia tergerak melakukannya setelah mendapat penjelasan dari pihak Balai Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar dalam sebuah workshop melalui program Proteksi Gama. “Saya baru tahu kalau penyu itu penting itu dijaga makanya saya tergerak untuk melindungi,” katanya, Sabtu (1/10/2022) lalu.

Penyu-penyu itu sendiri telah lama diketahuinya berada di pesisir pantai. Ia sering melihat warga sekitar mencari telur penyu untuk kebutuhan konsumsi. Tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, namun telur penyu itu juga diyakini bisa memberi kekuatan bagi vitalis pria jika dikonsumsi. “Kalau di sini *sih* tak ada yang dijual, hanya untuk dimakan saja. Ini sudah jadi kebiasaan sejak lama.”

Menurut Anas, langkah awal yang dilakukan setelah mengetahui pentingnya menjaga penyu tersebut adalah dengan memagari lokasi bertelur menggunakan kayu dan seng yang ditemukannya di sekitar pantai. Selain sebagai penanda, pemagaran itu juga bertujuan untuk menjaga dari predator lain yang ada di sekitar lokasi.



*Anas (dua dari kiri) menunjukkan lubang telur penyu yang telah dia pagari menggunakan kayu dan seng selain sebagai penanda, pemagaran itu juga bertujuan untuk menjaga dari predator lain yang ada di sekitar lokasi. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*

Setelah tukik menetas ia memindahkan ke tempat penangkaran tukik yang dibuat atas inisiasi sendiri. Setelah besar dilepas ke laut, kadang ditawarkan ke wisatawan yang datang untuk pelepasan dengan harga Rp10 ribu-20 ribu, sehingga ini bisa menjadi tambahan penghasilan.

Inisiatif yang dilakukan Anas mendapat perhatian dari YKL Indonesia yang kemudian memberikan perhatian khusus atas inisiatif yang dilakukan karena lahir dari kesadaran nelayan tersebut sendiri dan dilakukan secara mandiri.

“Perlu didukung dan mendapatkan pendampingan serta dukungan lainnya. Apalagi penyu yang sering ditemukan adalah penyu sisik dan penyu hijau yang merupakan spesies kunci yang dilindungi. Memang informasi awal yang kami terima bahwa kedua jenis penyu ini memang sering ditemukan di perairan setempat. Di Pulau Lanjukang bisa ditemukan 15-20 lubang, sementara di Pulau Langkai ada sekitar 3-5 lubang penyu,” ungkap Adi Zulkarnaen, fasilitator dari YKL Indonesia.

Menurut Zulkarnaen, Pulau Lanjukang sendiri memang sangat ideal untuk perlindungan penyu karena penduduk yang sedikit dan tak begitu padat, sehingga kurang aktivitas warga yang bisa mengganggu lokasi telur. Selain itu pulau ini dikenal sebagai pulau wisata, sehingga ada potensi wisata untuk peralihan tukik ke laut.

Penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) adalah jenis penyu terancam punah yang tergolong dalam familia *Cheloniidae*. Penyu ini adalah satu satunya spesies dalam genusnya yang memiliki persebaran di seluruh dunia, dengan dua subspecies terdapat di Atlantik dan Pasifik. Sementara penyu hijau (*Chelonia mydas*) adalah penyu laut besar yang termasuk dalam keluarga *Cheloniidae*. Hewan ini adalah satu-satunya spesies dalam golongan *Chelonia*. Mereka hidup di semua laut tropis dan subtropis, terutama di Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik.

Namanya didapat dari lemak berwarna hijau yang terletak di bawah cangkang mereka. Jumlah penyu hijau semakin berkurang karena banyak diburu untuk diambil pelindung tubuhnya berupa karapaks dan plastron sebagai hiasan. Telurnya adalah sumber protein tinggi dan obat, sementara dagingnya sebagai bahan makanan.

Sebagai bentuk dukungan atas Anas, YKL Indonesia akan memperkuat inisiasi yang telah dilakukan warga dengan membantu pembentukan dan pengembangan kapasitas kelompok konservasi. “Kami juga akan membantu dalam pengembangan sarana dan prasarana konservasi penyu melalui kerja sama parapihak, seperti BPSPL Makassar, dan pihak-pihak lain. Lalu membantu penyebaran informasi terkait konservasi penyu tersebut sehingga bisa menjadi destinasi wisata baru di Pulau Lanjukang, baik melalui website YKL Indonesia maupun media lain,” jelas Zulkarnaen.

### **Pengenalan atas Spesies Kunci**

Menurut Zulkarnen, apa yang dilakukan oleh Anas merupakan dampak lain dari program Proteksi Gama yang dilakukan satu setengah tahun terakhir di Pulau Lanjukang dan Langkai. Program ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan perikanan gurita skala kecil berbasis masyarakat di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang.

## **MENGGURITA DI PULAU**

YKL Indonesia sendiri, bekerjasama dengan BPSL Makassar telah melaksanakan pelatihan terkait identifikasi spesies prioritas penting pada Maret 2022 lalu, yang diikuti oleh 42 nelayan, termasuk Anas. “Melalui training ini dilakukan identifikasi spesies prioritas penting di daerah penangkapan gurita sekitar Pulau Langkai dan Lanjukang. Lalu secara bersama-sama direncanakan tindakan prioritas untuk konservasi spesies prioritas penting. Peserta berperan aktif saat diskusi dalam menentukan dan mengidentifikasi jenis biota laut prioritas yang dilindungi di wilayahnya masing-masing.”

Dalam training ini peserta diminta untuk menempelkan gambar-gambar biota ke peta yang telah disiapkan. Selanjutnya mereka mengidentifikasi berbagai jenis biota laut dilindungi yang pernah dijumpai di perairan Pulau Langkai dan Lanjukang dan membuat kategori sesuai intensitas kemunculannya.

Peserta kemudian membuat kategori untuk diisi informasinya seperti keberadaan/ditemukan (banyak, melimpah, kurang), pihak-pihak mana saja yang sering melakukan penangkapan ikan dilindungi, ancaman terhadap jenis ikan yang dilindungi dan kasus yang pernah terjadi dan bagaimana penegakan hukum/aturan oleh pihak berwenang.

“Sebagai hasil training ini, nelayan kemudian mampu menunjukkan beberapa spesies kunci yang ada di sekitar pulau dan bagaimana penanganannya. Seperti misalnya, menjaga telur penyu dari ancaman predator maupun dari manusia agar tidak dikonsumsi, dan ketika telurnya telah menetas, mereka melepaskan tukik ke laut.”

### **Memperkuat Pokmaswas**

Selain pemahaman akan spesies kunci, YKL Indonesia melalui program Proteksi Gama juga memperkuat kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas). Tujuannya adalah memperkuat sisi kelembagaan untuk pengawasan pengelolaan perikanan skala kecil, khususnya perikanan gurita. “Dari hasil diskusi yang kami lakukan akhirnya lahir kesepakatan untuk memperkuat peran kelembagaan terkait pengelolaan perikanan gurita skala kecil,” kata Zulkarnaen.



*Pelepasan tukik ke laut oleh Jaring Nusa, YKL Indonesia dan warga Pulau Lanjukang. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*

Dari berbagai diskusi yang dilakukan, lanjutnya, memberikan gambaran kepada nelayan dan masyarakat terkait pentingnya kelembagaan dan pengelolaannya Pokmaswas. “Di setiap diskusi juga ada brainstorming terkait pemahaman dan kesadaran kritis mereka terkait kaitan konservasi dengan pengelolaan kelembagaan yang baik dan benar.”

Dari kegiatan ini, anggota Pokmaswas secara partisipatif menentukan konsep kelembagaannya dan siapa saja yang terlibat. Mereka kemudian membangun komitmen bersama mengenai aspek kelembagaan yang dapat mendukung pengelolaan perikanan gurita skala kecil di perairan Pulau Langkai dan Lanjukang.

“Selama ini mereka menganggap pembentukan lembaga hanya terkait pada bantuan, namun persepsi tersebut berubah dan bergeser menjadi pemahaman kelembagaan yang fokus pada peningkatan kapasitas, membangun jejaring, dan tujuan pengembangan lembaga yang berperan dalam pengelolaan perikanan gurita skala kecil berkelanjutan.”

*Wahyu Chandra - 11 Oktober 2022*



## Sistem Buka-Tutup Diharapkan Perbaiki Ekosistem Laut yang Rusak Akibat *Destructive Fishing*

Melalui program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat (Proteksi Gama) di Pulau Langkai dan Lanjukang Kota Makassar telah menginisiasi sistem buka-tutup kawasan seluas 200 hektar. Diharapkan melalui sistem buka-tutup ini akan melindungi ekosistem dari tekanan *destructive fishing*.

Alief Fachrul Raazy, koordinator program Proteksi Gama YKL Indonesia, menyatakan bahwa keberadaan sistem buka-tutup kawasan ini telah memberi harapan baru terkait pengelolaan perikanan kecil berkelanjutan di kedua pulau tersebut. Sebuah studi akhir yang dilakukan pada September 2022 lalu menunjukkan adanya perbaikan terumbu karang di sekitar lokasi yang dikonservasi.

“Meskipun hasil ini masih harus ada studi lanjutan, namun setidaknya terlihat ada *recovery* terumbu karang, apalagi di lokasi tersebut dulunya memang masif penggunaan bom dan bius,” ungkapnya dalam *launching* buku berjudul ‘Siasat dari Pulau: Konservasi melalui Tata kelola Gurita di Pulau Langkai dan Lanjukang’, yang dilaksanakan YKL Indonesia di Makassar, Senin (24/10/2022).

Ia berharap upaya ini bisa menjadi model pengelolaan laut di daerah lain, sebagaimana tujuan dari pembuatan buku ini, sehingga kawasan yang terlindungi sementara bisa semakin luas, sekaligus mengurangi tekanan atas laut dari penggunaan alat tangkap yang tak ramah lingkungan.

“Buku ini juga tidak mencoba menghadirkan sebuah informasi yang utuh dan komprehensif, tak ada juga teori-teori. Sebagian besar hanyalah penjelasan bagaimana program ini dimulai, proses-prosesnya, dan hasil akhir program yang tentu saja masih jauh dari harapan.”

Ia berharap buku ini bisa menjadi referensi ketika ada pihak atau lembaga lain yang akan melakukan inisiatif yang sama, baik untuk komoditas gurita, ataupun untuk komoditas lainnya, di kemudian hari.



*Diskusi dan launching buku terkait pembelajaran tata kelola gurita, dilaksanakan oleh Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia di Hotel Aston Makassar, Senin (24/10/2022). Foto: Muhammad Fauzi Rafiq/YKL Indonesia*

Terkait judul 'Siasat dari Pulau', YKL Indonesia ingin menghadirkan pemahaman bahwa program Proteksi Gama tak lebih dari sebuah 'siasat' dalam pengertian positif, dari masyarakat pulau untuk berdaya dan mempertahankan eksistensi perairan mereka dari berbagai ancaman destruktif, baik itu bom, ikan, cantrang dan ancaman lainnya.

"Siasat ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa laut sebagai sumber pencaharian mereka hanya akan bisa eksis memenuhi kebutuhan ekonomi mereka jika terjaga dengan baik. Selama ini berbagai praktik penangkapan ikan secara destruktif telah menghancurkan terumbu karang, yang notabene merupakan rumah baik ikan dan biota penting lainnya, seperti gurita yang kini sedang mereka usahakan," katanya.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Provinsi Sulsel, Andi Agung, menyatakan mendukung apa yang telah dilakukan YKL Indonesia melalui sistem buka-tutup ini, meski ia berharap dalam setiap kegiatan selalu berkoordinasi dengan dinas.

Ia juga berharap agar program-program perikanan kecil berkelanjutan tidak hanya dilakukan di Makassar, tetapi juga di daerah lain yang memiliki potensi perairan yang lebih besar.

“Jangan karena Makassar dianggap dekat sehingga semua kegiatan dilaksanakan di sini, padahal banyak daerah-daerah lain yang perlu mendapat pendampingan, seperti Pangkep atau Selayar yang memiliki tantangan pengelolaan perikanan yang tak kalah besarnya,” katanya.

Koordinator Pengawasan, Pengendalian dan Informasi BKIPM Makassar, Putu Sumardiana, menyarankan agar sistem buka-tutup ini disesuaikan dengan musim gurita ataupun komoditas lain, sehingga ketika buka-tutup dilakukan ada alternatif tangkapan lain. “Perlu juga dipertimbangkan bahwa ketika proses buka-tutup dilakukan bertepatan dengan harga gurita, sehingga nelayan bisa dapat harga yang bagus,” katanya.



*Direktur Eksekutif YKL Indonesia, Nirwan Dessibali, menjelaskan program Proteksi Gama menggunakan poster. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*

Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Demersal Indonesia (ADI), M. Mukhlis Kamal, lebih dari 90 persen nelayan Indonesia adalah nelayan kecil yang menangkap ikan di daerah pesisir. Jika perikanan besar hanya mempekerjakan 2 juta orang, maka perikanan kecil jumlah tenaga kerja mencapai 30 juta orang. Hal ini menjadi peluang yang besar sekaligus tantangan untuk maju, mandiri, dan berkelanjutan. “Perikanan skala kecil menyediakan mata pencaharian dan ketahanan pangan bagi nelayan skala-kecil dan masyarakat lokal di wilayah pesisir. Peran penting perikanan skala kecil bisa dilihat dari aspek ketahanan pangan, asupan gizi masyarakat, dan penyedia lapangan pekerjaan,” katanya.

Menurutnya, potensi perikanan Indonesia masih cukup baik, tetapi perlu dikelola secara berkelanjutan. Nilai ekonomi dan manfaat perikanan skala kecil jauh lebih besar daripada skala besar. Ia mendukung upaya buka-tutup ini sebagai sebuah bentuk kearifan lokal dalam mendukung perikanan kecil berkelanjutan. “Menurut saya perlu melakukan pendekatan kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan.”

Kolonel (Laut) Ahmad Muharam, Asisten Operasi Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VI, dalam paparannya menjelaskan berbagai program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan Lantamal VI, salah satunya menjaga keamanan laut, termasuk dari ancaman *destructive fishing*. “Sejumlah tantangan yang dihadapi antara lain jangkauan pengawasan laut yang sangat luas dengan infrastruktur terbatas, serta kurang tersosialisasinya aturan-aturan terkait laut serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga laut,” katanya.

### Dukungan Regulasi

Berbagai upaya untuk perlindungan kawasan laut melalui pembatasan-pembatasan telah banyak dilakukan, misalnya sasi di Papua dan Maluku, dan *awik-awik* di Bali dan Nusa Tenggara. Ada juga Panglima Laot di Aceh. “Sepanjang pengetahuan saya, upaya pembatasan seperti ini jarang dilakukan oleh masyarakat Bugis-Makassar. Sehingga ketika muncul inisiatif untuk melakukannya maka akan sangat menarik dan perlu untuk direalisasikan,” ungkap Mungsi Lampe, guru besar antropologi maritim dari Universitas Hasanuddin.

Menurutnya, masyarakat Bugis-Makassar dari dulu sulit melakukan inisiatif pembatasan karena mungkin terpengaruh oleh pengusaha-pengusaha Tionghoa yang kapitalistik. “Mereka kemudian terbiasa untuk mencari ikan dalam jumlah banyak karena besarnya permintaan pasar dan faktor harga. Mereka ingin terus menerus eksploitasi hasil laut sebagai respons atas pasar,” tambahnya.

Menurutnya, penerapan sistem buka-tutup yang dilakukan di Pulau Langkai dan Lanjukang adalah program yang sangat bagus, yang jika berhasil maka akan diikuti oleh nelayan-nelayan di pulau lain. Tanpa diminta pun masyarakat akan mau terlibat karena dinilai berdampak positif bagi penghidupan mereka. “Hanya saja, jika ingin program ini berhasil dan berkelanjutan maka harus ada dukungan berbagai pihak, khususnya dari pemerintah melalui aturan atau regulasi. Keberadaan aturan ini akan memberi daya paksa agar masyarakat bisa taat pada aturan yang ada.”

Lanjut dijelaskan Munsir bahwa tanpa ada aturan yang memiliki kekuatan hukum maka kesadaran ini bisa saja hanya akan berlangsung singkat saja. Suatu saat nelayan akan mulai malas, membangkang dan pada akhirnya tidak peduli lagi dengan aturan yang ada. Apalagi jika dia melihat ada nelayan lain yang melakukan pelanggaran namun dibiarkan. “Pada akhirnya masyarakat akan merasa sia-sia mengikuti aturan pembatasan tersebut. Di sinilah pentingnya peran aturan dari pemerintah.

Menurut Munsir bahwa terdapat sejumlah faktor-faktor yang memungkinkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dapat mengubah kebiasaan lama menjadi lebih arif, seperti terbangunnya lembaga pendidikan, baik itu formal dan nonformal berbasis kebutuhan lokal. Faktor lain adalah tumbuhnya kesadaran lingkungan pada masyarakat, termasuk kesadaran akan hukum positif yang berlaku. “Faktor lain terkelolanya jenis ekonomi baru dengan efektivitas melebihi keuntungan aktivitas lama yang merusak membombardir dan membius. Masyarakat juga harus terlibat dan menjadi subjek utama dari setiap program yang dijalankan.”



## Sinergi dan Kolaborasi untuk Perikanan Berkelanjutan di Sulsel

Laut dalam kondisi kritis. Penyebabnya mulai dari aktivitas *destructive fishing* hingga *over fishing*. Terumbu karang yang rusak memengaruhi kualitas ekosistem laut dan pesisir. Harus ada upaya mengurangi tekanan-tekanan tersebut.

“Jika praktik *illegal fishing* sudah tidak tak terhindarkan maka tak mungkin perikanan berkelanjutan ini akan terwujud. Perlu didorong *blue economy* sebagai sebuah konsep yang terkait perikanan berkelanjutan, kesehatan ekosistem dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.”

Hal ini disampaikan Prof. Dr. Najamuddin, dosen ahli perikanan tangkap di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas, dalam *Focus Group Discussion* (FGD) bertema ‘Melangkah Bersama untuk Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Sulawesi Selatan’ yang diselenggarakan oleh Jejaring NGO Laut dan Pesisir Sulsel, di Makassar, Selasa, 25 Oktober 2022.

Diskusi yang merupakan proses pembelajaran tata kelola perikanan skala kecil ini diikuti oleh sejumlah NGO, nelayan, akademisi, pemerintah provinsi dan kota, Polri, TNI, polair, asosiasi swasta, media, dll.

Ada sejumlah isu yang dibahas dalam FGD ini, yaitu rantai pasar dan rantai nilai, pemberdayaan ekonomi dan bisnis perikanan, tata kelola, perlindungan dan pengawasan, penguatan data dan administrasi kenelayanan, serta sarana dan prasarana penunjang.

Menurut Najamuddin, penangkapan ikan di laut yang sudah cenderung *over fishing* saat ini perlu dibatasi, tidak lagi melakukan penangkapan ikan melebihi apa yang ada sekarang. Sehingga kemudian butuh indikator untuk tidak mengambil semua, atau hanya mengambil ikan yang layak tangkap.

“Ini yang perlu dikembangkan di lapangan, kesadaran bahwa ikan itu tidak berganda maksimal. Kalau diambil semua mulai anak hingga

indukan, lalu apa yang akan berkembang? Itu yang harus disampaikan ke nelayan.”

Najamuddin juga menyampaikan kondisi terumbu karang yang semakin banyak rusak yang akan berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan. “Kalau ekosistem rusak maka pasti sumber dayanya juga akan semakin menurun. Ini perlu disadari semua. Kalau melihat status stok Indonesia saat ini sebagian besar sudah dalam kondisi merah, artinya sudah *over fishing*, di sisi lain banyak yang kuning, yang hijau sedikit sekali.”

Sejumlah nelayan yang hadir dalam FGD tersebut menyatakan sulit melakukan pembatasan tangkapan karena sejumlah faktor.

“Kalau tangkap ikan kami tidak pernah pilih-pilih karena kami tidak tahu ikan yang akan terjaring itu besar atau yang kecil. Ikan atau gurita kecil akan diambil selama masih punya harga. Tidak mungkin kami ‘lari kosong’ sementara biaya operasional semakin tinggi, apalagi dengan naiknya harga BBM. Tidak bisa juga bohong kepada istri, misalnya dapat ikan lalu dilepas. Istri di rumah tak mau tahu, apalagi jika ada nelayan lain yang mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak,” ungkap Erwin, nelayan dari Pulau Langkai, Makassar.

Faktor lainnya pada tak adanya standar ukuran dan harga yang jelas. Meskipun terkadang nelayan sudah menangkap ikan dengan kualifikasi yang disarankan namun diberi harga murah. Kualitas dan harga ditentukan seenaknya oleh pengepul, sehingga nelayan kemudian mengambil apa saja yang bisa diperoleh di laut.

Meski demikian, Erwin mengakui bisa saja melakukan pembatasan jika ada pendampingan yang intens, penyuluhan dan insentif dari pemerintah atau swasta.



*Seorang nelayan Pulau Langkai, Makassar, Sulsel yang pendapatannya menurun drastis terdampak pandemi COVID-19. Kini mereka bergantung pada pencarian ikan telur terbang yang hanya bisa diusahakan oleh nelayan berkapal besar. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*

Putu Sumardiana, Koordinator Pengawasan, Pengendalian dan Informasi BKIPM Makassar, menyampaikan pentingnya informasi harga kepada nelayan, termasuk jenis dan kualitas ikan yang diinginkan pasar. Selama ini ada kesan para pengepul seandainya mematok harga karena mereka pun kurang tahu kriteria ikan yang bagus sehingga membuat harga sendiri. “Ini perlu sosialisasi ke nelayan agar mereka tahu. Pengepul pasti mau untung tapi ya caranya jangan seperti itu dong. Perlu juga sosialisasi ke nelayan jenis dan ukuran mana yang nilainya bagus, dsb.”

Menurut Putu, salah satu tantangan nelayan ketika melaut adalah bagaimana mempertahankan suhu ikan hasil tangkapan agar tetap segar, sehingga mereka perlu dibekali es untuk mempertahankan kualitas. Ia menyarankan optimalisasi dukungan DKP provinsi melalui program pengadaan *cold storage* mini untuk nelayan, karena kondisi es yang cepat mencair.

Kamaruddin Azis, dari Yayasan Commit menyatakan inisiatif untuk mendorong perikanan kecil berkelanjutan hal yang bagus, namun hanya bisa berjalan efektif jika pengambil kebijakan juga peduli.

“Mungkin kita menghadirkan energi penguatan kapasitas perencana di ASN, namun ketika sampai ke pimpinan kadang bermasalah, karena mereka tidak mau mengalokasikan sumber daya atau anggarannya dikurangi atau malah tidak ada sama sekali, serta penempatan personil yang tidak tepat.”

Menurutnya, selama ini diskusi banyak fokus pembahasan pada nelayan, sementara nelayan sendiri mungkin merasa tak memiliki masalah. Masalah justru ada di pemerintah yang tidak *care* dan *aware* dengan apa yang terjadi depan matanya.

“Apa yang harus dilakukan menurut saya simpel, pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang memadai agar pesisir dan pulau-pulau kita bisa mendapat hasil maksimal. Tidak mungkin NGO jalan sendiri. Pengambil kebijakan, baik itu pemerintah daerah dan pusat, DPRD dan DPR, harus diajak untuk bicara ini.”

Ia memuji komitmen pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan Polair, Polisi dan Lantamal, yang harus selalu diberi ruang supaya bisa berkolaborasi. Namun semua itu tidak akan berguna jika pengambil kebijakan, seperti bupati, walikota dan gubernur, justru tidak punya kepedulian.

Deasy Ariani, staf bidang pengawasan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi Sulsel menyampaikan tantangan dalam melakukan pengawasan terkait keterbatasan personel dan perlengkapan untuk patroli. Untuk personel hanya terdapat 26 pengawas perikanan dan 3 PPNS perikanan yang menangani 24 wilayah kelautan seluruh Sulsel.

“Kami membina pokmaswas, lalu ada 7 cabang dinas, semuanya melakukan pengawasan dan pelaporan, kewenangan hanya sampai di situ. Bila terjadi pelanggaran akan dilimpahkan ke pihak berwenang. Kami butuh unit reaksi cepat untuk menanggapi laporan masyarakat. Tanpa hal ini maka patroli kurang efektif karena ketika ada pelaporan

maka tim akan lambat tiba di lokasi, di mana pelaku sudah keburu kabur.”

### **Mendorong Co-Management**

Yusran Nurdin Massa, sebagai fasilitator kegiatan, menyampaikan pentingnya peran kelembagaan ekonomi, tidak hanya dalam kaitannya dengan peran distribusi tetapi juga pada penguatan komunitas. “Mau tidak mau dibutuhkan peningkatan kapasitas nelayan ke pengembangan ekonomi dan ini perlu diintegrasikan ke peran-peran semua pihak di dalamnya. Dan identifikasi rantai pasar perlu dibumikan ke tingkat nelayan sehingga intervensinya bisa didorong kuat,” katanya.

Ia juga menyampaikan pentingnya sinergi dan kolaborasi mendorong perikanan berkelanjutan melalui *collaborative management* (*co-management*) atau pengelolaan bersama. “Dengan *co-management* maka semua pihak terlibat. Bagaimana swasta ada di situ, UPI (Unit Pengolahan Ikan), nelayan, NGO, pemerintah, dll., masuk dalam ruang itu. Hanya saja, kalau sekedar bertemu tanpa adanya formalistik dan ruang-ruang interaksi secara legal yang bisa diakomodasi oleh kebijakan dan regulasi yang ada, maka itu juga sulit untuk operasionalisasi.”

Ruang interaksi ini, lanjut Yusran, bisa memanfaatkan insititusi Komite Perikanan Berkelanjutan yang sudah ada, yang bisa menjadi ruang untuk menggelorakan semangat perjuangan perikanan berkelanjutan dalam konteks bersama.

“Harapannya, dengan begitu Sulsel punya *road map* perikanan berkelanjutan sehingga jelas apa yang dituju. Ujungnya pasti masyarakat sejahtera, pesisir dan laut lestari. Bagaimana itu tercapai sudah digerakkan oleh sistem ekonomi dunia, bagaimana unit-unit perikanan diperbaiki tata kelolanya agar laut lestari dan secara ekonomi juga menguatkan nelayan.”

*Wahyu Chandra - 2 November 2022*



## Buka-Tutup Kawasan Tangkap Gurita di Makassar Sukses. Bagaimana Keberlanjutannya?

Upaya buka-tutup sementara perairan kawasan penangkapan yang dilaksanakan oleh nelayan gurita di Pulau Langkai dan Lanjukang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Terumbu karang semakin membaik, yang kemudian berdampak pada meningkatnya hasil tangkapan ikan dan gurita di wilayah tersebut.

“Ini sudah tiga kali dilakukan dan selalu meningkat hasilnya setelah dilakukan buka-tutup, yang berarti program ini berjalan baik sesuai harapan bersama. Kami berharap program ini bisa tetap dilanjutkan,” ungkap Erwin, nelayan dari Pulau Langkai, pada talkshow yang diselenggarakan, di Makassar, Rabu (16/8/2023). Buka-tutup kawasan untuk perikanan kecil gurita ini adalah bagian dari program penguatan ekonomi dan konservasi gurita berbasis masyarakat (PROTEKSI GAMA).

Menurut Erwin meski berjalan dengan baik, namun tetap saja terdapat kendala di lapangan, misalnya perbedaan pendapat antarnelayan tentang lokasi dan luasan wilayah buka-tutup, serta keberadaan penyelam malam dari daerah lain, yang susah dikontrol aktivitasnya dan tak terjangkau pengawasan.

### **Pulihnya Ekosistem Terumbu Karang**

Menurut Nirwan Dessibali, Direktur Eksekutif YKL Indonesia, salah satu dampak pelaksanaan sistem buka-tutup ini adalah terjadinya pemulihan ekosistem terumbu karang dengan tutupan 5-10% karang hidup. “Secara ekonomi juga berdampak pada harga jual gurita yang lebih baik karena gurita hasil tangkapan jauh lebih besar,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, program ini juga mengurangi ancaman enam spesies yang terancam punah secara global, yaitu hiu paus (*Rhincodon typus*), hiu tikus (*Alopias sp.*), hiu mako sirip pendek (*Isurus oxyrinchus*), hiu karang

## MENGGURITA DI PULAU

blacktip (*Carcharhinus sp.*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan penyu hijau (*Chelonia mydas*).

Dampak lebih jauh, masyarakat melindungi 375,28 hektar perairan laut, peningkatan kapasitas melibatkan 113 masyarakat atau nelayan, lalu terdapat 31 orang *champion* mampu menerapkan penangkapan yang berkelanjutan. Capaian lainnya adalah melahirkan inisiatif bagi dua nelayan melakukan upaya konservasi dua spesies penyu, fasilitasi 68 e-Kusuka, tujuh KUB, dua pokmaswas, dua poklahsar dan satu kompak.

Program ini juga dinilai memberi sejumlah pembelajaran, seperti terbangunnya kesadaran nelayan akan perikanan keberlanjutan di mana mereka kemudian mampu membuat kesepakatan lokal terkait lokasi dan waktu penangkapan gurita. “Dengan adanya sistem buka-tutup ini, membuat gurita dan ikan kakap-kerapu semakin banyak dan memberikan proses pemulihan bagi ekosistem, menekan tingkat eksploitasi dan ancaman *destructive fishing*.”



*Talkshow yang diselenggarakan oleh Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia, di Hotel Aston Makassar, Rabu (16/8/2023), dihadiri berbagai pihak membahas keberlanjutan program. Foto: YKL Indonesia.*

Tidak hanya itu, sistem buka-tutup telah memberikan pemahaman dan pengalaman kepada nelayan bahwa ada kaitan musim penangkapan dengan lokasi yang ditutup, termasuk masa bertelur dan perkembangan gurita

“Tak kalah pentingnya, upaya peningkatan kapasitas mengenai biota penting dan terancam punah melahirkan inisiatif konservasi penyu, identifikasi dan penanganan tangkapan sampingan.”

Program ini juga memiliki tantangan tersendiri. Seperti lokasi *fishing ground* juga merupakan wilayah prioritas bagi banyak nelayan pulau lain, sehingga terlalu banyak nelayan yang memanfaatkan sumberdaya di area yang telah dikelola masyarakat Langkai dan Lanjukang.

Selain itu, beberapa nelayan dari pulau lain melakukan penangkapan di area buka-tutup saat ditutup sementara waktu.

“Terkait pengawasan, sulit dilakukan pada wilayah sistem buka tutup, sehingga terjadi beberapa kali pelanggaran dilakukan oleh berbagai nelayan,” kata Erwin.

Tantangan lain mengenai kesepakatan masyarakat belum kuat secara regulasi. Hal ini cukup berbeda dengan *best practice* dari tempat lain yang menjadikan desa dan adat sebagai cara untuk penguatan regulasi di tingkat lokal.

### **Harapan Keberlanjutan**

Program Proteksi Gama akan segera berakhir pada bulan Oktober 2023 mendatang, sehingga timbul pertanyaan bagaimana keberlanjutan program buka-tutup ini tanpa adanya pendampingan.

Menurut Dr. Muhammad Rijal Idrus, ahli kelautan dari Unhas, tantangan terbesar dari sejumlah program konservasi memang pada keberlanjutan program. Dalam banyak kasus, ketika sebuah program selesai, semangat masyarakatnya pun turun karena manfaat program selesai dan ketiadaan anggaran.

Salah satu kunci keberlanjutan program adalah dengan memasukkan prinsip-prinsip ekonomi ke dalam aspek itu. “Harus ada yang mewarisi hubungan yang baik antara nelayan dengan aspek pengelolaan gurita ini, salah satu yang menerima *benefit*-nya adalah teman-teman pengusaha.”

Bagi Rijal, tanpa adanya pendekatan ekonomi maka dengan cepat sebuah inisiatif akan hambar dan tak ada motivasi untuk melanjutkan, pada akhirnya akan mati secara cepat.

Permana Yudiarso, Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, melihat pentingnya kolaborasi untuk mendukung upaya buka-tutup kawasan sebagai bagian dari konservasi. “Kolaborasi ini harus diperkuat. Kami jujur dari unit kami tidak cukup bisa memberikan solusi, tapi kami coba komunikasikan dengan rekan kami di Kementerian Kelautan supaya perikanan gurita di Pulau Langkai dan Lanjukang ini bisa direplikasi di lokasi lain, baik tata kelola maupun cara penangkapannya.”

Yudiarso mengkhawatirkan isu *legality*, *traceability* dan *sustainability*, jika tak diatur secara ketat oleh pembeli global, maka eksportir akan terganggu. Dicontohkan ketika komoditas ini dikaitkan dengan CITES, maka akan pembatasan seperti halnya pada komoditas teripang, napoleon, hiu dan pari.

“Kita jaga sama-sama agar sumber daya ini, gurita dan lainnya bisa tetap ada dan bermanfaat kepada masyarakat. Kami siap membantu.”

Dari pihak nelayan sendiri berharap akan adanya penguatan kelompok yang dilakukan pemerintah, termasuk dukungan aparat kepolisian dalam rangka pengawasan.

“Jika kami melanjutkan program ini diharapkan dukungan pemerintah dari segi regulasi dan pengawasan agar program ini tidak berakhir sia-sia. Kalau upaya ini dilakukan oleh nelayan saja maka tidak akan kuat. Harus ada dukungan yang kuat di belakangnya, seperti pemerintah dan aparat,” kata Erwin.





## Keempat kalinya, Nelayan Pulau Langkai dan Lanjukang Tutup Sementara Lokasi Penangkapan Gurita

Nelayan Pulau Langkai dan Lanjukang, Kota Makassar kembali melakukan penutupan sementara lokasi penangkapan gurita selama 3 bulan dimulai 16 September sampai 17 Desember 2023.

Kesepakatan bersama nelayan dan berbagai pihak ini merupakan yang keempat kalinya. Penutupan sementara secara resmi dimulai dengan pemasangan penanda berupa pelampung dengan bendera serta papan informasi terkait penutupan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Ilyas, Sabtu (16/9/2023).

Ilyas menyampaikan, kegiatan ini sangat penting guna menjaga keberlanjutan perikanan, khususnya gurita, tidak hanya akan dinikmati sekarang, namun juga untuk anak dan cucu di masa yang akan datang.

“Kalau laut kita tidak dijaga, 10 atau 20 tahun mendatang anak cucu kita akan mencari ikan di mana, akan semakin jauh, seperti yang terjadi di banyak pulau,” ungkap Ilyas.

Ilyas menilai apa yang dilakukan nelayan Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang ini perlu dicontoh oleh nelayan di pulau lain, sehingga meskipun program ini akan segera berakhir, akan dilanjutkan oleh DKP provinsi.

Buka-tutup sementara ini juga dinilai sejalan dengan program Penjabat Gubernur Sulsel yang baru terkait ketahanan pangan, sehingga harus didukung penuh, tidak hanya di Pulau Langkai dan Lanjukang, namun juga di lokasi-lokasi lain. “Ini harus diperluas jangkauan di lokasi lain, nanti kami di DKP yang akan lanjutkan,” katanya.

Buka tutup kawasan untuk perikanan kecil gurita ini adalah bagian dari program penguatan ekonomi dan konservasi gurita berbasis masyarakat (Proteksi Gama).



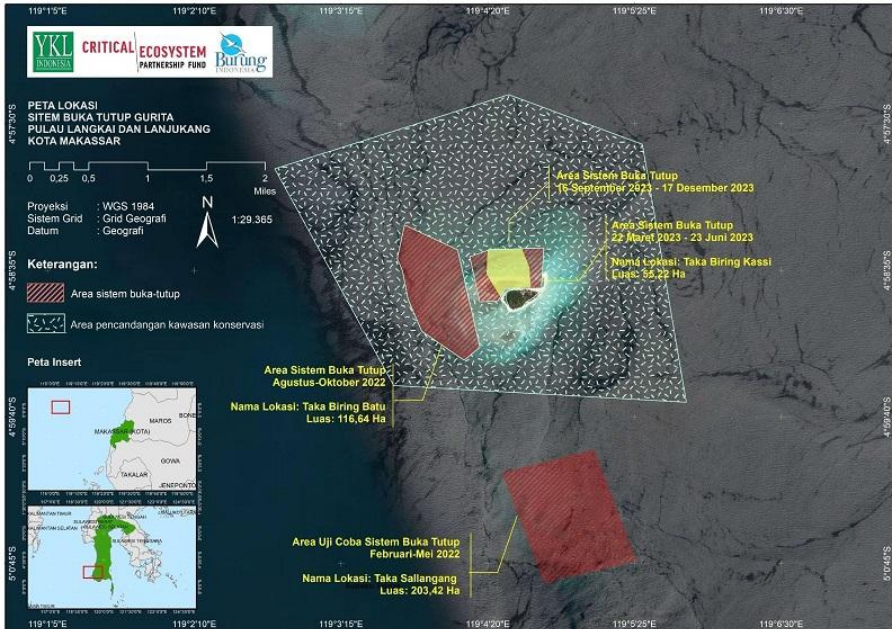
*Penandatanganan kesepakatan bersama untuk penutupan sementara lokasi buka tutup gurita. Foto: YKL Indonesia.*

Tokoh masyarakat Pulau Lanjukang, Jala mengapresiasi dukungan pemerintah Sulsel yang berkomitmen untuk melanjutkan serta memperluas di wilayah lain sistem buka tutup.

“Kami kembali bersepakat untuk menutup karena sebelumnya hasilnya sangat baik. Wilayah yang ditutup sekarang sekitar 30 hektar di perairan taka biring batu Pulau Lanjukang,” kata Jala.

Menurut Jala, pada saat pembukaan lokasi buka tutup yang ketiga, hasil tangkapan nelayan gurita meningkat dan ukurannya besar. Selama sepekan, rata-rata penjualan gurita satu orang nelayan dalam sehari mencapai 300 sampai 500 ribu.

“Bukan hanya meningkat pendapatan, tapi terumbu karang juga semakin baik, semakin banyak penyu di laut dan datang bertelur di pulau,” ujar Jala.



*Peta Lokasi Sistem Buka Tutup Pulau Langkai dan Lanjukang Kota Makassar.*

Sementara Erwin, salah satu nelayan Pulau Langkai, menyampaikan seluruh kegiatan penangkapan dilarang pada area buka tutup selama 3 bulan, kecuali pemancing dengan kapal yang terus bergerak. “Hanya saja tantangan kami adalah adanya nelayan dari luar yang datang beraktivitas di lokasi buka-tutup dan seringkali datang di malam hari, sehingga sulit untuk diawasi,” katanya.

Menurut Nirwan Dessibali, Direktur YKL Indonesia, salah satu dampak pelaksanaan sistem buka-tutup ini adalah terjadinya pemulihan ekosistem terumbu karang dengan meningkatnya tutupan 5-10% karang hidup. “Sistem buka tutup menekan ancaman aktivitas penangkapan menggunakan bom, bius dan eksploitasi berlebih. Hal ini membuat ekosistem pulih dan mengurangi ancaman spesies yang terancam punah,” ungkapnya.

Nirwan menyampaikan, wilayah yang ditutup sementara hanya sebagian kecil dari area tangkapan. Sehingga nelayan tetap bisa melakukan penangkapan gurita ataupun jenis lainnya diluar area penutupan.

## MENGGURITA DI PULAU

Dalam penutupan ini turut hadir perwakilan BPSPL Makassar, CDK Mamminasata, Dinas Perikanan Kota Makassar, Lurah Barrang Caddi, Penyuluh Perikanan, Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Para pihak bersama dengan masyarakat menandatangani kesepakatan bersama penutupan sementara.



*Foto Bersama dengan Masyarakat di Pulau Lankang. Foto: YKL Indonesia.*



*Foto Bersama dengan Masyarakat di Pulau Langkai. Foto: YKL Indonesia.*

## Sosialisasi di Pulau Lain dan Patroli Bersama

Menanggapi keluhan terkait nelayan lain, Ilyas berjanji akan membantu masyarakat dalam melakukan sosialisasi melibatkan masyarakat nelayan di pulau lain sekitar. “Nanti kita undang lurah dan para Pokmaswas berkumpul untuk komunikasikan hal ini, supaya mereka tahu kapan pembatasan dilakukan, kapan boleh menangkap dan alat tangkap apa yang boleh digunakan,” kata Ilyas.

Setelah sosialisasi, lanjutnya, akan dilakukan patroli bersama dan penindakan bagi nelayan-nelayan yang beraktivitas di lokasi yang ditutup sementara tersebut, khususnya di waktu malam. “Nanti kita bisa lakukan patroli malam supaya ada efek mereka merasa diawasi. Jadi pendekatannya adalah sosialisasi dulu kemudian pengawasan, Nanti kami datang berkemah di sini, kita tunggu adakah yang datang malam-malam, bisa ditangkap, kan kita sudah sampaikan di sosialisasi,” tegas Ilyas.

Hary Rustam Tawainella, Kepala Bidang Pengawasan DKP Sulsel, menyatakan vitalnya fungsi kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dalam menjaga dan mengawasi laut, sehingga harus diperkuat dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

“Setiap pokmaswas itu kami bekali dengan sarana dan prasarana, ada seragam dan kamera. Fungsi pengawas itu ada tiga melihat, mendengar dan melaporkan dan tidak bisa melakukan penindakan. Jadi harus dilengkapi dengan alat komunikasi dan dokumentasi,” ujar Hary Rustam.

Alfonsius, dari Polisi Perairan (Polair) Polda Sulsel, menyatakan pentingnya pokmaswas dilengkapi juga dengan tanda pengenal khusus sehingga memiliki legitimasi yang kuat ketika menjalankan perannya mengawasi. “Nelayan itu kan bukan dari sini saja yang melaut, mungkin bagusya tim pengawas diberi id card agar bisa lebih didengar oleh nelayan lain, agar tidak malah jadi konflik ketika dipertanyakan otoritasnya,” kata Alfonsius.



*Pelepasan tukik penyu di Pulau Lanjukang. Foto: YKL Indonesia.*

### **Potensi Wisata Pulau**

Muhammad Jufri, Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Sulsel, menyatakan di kedua pulau ini, khususnya Pulau Lanjukang memiliki potensi pariwisata yang perlu dikembangkan, tidak hanya semata gurita. Apalagi di pulau ini terdapat inisiatif konservasi penyu yang dilakukan warga.

“Kita bisa bangun sistem pariwisata ke pulau, sebelum ke pulau wisatawan harus edukasi dulu, mereka harus donasi untuk penyu ini. Begitu turun dari kapal langsung ditawarkan donasi penyu itu, minimal 5 ekor lah,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, wisata kuliner juga bisa menjadi daya tarik tersendiri, apalagi dengan kondisi perairan pulau yang kaya ikan, di mana wisatawan bisa langsung menyantap ikan yang baru saja diambil dari laut,

“Pasti di sini banyak ikan dan orang kota suka makan ikan, ikan yang sekali mati. Kalau di kota itu kan ikan sudah lima kali mati. Di sini ikan masih sangat segar. Biarkan wisatawan sendiri yang bakar ikan, karena proses membakar itu sangat nikmat bagi orang kota,” ujarnya.

*Nirwan Dessibali – 16 September 2023*



## Patroli Bersama Lindungi Perairan Pulau Langkai – Lanjukang dari *Destructive Fishing*

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mendukung kegiatan buka-tutup sementara kawasan tangkap gurita, yang dilaksanakan oleh nelayan di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang, Makassar.

Kegiatan buka-tutup sementara ini dinilai sangat penting guna menjaga keberlanjutan perikanan, khususnya gurita, tidak hanya akan dinikmati sekarang, namun juga untuk anak dan cucu di masa yang akan datang.

Bentuk dukungan ditunjukkan dengan diadakannya patroli bersama yang diikuti oleh sejumlah pihak di perairan Pulau Langkai dan Lanjukang Kota Makassar pada Sabtu (16/9/2023) silam.

Dalam kunjungan ke kedua pulau ini, Muhammad Ilyas, Kepala DKP Sulsel, selain berdiskusi dengan nelayan, juga berkesempatan melakukan pemasangan tapal batas wilayah buka-tutup secara simbolik, serta pelepasan 50 ekor tukik. Ilyas juga berjanji untuk membantu perbaikan infrastruktur, seperti dermaga dan tambatan perahu yang sangat dibutuhkan nelayan.

Patroli bersama ini dilakukan atas inisiasi DKP Sulsel bersama Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia. Selain melibatkan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas), turut hadir dalam patroli ini adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel, Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Sulsel, Polair Sulsel, Polsek Kepulauan Sangkarrang Makassar, BPSPL Sulawesi, Dinas Perikanan dan Pertanian Makassar, dan sejumlah pihak lainnya.

“Kalau laut tidak kita jaga, 10 atau 20 tahun mendatang anak cucu kita akan mencari ikan di mana, akan semakin jauh, seperti yang terjadi Barrang Lompo,” ungkap Ilyas.

Buka-tutup kawasan untuk perikanan kecil gurita ini adalah bagian dari program penguatan ekonomi dan konservasi gurita berbasis masyarakat (PROTEKSI GAMA). Ilyas menilai apa yang dilakukan nelayan Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang ini perlu dicontoh oleh nelayan di pulau lain, sehingga meskipun program ini akan segera berakhir, akan dilanjutkan oleh DKP Sulsel.

Buka-tutup sementara ini juga dinilai sejalan dengan program Penjabat Gubernur Sulsel yang baru terkait ketahanan pangan, sehingga harus didukung penuh, tidak hanya di Pulau Langkai dan Lanjukang, namun juga di lokasi-lokasi lain. "Ini harus diperluas jangkauan di lokasi lain, nanti kami di DKP yang akan lanjutkan," katanya.

Menurut Erwin, salah satu nelayan Pulau Langkai, kegiatan buka-tutup ini telah dilakukan keempat kalinya. Hasilnya selama ini terjadi peningkatan gurita dan perbaikan terumbu karang.

"Hanya saja tantangan kami adalah adanya nelayan dari luar yang datang beraktivitas di lokasi buka-tutup dan seringkali datang di malam hari, sehingga sulit untuk diawasi," katanya.

Buka-tutup ini sendiri hanya untuk perikanan gurita dan di wilayah terumbu karang. Nelayan lain tetap bisa melintas namun tidak diperkenankan beraktivitas selama tiga bulan, apalagi menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Menanggapi keluhan ini, Ilyas berjanji akan membantu masyarakat dalam melakukan sosialisasi melibatkan masyarakat nelayan di pulau lain sekitar.

"Nanti kita undang lurah dan para pokmaswas berkumpul untuk komunikasikan hal ini, supaya mereka tahu kapan pembatasan dilakukan, kapan boleh menangkap dan alat tangkap apa yang boleh digunakan."



*Patroli bersama ini dilakukan atas inisiasi DKP Sulsel bersama Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia. Selain melibatkan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas), juga melibatkan stakeholder lain yang terkait. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*

Setelah sosialisasi, lanjutnya, akan dilakukan patroli bersama dan penindakan bagi nelayan-nelayan yang beraktivitas di lokasi yang ditutup sementara tersebut, khususnya di waktu malam.

Muhammad Fauzi Rafiq, Koordinator Pemberdayaan & Advokasi YKL Indonesia, menyatakan pentingnya dilakukan patroli secara rutin di wilayah Pulau Langkai dan Lanjukang mengingat besarnya potensi sumberdaya lautnya namun di sisi lain masih marak aktivitas *destructive fishing* di sekitar pulau.

“Untuk pokmaswas sendiri setiap bulannya melakukan patroli rutin dengan melakukan pengawasan sekitar pulau. Mereka melihat, mencatat dan melaporkan apa saja yang terjadi di sekitar pulau terutama di wilayah yang dilakukan buka-tutup sementara,” katanya.

Hal ini dilakukan untuk menjaga sumber daya laut serta upaya memaksimalkan hasil dalam program buka-tutup. “Menurut beberapa nelayan program buka-tutup sementara wilayah tangkap gurita akan

## MENGGURITA DI PULAU

maksimal hasilnya hanya jika ada pengawasan yang kuat. Ini akan mengurangi aktivitas *destructive fishing* yang masih sering terjadi.”

Di samping itu, lanjutnya, patroli bersama akan berdampak besar bagi semangat masyarakat dan di sisi lain akan memberikan efek jera kepada pelaku *destructive fishing*.



*Pelepasan 50 ekor tukik hasil konservasi pegiat konservasi penyu di Pulau Lanjukang. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*

Hary Rustam Tawainella, Kepala Bidang Pengawasan DKP Sulsel, menyatakan vitalnya fungsi pokmaswas dalam menjaga dan mengawasi laut, sehingga harus diperkuat dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

“Setiap pokmaswas itu kami bekali dengan sarana dan prasarana, ada seragam dan kamera. Fungsi pengawas itu ada tiga melihat, mendengar dan melaporkan dan tidak bisa melakukan penindakan. Jadi harus dilengkapi dengan alat komunikasi dan dokumentasi.”

Alfons, aparat polisi perairan (Polair) Sulsel, menyatakan pentingnya pokmaswas dilengkapi juga dengan tanda pengenal khusus sehingga memiliki legitimasi yang kuat ketika menjalankan perannya mengawasi.

“Nelayan itu kan bukan dari sini saja yang melaut, mungkin bagusnya tim pengawas diberi id card agar bisa lebih didengar oleh nelayan lain, agar tidak malah jadi konflik ketika dipertanyakan otoritasnya.”

Muhammad Jufri, Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Sulsel, menyatakan di kedua pulau ini, khususnya Pulau Lanjukang memiliki potensi pariwisata yang perlu dikembangkan, tidak hanya semata gurita. Apalagi di pulau ini terdapat inisiatif konservasi penyu yang dilakukan warga.

“Kita bisa bangun sistem pariwisata ke pulau, sebelum ke pulau wisatawan harus edukasi dulu, mereka harus donasi untuk penyu ini. Begitu turun dari kapal langsung ditawarkan donasi penyu itu, minimal 5 ekor lah,” katanya.

*Wahyu Chandra - 2 Oktober 2023*



## Mendorong Keberlanjutan Sistem Buka-Tutup Gurita di Pulau Lanjukang dan Pulau Langkai

Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia telah berkomitmen menginisiasi sebuah upaya pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan. Tepatnya di Pulau Lanjukang dan Pulau Langkai, Makassar yang telah berlangsung selama 2,5 tahun dengan Program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat (PROTEKSI GAMA).

Gurita menjadi komoditi yang dipilih oleh YKL Indonesia lantaran pemanfaatan sumberdaya perikanan oleh nelayan skala kecil di Kepulauan Spermonde sendiri telah dilakukan sejak lama. Gurita juga telah menjadi salah satu sumber daya ikan yang memiliki potensi besar dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nelayan.

Volume ekspor gurita di Sulawesi Selatan sendiri selama pada tahun 2017 dalam rentang Januari sampai September mencapai 1.720 ton. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 899,7 ton.

Dari pendataan yang dilakukan oleh YKL Indonesia dari rentang Juli 2021 hingga September 2023 mencapai 24.293,08 kg. Berat tangkapannya sendiri rata-rata 0,5-18,6 kg. Adapun jika rupiahkan, totalnya 1,4 miliar rupiah lebih, tepatnya Rp. 1.421.780.480. Hingga saat ini, terdapat 4 lokasi penutupan gurita yang diterapkan oleh nelayan.

Alief Fachrul Raazy, Program Manajer YKL Indonesia menjelaskan kegiatan ini berjalan dengan pelibatan aktif masyarakat di Pulau Lanjukang dan Pulau Langkai. Selain itu tata kelola sistem buka-tutup juga melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mendukung upaya nelayan menjaga sumber daya lautnya secara berkelanjutan. "Untuk tata kelola sendiri, kami mendukung upaya inisiatif masyarakat untuk tata kelola di wilayahnya. Perlu adanya kesepahaman bahwa tata kelola ini berbasis masyarakat dan tentunya seluruh pihak bisa

mendukung ini,” ujarnya dalam Seminar Jaga Laut, Jaga Kehidupan: Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Wilayah Laut Berbasis Masyarakat pada Rabu, 25 Oktober 2023. “Melibatkan seluruh elemen masyarakat di Pulau Lanjukang dan Pulau Langkai. YKL Indonesia tdk hanya memfasilitasi saja, juga akademisi diajak untuk memberikan gambaran gurita ke nelayan,” tambahnya.

### **Tantangan Konservasi**

Rijal Idrus, akademisi Universitas Hasanuddin menjelaskan jika apa yang dilakukan dalam program YKL Indonesia di Pulau Lanjukang dan Pulau Langkai sebagai bagian dari konservasi. Ia menyebut jika konservasi itu konservasi itu merupakan upaya melindungi sekaligus memanfaatkan. “Konservasi hadir agar dapat menimbangkan pemanfaatan dan perlindungan stok. Ide dari kawasan konservasi itu stok akan tumbuh dengan subur dan akhirnya sangat padat. Di wilayah yang tidak diproteksi orang bisa memanfaatkan,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat 3 strategi tata untuk memproteksi yakni membatasi output dengan memberikan jatah berapa yang dapat ditangkap. Lalu membatasi alat seperti tidak menggunakan alat skala besar. Terakhir dengan mengatur akses melalui sistem buka-tutup. “Manfaat yang tidak nyata menjadi tantangan utamanya untuk meyakinkan masyarakat. Kualitas lingkungan sangat tergantung dari kedisiplinan masyarakat dalam melakukan konservasi laut,” jelas Rijal Idrus, yang merupakan ahli konservasi sumber daya hayati laut.

Pada seminar tersebut, Alief juga menyampaikan perlunya riset lebih lanjut untuk semakin memperkuat upaya yang telah dikerjakan oleh nelayan di Pulau Lanjukang dan Pulau Langkai. Menurutnya, riset lanjutan perlu dilakukan untuk memastikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari sistem buka-tutup gurita yang diterapkan.

“Ada beberapa yang perlu diperkuat, bagaimana melibatkan dan mendorong aktivitas riset dari segi ekologi, sosial dan ekonomi yang menunjang tata kelola perikanan secara berkelanjutan. Melibatkan dan mendorong aktif aktivitas riset dari segi kebijakan,” ujarnya.

## Apresiasi PROTEKSI GAMA

Sistem buka-tutup gurita yang telah berjalan mendapat apresiasi dari Burung Indonesia. Jihad, Program Officer untuk wilayah Sulsel-Sultra Program Wallacea menjelaskan jika apa yang telah dilakukan oleh YKL Indonesia bersama para nelayan dapat menjadi contoh yang dapat diterapkan di tempat lain. “Capaian yang dicapai YKL Indonesia salah satu yang baik. Kami berharap dampaknya bisa menjadi model yang dapat direplikasi di tempat-tempat lainnya. Salah satu best practice dan dapat diadopsi dari berbagai pihak,” ujarnya.

Ia juga terus mendorong masyarakat agar tetap mempertahankan apa yang telah dilakukan serta mengajak berbagai pihak untuk mendukung upaya nelayan dalam sistem buka-tutup yang telah dilakukan. “Kami percaya kegiatan tidak bisa lepas dari masyarakat tapak. Penting juga bagaimana melibatkan private sektor dalam tata kelola pesisir dan laut,” terangnya.

Apresiasi juga datang dari salah satu nelayan Pulau Lanjukang. Jala, yang sebagai Ketua Pokmaswas di Pulau Lanjukang mengungkapkan jika dengan adanya program ini berdampak terhadap hasil tangkapan gurita yang lebih baik. “Gurita bertambah nilai timbangannya, manfaat tentang gurita banyak daripada sebelumnya,” ujarnya.

Bukan hanya terkait gurita saja yang didapatkan oleh nelayan, melainkan juga menurutnya adalah pengetahuan terkait dengan terumbu karang dan cara melindungi biota laut. “Kami mendapatkan banyak pembelajaran tentang karang, aktivitas kami mengurangi melakukan bom dan bus,“ tambahnya.

Perlindungan biota laut juga sejalan dengan capaian yang diharapkan oleh YKL Indonesia melalui program ini. Terlindunginya ekosistem terumbu karang, termasuk terlindunginya biota laut penting lainnya di wilayah Kepulauan Spermonde khususnya di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang.

*Nirwan Dessibali – 25 Oktober 2023*

# BERDANSA DENGAN LAUT



## **“Berdansa dengan Laut”, Cerita Keberhasilan Konservasi di Pulau Langkai dan Lanjukang Makassar**

Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia merilis tiga film pembelajaran terkait konservasi melalui program yang disebut Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat (Proteksi Gama) di Pulau Langkai dan Lanjukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiga film ini diharapkan bisa menjadi model pembelajaran terkait program konservasi berbasis masyarakat di daerah lain.

“Kami berharap ketiga film ini bisa menjadi media pembelajaran bagi lembaga lain, pemerintah daerah dan komunitas nelayan yang mau melakukan inisiatif yang sama di daerahnya masing-masing,” ungkap Alief Fachrul Raazy, Program Manager YKL Indonesia untuk Proteksi Gama, di Makassar, Senin (20/11/2023).

Film yang berjudul “Berdansa dengan Laut” ini terdiri dari tiga film yang terpisah, dengan total waktu tonton 19,44 menit, yang bisa ditonton di Youtube YKL Indonesia.

Film pertama bercerita tentang pelaksanaan program Proteksi Gama secara umum dengan aktivitas utama berupa buka-tutup kawasan selama tiga bulan di beberapa lokasi.

Film kedua terkait pelaksanaan pengawasan yang dilakukan masyarakat serta pemerintah dan ketiga terkait kegiatan lain yang dilakukan YKL Indonesia selama dilaksanakannya program, seperti pemberdayaan perempuan, pendidikan anak-anak pulau serta konservasi penyu.

“Kisah bagaimana kami berprogram, proses dan interaksi dengan nelayan, serta bagaimana antusiasme nelayan menyambut program ini, termasuk dukungan berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan dinas, terangkum dalam film ringkas ini,” jelas Alief.

### Kisah Sukses Program Proteksi Gama

Proteksi Gama ini sendiri dinilai sukses oleh sejumlah pihak, sehingga perlu disebarluaskan. Selama dua tahun berjalan telah dilakukan upaya buka-tutup sebanyak empat kali dengan luas kawasan konservasi sekitar 375 hektar. Kawasan ini sendiri rencananya akan diintegrasikan ke dalam pencadangan kawasan konservasi daerah dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel.

“Melalui sistem buka-tutup ini memberikan perlindungan terhadap terumbu karang yang ada di sini dan tentunya juga spesies-spesies yang dilindungi secara global. Dan ini adalah pintu masuk bagi perlindungan seperti itu,” jelas Alief.

Bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kelurahan Barrang Caddi menilai kehadiran program Proteksi Gama memberi hal yang positif bagi nelayan dan perbaikan ekosistem pesisir dan laut.

“Dengan adanya buka-tutup ini akan sedikit membantu masyarakat bagaimana menjaga ekosistem. Kedua menjaga hasil tangkapannya sehingga bisa terprogram. Tadinya memang nelayan dapat tangkapan tapi tidak banyak. (Setelah diadakan buka-tutup) nelayan dapat gurita yang lebih besar,” ungkap Hamzah, Lurah Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Hamzah berharap upaya konservasi berbasis masyarakat ini tetap dilanjutkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat atau lembaga lain karena dinilai telah menurunkan aktivitas *destructive fishing* yang dulunya banyak ditemukan di sekitar perairan kedua pulau.

“Sejak mengenal alat tangkap bius tahun 1989, banyak kegiatan-kegiatan nelayan Kelurahan Barrang Caddi khususnya Pulau Langkai yang dilakukan dengan melakukan penangkapan ikan dengan tidak ramah lingkungan,” katanya.

Erwin, salah seorang nelayan di Pulau Langkai mengakui mendapat banyak pembelajaran penting dari kehadiran program ini, termasuk bagaimana memahami karakteristik gurita, dan pentingnya menjaga

keberlanjutan dengan tidak menangkap gurita seenaknya, tanpa memperhatikan ukuran.

“Dulunya kita menangkap itu asal tangkap saja, tidak memandang ini grade B, C, D, yang penting kita bisa menghasilkan uang. Tidak teratur ceritanya, biar grade D, kita ambil, grade E yang bisa menghasilkan. Semenjak berkurangnya gurita kita itu mencari istilahnya membabi buta,” katanya.



*Penandatanganan kesepakatan bersama parapihak untuk mendukung pelaksanaan buka-tutup di perairan Pulau Langkai-Lanjukang selama tiga bulan. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*

Program ini kemudian membantu nelayan serta memberi penyadaran bagaimana supaya gurita bisa tetap ada, tidak hanya dengan seleksi dalam menangkap tetapi juga menjaga terumbu karang yang merupakan rumah bagi gurita.

Apresiasi yang sama dinyatakan oleh Kepala DKP Sulsel, Muhammad Ilyas. “Saya kira dengan program buka-tutup itu adalah salah satu upaya

untuk menjadikan program konservasi sumber daya perikanan di sekitar Selat Makassar atau terutama di pulau-pulau yang termasuk di wilayah Kota Makassar, ini menjadi upaya untuk menjaga stabilitas dari keberadaan ikan kita,” katanya.

Menurut Ilyas, dengan program buka-tutup itu menunjukkan bahwa bagaimana mengantisipasi sumberdaya ikan sendiri yang terbatas dalam menjaga reproduksi, yang disebut *environmental capacity*, sesuatu yang perlu terus dijaga.

“Ini saya kira adalah sebuah upaya yang sangat strategis dengan biaya murah karena kita berupaya mengubah *mindset* mereka bahwa dengan program ini bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak karena ikan ditangkap adalah ikan-ikan yang berkualitas dan cukup besar. Ikan atau biota tersebut bernilai dan mereka secara berkelanjutan melakukan penangkapan di saat dibuka kembali,” jelasnya.

Ilyas sendiri telah menunjukkan dukungannya atas program ini dengan mengikuti salah satu kegiatan patroli bersama pada pertengahan September 2023 silam. “Saya harus hadir di sana untuk menunjukkan dukungan kepada masyarakat tentang bagaimana program buka-tutup ini sebagai suatu upaya konservasi sumber daya kelautan dan perikanan kita yang harus kita apa namanya tiru di tempat lain. Kita menjadi kisah *success story* dan ini bisa dikembangkan di tempat-tempat lain.”

Bahkan, lanjut Ilyas, dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum, DKP Sulsel telah mendapat mandat dari pejabat gubernur untuk membentuk Satuan Tugas Jaga Laut, yang dinamai Forum Penjaga Sumber daya Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulsel, yang akan segera *launching* melibatkan seluruh *stakeholder* terkait. Tim satgas ini akan dibentuk hingga ke level desa.

“Ini luar biasa konsepnya dan mungkin kita tinggal bersama-sama mengimplementasikan bagaimana ke depan tentu dengan bekerja secara pentahelix itu. Ini yang akan kita lakukan ke depan,” pungkasnya.

Wahyu Chandra - 26 Nov 2023



*Gurita telah menjadi komoditas unggulan di Pulau Langkai dan Lanjukang sehingga kemudian menimbulkan overfishing. Inilah yang kemudian mendorong dilaksanakannya konservasi melalui kegiatan buka-tutup sementara untuk penangkapan gurita di kawasan ini. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*



## Dari Pulau ke Kampus: Kisah Konservasi Laut Berbasis Masyarakat di Langkai dan Lanjukang

Hari itu, Selasa siang 21 Mei 2024 yang cerah di Makassar. Di lantai tiga Kampus ITBM Balik Diwa, tepatnya di Ruang Koran, puluhan pasang mata menanti. Para mahasiswa dan dosen berkumpul, bukan untuk mendengarkan teori semata, tetapi untuk menyimak kisah nyata dari lapangan—kisah tentang laut, tentang komunitas nelayan, dan tentang harapan yang lahir dari kolaborasi.

Di hadapan mereka, berdiri Nirwan Dessibali, Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia. Dengan suara tenang tapi penuh semangat, Nirwan tidak hanya menyampaikan materi kuliah umum bertema “Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat”ia membawa seluruh ruangan menyelam ke dalam cerita yang begitu dekat dengan kehidupan pesisir Sulawesi.

Ia membuka dengan memperkenalkan YKL Indonesia, sebuah organisasi yang telah bertahun-tahun bekerja mendampingi masyarakat pesisir di kawasan Wallacea. Namun, hari itu ia ingin bercerita tentang satu inisiatif istimewa. Sebuah program yang bukan hanya tentang konservasi, tapi tentang martabat, keberdayaan, dan keberlanjutan.

Namanya PROTEKSI GAMA—Program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat. “Kami mulai di Pulau Langkai dan Lanjukang, dua pulau kecil di Makassar yang menyimpan potensi besar dalam perikanan gurita,” ujar Nirwan.

Program ini bukan datang sebagai intervensi dari luar, tapi tumbuh dari rasa percaya pada kekuatan lokal, sejak Mei 2021, PROTEKSI GAMA menjadi jawaban atas tantangan nelayan dalam memanfaatkan gurita secara berkelanjutan. Salah satu inovasinya adalah sistem buka-tutup area tangkap. Nelayan bersepakat: selama tiga bulan, mereka berhenti menangkap gurita di zona tertentu. “Bayangkan, keputusannya datang dari masyarakat sendiri. Dan hasilnya luar biasa. Saat area dibuka

## MENGGURITA DI PULAU

kembali, gurita-gurita yang ditangkap lebih besar, lebih banyak,” jelas Nirwan, disambut anggukan kagum peserta.

Namun, PROTEKSI GAMA tidak berhenti di laut. Program ini menyentuh daratan, menyentuh kehidupan perempuan. Kelompok ibu-ibu dilatih mengolah hasil laut—mereka membuat produk bernilai, menghidupkan dapur-dapur dengan semangat baru. Di sinilah konservasi menjadi nyata: ketika perempuan di pulau bisa merasa berdaya, ketika anak-anak mereka bisa sekolah lebih tenang.

Nirwan melanjutkan kisahnya dengan menyebut film dokumenter dan buku “Siasat dari Pulau” yang diterbitkan untuk mendokumentasikan perjalanan ini. “Bagi kami, cerita harus dibagikan. Agar model yang berhasil di pulau kecil bisa menjadi inspirasi bagi wilayah lain,” katanya.



*Rektor ITBM Balik Diwa, Dr. Muh. Ikramullah, S.Sos., M.Si saat membuka acara kuliah umum yang dibawakan Direktur Eksekutif YKL Indonesia, Nirwan Dessibali. Foto: YKL Indonesia.*

Acara itu bukan sekadar kuliah umum. Ia menjadi titik temu gagasan. Rektor ITBM Balik Diwa, Dr. Muh. Ikramullah, membuka acara dengan pesan kuat: bahwa kampus ini berdiri di atas kesadaran maritim, dan kuliah umum seperti ini adalah bagian dari misi besar ITBM.

“Kami sadar, dunia kini dihadapkan pada dua tantangan utama: pangan dan lingkungan. Dan untuk menghadapinya, kita tak bisa jalan sendiri,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—antara akademisi, pemerintah, masyarakat, dan organisasi seperti YKL Indonesia.

Di akhir sesi, suasana di Ruang Koral terasa hangat. Bukan karena cuaca, tapi karena semangat yang tumbuh di antara peserta. Para mahasiswa tidak hanya mendapat ilmu, mereka menyerap nilai: bahwa menjaga laut bukan tugas satu pihak saja. Bahwa konservasi tidak harus melawan ekonomi. Dan bahwa perubahan bisa lahir dari pulau-pulau kecil, asal dilakukan bersama.

*Nirwan Dessibali – 21 Mei 2024*



## Begini Cara Perempuan Nelayan Pulau Langkai Hadapi Perubahan Iklim

Nurjanah menunjukkan dengan bangga produk buatan kelompoknya berupa sambal gurita dan abon ikan kepada utusan Konjen Kedutaan Australia di Makassar beserta beberapa pejabat instansi dinas provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar.

“Ini dua produk hasil pekerjaan ibu rumah tangga di sini untuk membantu suami yang penghasilannya semakin kurang, apalagi dengan cuaca akhir-akhir ini yang tak menentu,” katanya, akhir Mei lalu.

Nurjanah adalah ketua kelompok Merpati Putih yang berdomisili di Pulau Langkai, Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kelompok yang memproduksi hasil laut berupa sambal gurita dan abon ikan ini, didirikan sejak setahun lalu, beranggotakan 10 orang. Produk mereka telah dikenal luas di sekitar pulau dan pulau-pulau tetangga, dan kadang dipasarkan di daratan Makassar. Kelompok lain di pulau ini adalah Cahaya Rembulan yang diketuai oleh Nirma.

Menurut Nurjanah, kehadiran kelompok ini sangat membantu para perempuan di Pulau Langkai yang sebagian besar suaminya bekerja sebagai nelayan. Dengan lokasi yang cukup jauh dari daratan, tak banyak pekerjaan yang bisa diusahakan selain sebagai nelayan. Adanya usaha sampingan yang dilakukan oleh istri-istri nelayan dianggap bisa membantu memenuhi kebutuhan keseharian mereka.

“Setelah setahun dibentuk hasilnya mulai kelihatan, sudah banyak produk terjual dan ibu-ibu juga termotivasi untuk berusaha, apalagi selama ini kami hanya di rumah saja tanpa kegiatan. Adanya kelompok bisa menambah penghasilan, sekaligus belajar pengelolaan keuangan rumah tangga,” katanya.

Menurut Nirwan Dessibali, Direktur Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia, pengolahan hasil laut di Pulau Langkai sangat penting

dilakukan karena produk perikanan nelayan khususnya gurita sangat fluktuatif. Apalagi dimasa musim puncak, harga menurun dengan biaya melaut hampir sebanding dengan hasil yang diperoleh.

“Peningkatan nilai produk perikanan yang dihasilkan perlu dilakukan melalui pengolahan pasca panen. Inilah yang kemudian dilakukan oleh dua kelompok olahan di Pulau Langkai ini,” katanya.

Meski kelompok olahan hasil laut ini telah dibentuk setahun lalu, namun baru-baru ini mereka juga mendapat dukungan Konsulat-Jenderal Australia di Makassar melalui program penguatan wirausaha perempuan Pulau Langkai dengan akronim Ewaki. Difasilitasi YKL Indonesia, dilakukan pelatihan dan pendampingan oleh ibu rumah tangga. Dua kelompok juga mendapat bantuan peralatan produksi.

Menurut Adi Zulkarnaen, fasilitator dalam program ini, program ini dirancang untuk membantu kelompok untuk meningkatkan keterampilan dalam mengolah hasil laut, khususnya gurita, serta mendukung mereka dalam produksi dan pemasaran produk mereka. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan, membantu mereka dalam manajemen keuangan sehari-hari dan dalam usaha mereka agar terhindar dari hutang di punggung.

Selain pelatihan dan legalisasi, program ini juga fokus pada memperluas jaringan akses ke berbagai pasar dan pihak terkait, termasuk pemerintah, untuk mendukung produk-produk yang dihasilkan. Program ini juga melibatkan strategi *branding* dengan menggandeng *influencer* dan iklan untuk meningkatkan jangkauan pasar.

Dijelaskan Adi tiga tujuan program ini, yaitu meningkatkan perekonomian rumah tangga melalui pelatihan dan pendampingan oleh ibu rumah tangga, peningkatan keterampilan ibu rumah tangga dalam melakukan pengelolaan hasil perikanan khususnya gurita, serta kemampuan dalam manajemen keuangan rumah tangga dan berkelompok.

Tujuan lainnya adalah melakukan penguatan legalisasi administrasi kelompok pengolah dan pemasar, membangun akses jaringan antara

kelompok perempuan langkai ke beberapa pasar dan stakeholder terkait dalam mendukung produk-produk yang dihasilkan, membangun *branding* produk untuk meningkatkan jangkauan pasar.

“Kami harapkan setiap ibu rumah tangga yang terlibat dapat mengangkat dan meningkatkan taraf hidup serta memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan hasil perikanan. Selain itu, setiap ibu rumah tangga yang terlibat memiliki kemampuan dan pemahaman terkait manajemen keuangan dalam berumah tangga dan berkelompok sehingga memiliki pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.”

Diharapkan juga kelompok pengolah dan pemasar yang terbentuk semakin kuat dan jangkauan pemasaran yang luas dengan kelengkapan administrasi seperti kartu pelaku utama sektor kelautan dan perikanan (Kusuka), NPWP, NIB dan PIRT.



*Konsulat-Jenderal Australia di Makassar memberi bantuan berupa peralatan produksi dan dukungan pemasaran kepada dua kelompok perempuan di Pulau Langkai. Setiap tahun Konjen Australia memberi dukungan pendanaan kepada komunitas di 12 provinsi di Indonesia bagian timur. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*

## **MENGGURITA DI PULAU**

Philippa Armstrong, Deputy Consul-General, Konsulat-Jenderal Australia di Makassar, mengatakan sangat senang melihat progres dari kelompok usaha yang dilakukan oleh perempuan Pulau Langkai.

“Hal-hal yang saya sangat senangi dari program ini adalah kelompok perempuan sangat diberdayakan dan terorganisir. Dan ini mengajarkan perempuan sesuatu, dan saya yakin program ini akan membantu komunitas di sini,” katanya.

Konjen Australia sendiri telah menerima 100 proposal tahun ini dan hanya 4 proposal yang kemudian dibiayai, termasuk program di Langkai. Area kerja konjen Australia mencakup 12 provinsi di Indonesia timur, yang berada di seluruh Sulawesi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Tengah, Papua dan Papua Barat Daya.

Muhammad Rheza, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, menyambut baik upaya yang dilakukan perempuan di Pulau Langkai dan berjanji akan memberikan dukungan berupa perbaikan kualitas kemasan dan pemasaran.

Pada kegiatan kunjungan ini juga dilakukan penyerahan kartu Kusuka kepada anggota kelompok. Beberapa perempuan merasa tak percaya dengan pemberian kartu ini karena menganggap hanya berlaku untuk nelayan laki-laki.

“Kartu ini bisa juga digunakan untuk istri nelayan anggota kelompok, bisa digunakan macam-macam, bahkan bisa untuk meminjam KUR dan beasiswa anak-anak dari SD hingga kuliah beberapa kampus, termasuk di Politeknik kelautan dan perikanan di Bone,” ungkap Asniwati, penyuluh perikanan Kelurahan Barrang Caddi, Makassar.

*Wahyu Chandra - 13 Jun 2024*





## Kuatkan Pasar dan Nilai Jual, Nelayan Langkai dan Lanjukang Kerjasama dengan 2 Perusahaan

Kelompok nelayan Pulau Langkai dan Lanjukang, Kota Makassar, resmi menjalin kerja sama dengan dua perusahaan pengolahan hasil perikanan guna mendapatkan jaminan harga serta memperkuat rantai pasok produk perikanan skala kecil.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan dalam kegiatan talkshow bertema “Penguatan Pasar Produk Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia pada Senin (29/7/2024) di Makassar.

### **Dua Perusahaan Berikan Jaminan Kemitraan**

Kerja sama ditandatangani antara perwakilan nelayan Pulau Langkai dan Lanjukang dengan dua Unit Pengolah Ikan (UPI) yang tergabung dalam Asosiasi Demersal Indonesia (ADI), yakni PT. Kemilau Bintang Terang Makassar dan PT. Prima Bahari Inti Lestari.

Dokumen perjanjian yang ditandatangani pada 29 Juli 2024 tersebut menegaskan kemitraan untuk peningkatan rantai pasok serta kerja sama pemasaran hasil produk perikanan skala kecil di Pulau Langkai dan Lanjukang.

Dalam perjanjian tersebut, perusahaan bertindak sebagai pihak pertama dan perwakilan nelayan sebagai pihak kedua. Kerja sama ini berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Factory Manager PT. Kemilau Bintang Terang Makassar, Agus Saputra, menyampaikan bahwa praktik penangkapan ramah lingkungan yang diterapkan nelayan menjadi nilai tambah penting dalam kemitraan ini.

## MENGGURITA DI PULAU

“Kami melihat praktik perikanan gurita di Langkai dan Lanjukang sudah mengarah pada keberlanjutan. Ini menjadi dasar penting bagi perusahaan untuk membangun kemitraan jangka panjang,” ujarnya dalam sesi talkshow.



*Perwakilan nelayan Pulau Langkai dan Lanjukang, Erwin RH, menandatangani surat perjanjian kerja sama kemitraan disaksikan para pihak, sebagai langkah nyata penguatan pasar dan jaminan harga bagi perikanan skala kecil berkelanjutan. Foto: YKL Indonesia.*

### Jaminan Harga dan Transparansi

Melalui kerja sama ini, nelayan memperoleh kepastian jalur pemasaran sekaligus jaminan pembelian sesuai standar mutu dan harga yang disepakati bersama.

Dalam dokumen perjanjian disebutkan bahwa perusahaan berkewajiban membeli hasil tangkapan sesuai jenis, jumlah, ukuran, dan grade yang ditetapkan, bersikap transparan terhadap sistem mutu dan informasi harga, memberikan pelatihan penanganan pasca tangkap sesuai standar industri, serta mendukung peningkatan kapasitas rantai pasok dan pelaksanaan program perbaikan perikanan (Fisheries Improvement Program/FIP).

Sebaliknya, nelayan berkewajiban menjaga kualitas hasil tangkapan, memastikan transparansi data produksi, serta mengikuti peningkatan kapasitas dan standar pasar global yang telah disepakati bersama.

Ketua perwakilan nelayan, Erwin RH, menyambut baik kerja sama ini karena dinilai memberikan kepastian usaha di tengah fluktuasi harga.

“Dengan adanya kemitraan ini, kami tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tengkulak. Ada standar harga, ada kejelasan mutu, dan ada pendampingan,” katanya.

### **Dampak Ekonomi dan Ekologi**

Direktur Eksekutif YKL Indonesia, Nirwan Dessibali, dalam sambutannya menegaskan bahwa program PROTEKSI GAMA telah menunjukkan dampak nyata, baik dari sisi ekonomi maupun ekologi.

Dari sisi ekonomi, ukuran gurita hasil tangkapan meningkat sehingga harga jual menjadi lebih tinggi. Pendapatan nelayan tercatat meningkat hingga 50 persen dibandingkan sebelum program berjalan.

Sementara dari sisi ekologi, penerapan sistem buka-tutup penangkapan gurita yang disepakati masyarakat turut berkontribusi pada pemulihan ekosistem terumbu karang. Tutupan karang hidup di beberapa titik meningkat sekitar 5–10 persen, sekaligus mengurangi tekanan terhadap spesies yang terancam punah.

“Penguatan pasar harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola dan konservasi. Tanpa keberlanjutan sumber daya, pasar yang kuat pun tidak akan bertahan,” tegasnya.

### **Dukungan Multi-Pihak**

Selain penandatanganan perjanjian bisnis, kegiatan ini juga menghasilkan dukungan para pihak dalam penguatan pasar perikanan skala kecil, sistem ketertelusuran, dan upaya keberlanjutan sumber daya perikanan di Kepulauan Spermonde yang ditandatangani berbagai pemangku kepentingan.

## MENGGURITA DI PULAU

Dukungan tersebut mencakup komitmen untuk menguatkan rantai nilai bisnis perikanan skala kecil, mendorong sistem ketertelusuran yang jelas dan mudah diimplementasikan, serta mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan melalui sinergi program masing-masing pihak.

Sejumlah instansi dan lembaga yang terlibat antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, BLU LPMUKP, penyuluh perikanan, akademisi, NGO, media, hingga Sustainable Fisheries Partnership.



*Perwakilan pihak perusahaan menandatangani surat perjanjian kerja sama kemitraan dengan nelayan Pulau Langkai dan Lanjukang, disaksikan para pihak, dalam rangka penguatan pasar dan jaminan harga perikanan skala kecil berkelanjutan. Foto: YKL Indonesia.*

### Akses Permodalan dan Kelembagaan

Dalam sesi diskusi, perwakilan BLU LPMUKP memaparkan peluang akses permodalan bagi nelayan skala kecil. Salah satu syarat utama untuk mengakses pembiayaan adalah pembentukan koperasi atau kelompok usaha yang terstruktur.

Nelayan Pulau Langkai dan Lanjukang pun menyatakan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan, termasuk mendorong pembentukan koperasi guna mempermudah akses pembiayaan serta memperkuat posisi tawar di pasar.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar melalui inkubator UMKM juga menyatakan kesiapan untuk mendampingi peningkatan nilai tambah produk, mulai dari pengemasan hingga strategi pemasaran.

### **Menuju Perikanan Skala Kecil yang Tangguh**

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membangun model perikanan skala kecil yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada tata kelola, transparansi, keberlanjutan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan.

Kemitraan antara nelayan dan perusahaan diharapkan menjadi contoh praktik baik (*best practice*) di wilayah Kepulauan Spermonde, khususnya dalam konteks pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat.

Dengan adanya jaminan harga, kepastian pasar, peningkatan kapasitas, serta dukungan lintas sektor, nelayan Pulau Langkai dan Lanjukang kini memiliki fondasi yang lebih kuat untuk meningkatkan nilai jual produknya tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya laut.

*Nirwan Dessibali – 29 Juli 2024*



## Perkuat Mutu Tangkapan Nelayan Gurita Lewat Pelatihan CPIB

Perwakilan nelayan, pengepul, dan tokoh masyarakat dari Pulau Langkai dan Lanjukang mengikuti Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Makassar, Kamis 12 Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat (PROTEKSI GAMA).

Program Manager YKL Indonesia, Alief Fachrul Raazy, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas nelayan dalam menjaga mutu hasil tangkapan merupakan langkah strategis dalam memperkuat posisi nelayan skala kecil dalam rantai nilai perikanan. “Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan nelayan dalam melakukan penanganan ikan yang baik. Harapannya, peserta tidak hanya memahami konsep keamanan pangan dan higienitas, tetapi juga mampu menerapkannya di lapangan serta membagikan pengetahuan itu kepada nelayan lainnya,” ujar Alief.

Ia menambahkan bahwa kualitas sangat menentukan harga dan keberlanjutan usaha. “Jika mutu ikan menurun, reputasi turun. Kalau reputasi turun, harga turun, dan pendapatan nelayan ikut terdampak. Jadi menjaga mutu berarti menjaga masa depan,” tegasnya.



*Nelayan Langkai dan Lanjukang Perkuat Mutu Tangkapan Gurita Lewat Pelatihan. Foto: YKL Indonesia.*

### Standar Mutu dan Ancaman Pembusukan

Materi pertama disampaikan oleh Sry Rahayu Setyaningsih dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia memaparkan kebijakan sertifikasi CPIB di tingkat supplier serta pentingnya jaminan mutu dalam perdagangan perikanan.

“Ikan bukan hanya komoditas pangan, tetapi juga komoditas perdagangan yang menghasilkan devisa negara. Untuk bisa diterima di pasar luar negeri, kita harus memenuhi standar mutu yang mereka persyaratkan,” jelas Sry Rahayu.

Ia menerangkan bahwa kemunduran mutu ikan disebabkan oleh aktivitas enzim atau autolisis, aktivitas kimiawi seperti oksidasi lemak yang menyebabkan bau tengik, serta aktivitas bakteri. Menurutnya, faktor eksternal seperti penanganan kasar, alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan tidak terjaganya rantai dingin mempercepat proses kerusakan.

“Salah satu bakteri bisa berasal dari tangan kita sendiri. Karena itu kebersihan tangan, wadah, dan lokasi pendaratan sangat penting. Jika bakteri sudah berkembang, sangat sulit untuk dihilangkan,” tegasnya.

Sesi kedua dibawakan oleh Nasdwiana dari Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Ia menjelaskan bahwa ikan mudah busuk karena kombinasi aktivitas enzim dan mikroorganisme seperti *Pseudomonas*, *Aeromonas*, *Vibrio*, dan *Shewanella*. “Mikroorganisme ini tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat memengaruhi kualitas ikan. Karena itu, penanganan yang tepat harus dimulai sejak di atas kapal,” ujarnya.

Nasdwiana juga menjelaskan ciri-ciri ikan segar yang dapat dikenali dari insang yang merah cerah, mata yang jernih dan menonjol, serta tekstur daging yang kenyal. Ia menekankan pentingnya menjaga suhu pendinginan pada kisaran 0 hingga 4 derajat Celcius dan pembekuan minimal minus 18 derajat Celcius jika ingin disimpan lebih lama. “Rantai dingin harus dijaga sejak ikan ditangkap hingga sampai ke tempat pengolahan. Di situlah kunci menjaga mutu,” tambahnya.



*Nasdawiana saat memaparkan materi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) dalam Pelatihan bagi nelayan Pulau Langkai dan Lanjukang di Makassar, 12 Agustus 2024. Dalam sesi ini, peserta dibekali pemahaman tentang pentingnya menjaga mutu, higienitas, serta rantai dingin hasil tangkapan sejak di atas kapal hingga ke pasar. Foto: YKL Indonesia.*

Nasdawiana juga menjelaskan ciri-ciri ikan segar yang dapat dikenali dari insang yang merah cerah, mata yang jernih dan menonjol, serta tekstur daging yang kenyal. Ia menekankan pentingnya menjaga suhu pendinginan pada kisaran 0 hingga 4 derajat Celcius dan pembekuan minimal minus 18 derajat Celcius jika ingin disimpan lebih lama. “Rantai dingin harus dijaga sejak ikan ditangkap hingga sampai ke tempat pengolahan. Di situlah kunci menjaga mutu,” tambahnya.

### **Gurita, Pasar Ekspor, dan Suara Nelayan**

Materi ketiga disampaikan oleh Kalma dari PT Prima Bahari Inti Lestari, sebuah Unit Pengolah Ikan (UPI) yang banyak menangani gurita untuk pasar ekspor. Ia menekankan bahwa kualitas gurita sangat menentukan grade dan harga jual.

## MENGGURITA DI PULAU

“Untuk grade ekspor, gurita tidak boleh bengkak, tidak bau, tidak berwarna pink atau merah, dan tidak pecah tinta. Jika standar ini tidak terpenuhi, harga turun atau bahkan ditolak,” jelas Kalma.

Ia juga menyoroti praktik yang masih ditemukan di lapangan, seperti penggunaan air tawar bersuhu tinggi yang justru menyebabkan gurita cepat bengkak dan rusak. “Begitu terlambat diberi es, bau akan muncul dan kualitas sulit dipertahankan. Karena itu, es menjadi faktor utama,” tegasnya.

Dalam diskusi, beberapa peserta mengungkapkan tantangan ketersediaan es di pulau yang masih bergantung pada pasokan dari daratan utama Kota Makassar. Narasumber sepakat bahwa belum ada alternatif yang sepenuhnya menggantikan fungsi es dalam menjaga mutu. Upaya yang bisa dilakukan adalah menjaga kebersihan wadah, tangan, serta segera membuang isi perut hasil tangkapan untuk memperlambat pembusukan.



*Diskusi dalam Pelatihan CPIB bukan hanya mendengar materi, tetapi juga ruang bagi nelayan Pulau Langkai dan Lanjukung menyampaikan pengalaman dan tantangan di lapangan. Dari keterbatasan es hingga praktik penanganan di atas kapal, semua dibahas bersama untuk mencari solusi nyata. Foto: YKL Indonesia.*

Perwakilan nelayan dari Pulau Langkai, Amal, mengaku pelatihan ini membuka pemahamannya tentang pentingnya menjaga kualitas sejak di atas kapal. “Selama ini kami lebih fokus bagaimana cepat menjual hasil tangkapan. Setelah ikut pelatihan ini, kami jadi paham bahwa cara penanganan sangat menentukan harga. Kalau kualitas bagus, kami juga yang diuntungkan,” ujarnya.

Sementara itu, Jala, nelayan dari Lanjukang, mengatakan bahwa persoalan utama di pulau adalah keterbatasan fasilitas rantai dingin. “Kami mau menjaga kualitas, tapi akses es masih terbatas. Harapannya ke depan ada solusi bersama supaya kami bisa konsisten menjaga mutu,” katanya.

Pelatihan ini dilaksanakan secara partisipatif melalui pemaparan materi, diskusi, dan simulasi praktik langsung. Para nelayan dinilai meningkat kapasitasnya dalam memahami dan menerapkan praktik CPIB. Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat sistem penanganan gurita di Pulau Langkai dan Lanjukang, sekaligus mendorong peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

*Nirwan Dessibali – 12 Agustus 2024*



## Perempuan Pemutus Rantai Kemiskinan Nelayan

Nelayan kecil, khususnya di pulau-pulau kecil menghadapi banyak persoalan dan berdampak pada kemiskinan yang berlarut. Salah satu persoalan yang dihadapi nelayan adalah utang yang tak pernah tuntas. Ketergantungan utang yang dipelihara dari para punggawa atau juragan membuat mereka sulit keluar dari garis kemiskinan.

“Masalah utama nelayan itu di utang, akan susah memberdayakan mereka jika mata rantai hutang tak diputus. Mereka akan selalu bergantung pada punggawa pemberi hutang. Berapa pun hasil tangkapan mereka tak pernah cukup. Selain itu, nelayan yang punya hutang biasanya mendapatkan harga jual yang lebih sedikit karena ada ikatan utang ke *pongawa*,” ungkap Irham Rapy, *Co Management Cordinator Sustainable Fisheries Partnership (SFP)* di Makassar, beberapa waktu lalu.

Menurut Irham, harus ada upaya yang radikal untuk memutus mata rantai utang tersebut. Kurangnya literasi keuangan juga menjadi faktor nelayan tak berdaya. Mereka menerima begitu saja harga yang dipatok *pongawa* mereka, sementara mereka juga tak pernah mencatat dengan baik hasil tangkapan ataupun utang mereka ke *pongawa*. Hal inilah yang harus diretas jika ingin memberdayakan nelayan.

Menurut Yusran Nurdin Massa, *Enviromental Technical Advisor (ETA)* di Blue Forests, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperkuat posisi tawar nelayan skala kecil dan memutus mata rantai ketergantungan terhadap pemodal adalah dengan memperkuat koperasi yang diharapkan bisa menggantikan *pongawa*.

Koperasi atau dapat juga berupa Kelompok Usaha Bersama (KUB) juga menjadi wadah belajar bersama nelayan terkait pengelolaan keuangan usaha dan keuangan rumah tangga yang menjadi salah satu kendala penghidupan nelayan dan masyarakat pesisir.

Lazim ditemukan jika musim lagi baik, pendapatan nelayan kecil pada setiap trip penangkapan lumayan tinggi, hanya saja pengeluaran harian juga sangat tinggi, tidak hanya untuk kebutuhan primer.

“Kadang kala juga mencakup kebutuhan sekunder seperti jajan anak, arisan dan lainnya. Sehingga kadang kala besar pasak daripada tiang. Nelayan skala kecil mesti mulai membenahi pengelolaan rumah tangga dan usahanya,” ujar Yusran.

Langkah pentingnya adalah dengan memberdayakan perempuan, para istri nelayan. Perempuan dinilai punya peran yang besar dalam memberdayakan nelayan. Mereka punya waktu dan kegigihan. Selain itu di beberapa kebudayaan, perempuan adalah pengelola keuangan dan urusan domestik keluarga.

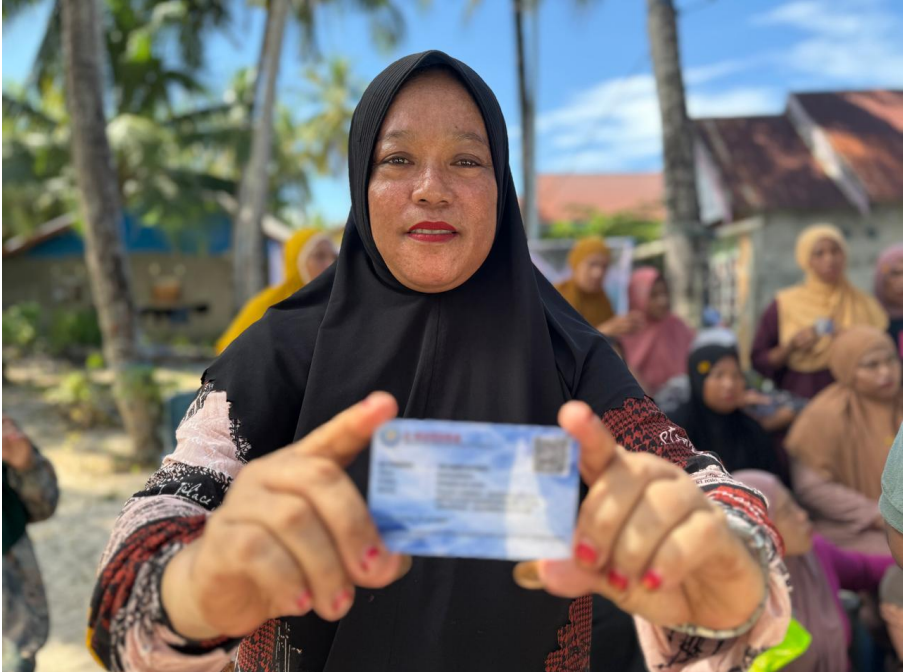
“Mereka bisa diberdayakan dengan menghitung seluruh pendapatan dan pengeluaran, sekaligus mencatat dengan baik utang-utang ke *pongawa*,” tambahnya.

### **Budaya *Pampidokang***

Menurut Hamzah, Lurah Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Makassar, dalam tradisi budaya Bugis-Makassar di pulau-pulau dikenal budaya yang disebut *pampidokang*, yang berarti *siri'* atau adanya rasa malu bagi suami untuk mengurus keuangan dan belanja keluarga. Semuanya diserahkan ke istri, yang menunjukkan besarnya peran perempuan dalam pengelolaan keuangan nelayan. Ia sepakat bahwa pemberdayaan istri bisa menjadi jalan keluar pemberdayaan bagi nelayan. “Jadi istri mengatur dan mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran suami. Ini juga bisa meminimalkan utang yang tak kunjung habis nelayan ke *pongawa* mereka.”

Kemiskinan pada nelayan dan tumpukan utang kepada *pongawa* dianggap sebagai salah satu penyebab maraknya bom ikan oleh nelayan. Mereka dituntut untuk terus memproduksi agar utangnya bisa tertutupi. Motivasi nelayan sawi, istilah untuk nelayan kecil, hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, namun akhirnya terjebak untuk melakukan praktik perikanan destruktif.

Hasil penelitian Muh. Asri dkk. (2016) di Kabupaten Kepulauan Selayar, menemukan bahwa praktik perikanan destruktif umum terjadi pada komunitas nelayan yang terikat dalam pola hubungan patron-klien. Sementara Nurdin dan Grydehoj (2014) mengungkap praktik perikanan destruktif di Pulau Karanrang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, terkait dengan ponggawa-sawi yang menjebak nelayan untuk terus melakukannya.



*Tidak hanya nelayan laki-laki, perempuan pun bisa mendapatkan kartu nelayan Kusuka yang punya banyak fungsi, termasuk kemudahan pada pendidikan anak-anak mereka. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*

### **Mendekatkan Nelayan ke Industri**

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk memutus mata rantai kemiskinan di nelayan adalah dengan mempersingkat rantai pasok nelayan ke dunia industri, dalam hal ini nelayan diberi kemudahan untuk menjual langsung produk hasil tangkapannya ke industri.

Upaya ini dilakukan YKL Indonesia dengan memfasilitasi kerja sama kelompok nelayan fasilitasi kerjasama kelompok nelayan dengan pihak swasta. “Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan nilai dari hasil tangkapan gurita oleh nelayan Pulau Langkai dan Lanjukang. Melihat banyaknya rantai pasok pada perikanan gurita ini menyebabkan rendahnya nilai gurita di tingkat nelayan,” ungkap Nirwan Dessibali. Direktur Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia pada kegiatan diskusi di Hotel Aston Makassar, beberapa waktu lalu.

“Untuk mendukung inisiatif ini, YKL Indonesia sebelumnya memfasilitasi proses pertemuan nelayan dengan dua pihak swasta dalam hal ini perusahaan pengolah ikan yang selanjutnya memfasilitasi lokakarya dalam rangka kesepakatan kerja sama nelayan dengan pihak swasta, termasuk penguatan pasar produk perikanan skala kecil berkelanjutan,” ujar Nirwan.

Pemberdayaan perempuan nelayan juga menjadi salah satu fokus pada kegiatan ini. Para istri nelayan difasilitasi untuk memproduksi sambal dari gurita dan abon ikan. Mereka juga diajarkan literasi keuangan.

Produk nelayan ini telah menjadi perhatian dari pemerintah Kota Makassar. Muhammad Rheza, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Makassar telah berkunjung ke Pulau Langkai melihat langsung proses produksi dan kemasan produk istri nelayan.

“Produknya sangat bagus namun harus diperbaiki kemasannya agar bisa dijual di swalayan-swalayan. Kami punya inkubator dan siap untuk membantu produk ibu-ibu, termasuk membantu untuk proses PIRT dan BPOM,” ungkap Rheza.

Dedyansyah, dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (LPMUKP KKP) menekankan pentingnya penguatan nelayan melalui pembentukan koperasi nelayan. LPMUKP KKP telah membantu banyak kelompok koperasi nelayan di Indonesia dengan dukungan anggaran tak terbatas.

Menurut Dedyansyah, pinjaman dengan bunga rendah pada koperasi ini nantinya akan dibarengi dengan pendampingan. Ia mengajak para nelayan di Pulau Langkai dan Lanjukang untuk membentuk koperasi dan mengakses pinjaman ini.

“LPMUKP meningkatkan kemampuan nelayan yang diwadahi dalam koperasi untuk menangkap ikan di atas 12 mil, serta mendampingi koperasi dalam program Kampung Nelayan Maju atau Kalaju.”

*Wahyu Chandra - 26 Agustus 2024*



## Strategi Penerapan Ekonomi Biru dan Konservasi di Perairan Sulsel

Salah satu tema perikanan dan kelautan yang tengah banyak diperbincangkan saat ini adalah terkait ekonomi biru (*blue economy*). Kehadiran ekonomi biru sangat relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki posisi strategis, peluang dan sekaligus tantangan dalam penjabarannya.

“Sulawesi Selatan telah mencanangkan strategi jangka menengah sekaligus jangka panjang yang di mana mengambil sebagian konsep ekonomi biru dalam pertumbuhan ekonomi,” ungkap Muhammad Ilyas, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, dalam seminar nasional yang dilaksanakan oleh Yayasan Konservasi laut (YKL) Indonesia di Makassar, beberapa waktu lalu.

Ekonomi biru tidak hanya bicara tentang ikan di laut, katanya, namun semua potensi ekonomi di bawah air, apakah itu di air payau ataupun air laut. Ekonomi biru ini memiliki dua kunci, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi kita memanfaatkan seoptimal mungkin dan bagaimana menjaga kelestarian lingkungan.

“Dengan segala potensi laut yang dimilikinya, Sulsel harus berkontribusi terhadap keberlanjutan potensi sumber daya hayati laut dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Apalagi, menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas), Sulsel adalah provinsi dengan indikator ekonomi biru tertinggi di Indonesia.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya laut dalam rangka penguatan ekonomi biru dan konservasi laut sangat membutuhkan *pentahelix*, yaitu kolaborasi lima pihak seperti akademisi, pemerintah, masyarakat, pihak swasta, dan media, di mana peran penting untuk penguatan ekonomi biru dan konservasi laut ada di masyarakat.

### Potensi Sektor Perekonomian Laut

Dr. Ridjal Idrus, pakar konservasi laut dari Universitas Hasanuddin Makassar, menyatakan ada tiga krisis besar yang dihadapi dunia saat ini, yaitu perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati.

“Keanekaragaman hayati memiliki banyak manfaat yang bisa diambil, yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah dengan istilah ekonomi biru, yaitu ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut untuk ekonomi namun tidak melupakan perbaikan kehidupan masyarakat secara sosial sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa dari 12 sektor perekonomian yang bisa dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya laut, hanya dua sektor yang dikembangkan di Indonesia, yaitu tambang minyak dan gas serta perikanan tangkap dan budidaya, sementara 10 sektor lainnya belum termanfaatkan secara maksimal.

“Dengan indeks 70, Sulawesi Selatan memiliki indeks blue ekonomi tertinggi di Indonesia maka seharusnya kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di laut tetapi tidak merusaknya dan menghasilkan ekonomi besar,” jelasnya.

Salah satu potensi ekonomi sumber laut yang bisa dikembangkan adalah pariwisata. Ridjal mencontohkan keberadaan kawasan Great Barrier Reef, wisata terumbu karang di Australia yang telah menghasilkan devisa Rp700 triliun per tahun.

“Indonesia seharusnya memiliki kekayaan yang lebih besar dari apa yang bisa dimanfaatkan Australia karena Indonesia memiliki spesies karang dan ikan yang jauh lebih banyak dibandingkan Australia. Kita memiliki lebih dari 548 lokasi karang yang lebih baik dari Australia. Namun meskipun cantik, ini merupakan wilayah terancam karena banyaknya sampah di laut, yang 98 persen sampahnya berasal dari darat,” katanya.

Jihad, *Biodiversity dan Conservation Senior Officer* Burung Indonesia, berbicara tentang konservasi di wilayah laut dan pesisir dan program yang telah dijalankan Burung Indonesia.

Ia menjelaskan arahan strategis konservasi keanekaragaman hayati pesisir dengan mengatasi ancaman terhadap spesies prioritas tinggi atau konservasi jenis, meningkatkan pengelolaan kawasan atau pengelolaan habitat, mendukung pengelolaan sumber daya berkelanjutan atau peningkatan tata kelola sumber daya alam.

“Selain itu adalah memperkuat aksi berbasis masyarakat untuk melindungi spesies dan kawasan laut atau perlindungan berbasis komunitas, melibatkan sektor swasta atau pelibatan sektor swasta, dan mengembangkan kapasitas masyarakat sipil untuk aksi konservasi di Wallacea yang efektif atau peningkatan kapasitas,” katanya.

Terkait berbagai program konservasi yang telah dilakukan Burung Indonesia, hasilnya secara jangka panjang adalah adanya perubahan indeks *redlist* spesies, penurunan jumlah ancaman terhadap jenis, jumlah hektar *key biodiversity area* (KBA) yang diperkuat perlindungan dan tata kelolanya meningkat, jumlah hektar area perlindungan yang baru, jumlah peningkatan pendapatan per rumah tangga terkait mekanisme keuangan keberlanjutan, jumlah tapak yang pengelolaannya membaik, jumlah komunitas yang mendapat manfaat langsung.

“Sampai dengan 2023 ada 45 program yang tersebar di seluruh wilayah untuk memperkuat peran masyarakat sebagai aktor konservasi,” tambahnya.

### **Perlindungan Kawasan melalui Proteksi Gama**

Salah satu program konservasi yang dilakukan di Sulsel adalah perbaikan tata kelola melalui program penguatan ekonomi dan konservasi gurita berbasis masyarakat (Proteksi Gama) di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukung Makassar, yang dilaksanakan oleh YKL Indonesia.

Tata kelola wilayah laut berbasis masyarakat dilaksanakan melalui sistem buka-tutup sementara selama tiga bulan. Hasilnya, selama 2,5

tahun telah terjadi peningkatan 56,6 persen rata-rata pendapatan rumah tangga. Terkait konservasi, diperoleh hasil terumbu karang di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang mulai pulih kembali.

“Kolaborasi ini sangat didorong kuat dari berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, akademisi hingga media,” ujar Muhammad Fauzi Rafiq, Koordinator Pemberdayaan dan Advokasi YKL Indonesia.

Menurut Fauzi, program ini juga telah membangun kesadaran nelayan dan masyarakat tentang menjaga lingkungan sekitarnya, di mana mereka mulai terbiasa mendiskusikan masalah yang dihadapi secara bersama-sama dan adanya gerakan untuk melindungi biota dilindungi khususnya penyu.

“Dampak ekonomi yaitu meningkatnya hasil tangkapan dari segi ukuran mendorong penguatan pendapatan rumah tangga nelayan. Sedangkan pada dampak ekosistem terjaganya terumbu karang menciptakan interaksi ekologi yang memberi manfaat langsung. Sistem buka-tutup membuat gurita dan ikan kakap-kerapu semakin banyak dan memberikan proses pemulihan bagi ekosistem, menekan tingkat eksploitasi dan ancaman *destructive fishing*,” pungkasnya.

*Wahyu Chandra 2 September 2024*





## Program Buka-Tutup, Sukses Tingkatkan Hasil Tangkapan Gurita di Makassar

Erwin tampak sumringah, raut wajahnya mencerminkan suasana hatinya yang senang dengan hasil tangkapan gurita yang baru mereka dapatkan seminggu sebelumnya. Setelah tiga bulan 'puasa' menangkap gurita di sebuah kawasan sekitar Pulau Lanjukang, Makassar, Sulawesi Selatan, kini mereka panen hasil.

"Tak jauh beda dengan sebelum-sebelumnya. Ada yang dapat Grade A, B dan C, dan tak ada yang D. Kita puas meskipun masih jauh dari harapan," katanya, di Makassar, Senin (4/11/2024).

Erwin (47) adalah salah seorang nelayan gurita di Pulau Langkai, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tiga tahun terakhir, difasilitasi Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia, mereka telah menggagas program buka-tutup kawasan selama tiga bulan di area tertentu di perairan Pulau Langkai dan Lanjukang yang berdekatan.

Menurutnya, ada beberapa kendala kenapa hasil kali ini kurang maksimal. Pertama, faktor cuaca. Dengan kondisi laut yang berombak tinggi menyebabkan air keruh sehingga sulit memantau gurita di kedalaman. Selain itu, gurita juga susah mengenali umpan yang diberikan. Hal lain adalah juga faktor sampah laut yang menyebabkan gangguan di lokasi-lokasi penangkapan.

"Situasi ini tak jauh beda dengan yang terjadi didaerah-daerah lain sekitar, semuanya mengalami penurunan karena faktor-faktor cuaca dan kebersihan laut ini," katanya.

Menurut peta sebaran lokasi tangkapan gurita yang telah mereka buat, lokasi buka-tutup kali ini berada di sekitar Pulau Lanjukang, tepatnya di Taka Biring Kassi dengan luasan 6,8 hektar. Dua periode buka-tutup sebelumnya dilakukan pada lokasi yang sama namun dengan titik koordinat dan luasan berbeda. Pada buka-tutup ke-3, 22 Maret -23 Juni

2023 seluas 55,2 hektar. Sementara pada buka-tutup keempat, 16 September – 17 Desember 2023 seluas 30 hektar.

Lokasi buka-tutup ini sendiri dilakukan di Wilayah Pencadangan Konservasi Daerah Pulau Lanjukang, berdasarkan Perda No.3/2022 tentang RTRW Sulsel tahun 2022-2041, dengan luas kawasan 1.654, 38 hektar.

### Hasil Tangkapan dan Pendapatan Nelayan Naik

Menurut Alief Fachrul Raazy, manajer program di YKL Indonesia, mereka belum *input* dan analisis data untuk hasil buka-tutup kelima ini, namun jika mendengar cerita nelayan, ia merasa optimis hasilnya tak terlalu buruk.

Jika merujuk pada data sebelumnya, pada bulan Januari 2023 total tangkapan gurita sebesar 876 kg dan pada bulan Februari 2023 mengalami peningkatan menjadi 939 kg. Pada bulan Maret 2023 hingga Juni 2023 total tangkapan gurita cenderung mengalami penurunan dari 919 kg menjadi 752 kg. Pada bulan Juli 2023 total tangkapan kembali naik menjadi 844 kg. Terjadi lonjakan yang signifikan pada total tangkapan bulan Agustus 2023 dan September 2023 yakni sebesar 1471 kg dan 1433 kg.

Jika dilihat dari hasil pendapatan nelayan, Alief menggambarkan, pada tahun 2023 total pendapatan dari hasil penjualan gurita dari Januari 2023 hingga September 2023 sebanyak Rp412.717.500,-.

Jika dirinci per tiga bulan, dari Januari – Maret 2023 total pendapatan dari hasil penjualan gurita meningkat dari Rp31.036.100 menjadi Rp38.412.000,-. Bulan April – Mei 2023 terjadi penurunan dari Rp34.232.700 turun menjadi Rp31.606.800,-. Pada Bulan Juni 2023 kembali mengalami kenaikan hingga bulan September 2023 dari Rp33.971.500,- naik menjadi Rp84.069.700,-. “Mungkin tak jauh dari hasil yang *barusan* saya jelaskan ini,” katanya.

Dari segi harga, berdasarkan *grade*, harga saat ini gurita per kg untuk *Grade A* adalah Rp63,000,-, *Grade B* Rp50.000, *Grade C* Rp42.000, *Grade D* Rp25,000,-, dan tanpa *grade* atau harga lokal Rp20.000,-

Meski harga ini masih lebih tinggi dibanding daerah lain, namun jika dibandingkan tahun 2022 dan 2023 lalu, harga ini masih tergolong rendah. Sebagai pembanding bisa dilihat pada harga *Grade A* pada tahun 2022 pada kisaran Rp80.000,- Rp.95.000,. Harga tertinggi Rp95.000,- terjadi di bulan Maret 2022. Sementara di tahun 2023, rata-rata harga pada kisaran Rp80.000,- – Rp84.000,-. Harga tertinggi Rp84.000,- terjadi di bulan Juni 2023.

Dalam beberapa tahun terakhir terjadi tren penangkapan gurita di banyak daerah di Indonesia, khususnya di Indonesia timur, termasuk Makassar. Hal ini membuat *overfishing* di mana nelayan kemudian menangkap gurita tanpa mempertimbangkan *size* dan *grade*.

“Dulu semuanya ditangkap saja kalau ada tanpa melihat *grade*-nya. Tapi setelah dikasih penjelasan kami mulai memilih-milih besar gurita yang akan ditangkap. Termasuk melakukan pembatasan penangkapan di waktu-waktu tertentu,” ungkap Daeng Jala, salah seorang nelayan dari Pulau Lanjukang.

Pembatasan yang dimaksud Daeng Jala adalah program buka-tutup kawasan selama waktu tertentu, biasanya tiga bulan, sama halnya dengan praktik sasi dai Maluku dan Papua. Untuk mendukung program ini, mereka pun membentuk kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) dan memberdayakan kelompok yang sudah ada.

“Pengawasan ini penting jika ingin hasilnya maksimal namun kadang kami menghadapi situasi ketika bertemu nelayan dari luar yang menangkap ikan di wilayah yang dibatasi,” jelasnya.

### **Pemberdayaan Perempuan**

Gurita hasil tangkapan nelayan tak selamanya dalam kondisi bagus. Luka ataupun tentakel yang terpotong akan mengurangi harga. Biasanya

## MENGGURITA DI PULAU

nelayan akan menjualnya dengan harga berapa saja yang diberikan pengepul.

Kelompok perempuan di Pulau Langkai, Makassar, yang merupakan istri-istri nelayan ternyata punya ide tersendiri memanfaatkan gurita rusak atau *afkir* tersebut. Dengan sedikit pelatihan yang telah diberikan lembaga pendamping, mereka mengolah daging gurita tersebut menjadi sambal gurita. Rasanya gurih dan tahan lama.

“Ini bisa bertahan berbulan-bulan di dalam botol kemasan jika tak dibuka, rasanya gurih karena masih ada potongan gurita diantara sambalnya,” ungkap Nurjannah, ketua kelompok Merpati Putih, pada Oktober 2024 silam.

Kelompok yang dibentuk dua tahun silam ini memang memiliki progres yang luar biasa. begitu dibentuk mereka langsung tancap gas, belajar membuat sambal gurita dan abon ikan, dua produk yang masih bertahan sampai sekarang.

Produk kelompok ini mendapat pujian dari Philippa Armstrong, *Deputy Consul-General*, Konsulat-Jenderal Australia di Makassar, yang berkunjung Juni 2024 silam. Ia mengatakan sangat senang melihat progres dari kelompok usaha yang dilakukan oleh perempuan Pulau Langkai dan bagaimana kelompok ini terberdayakan dan terorganisir dengan baik.

Dinas Koperasi Kota Makassar juga telah memberi atensi besar melalui fasilitasi untuk mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) dan *branding* produk. Bahkan ke depan, Muhammad Rheza, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar telah menjanjikan untuk membantu baik dari *branding* maupun pemasaran produk, diintegrasikan dengan program dinas.

Pilihan gurita sebagai bahan sambal, berawal dari keresahan perempuan nelayan, di mana hasil tangkapan suami mereka sering ditolak pengepul karena rusak. Padahal di musim-musim tertentu hasil tangkapan tak banyak, harga pun tak selamanya bagus. Gurita dengan Grade A yang bisa sangat besar memang punya masalah tersendiri saat penangkapan,

sehingga kadang nelayan bergelut dengan gurita yang melilit, sehingga mau tak mau harus melukai gurita untuk melepaskan lilitan.

“Kita coba olah gurita yang ditolak, agar harganya tidak terlalu murah, padahal ukurannya besar-besar. Di awal memang telah disepakati bahwa gurita yang diolah adalah yang tertolak, dan bukan karena ukuran kecil yang sengaja ditangkap,” ujarnya.

Mereka punya produk abon ikan, di mana mereka mengolah tiga jenis ikan, yaitu tenggiri, tuna dan gembung, tergantung pada jenis apa yang sedang melimpah.

“Dengan dibuat abon harga bisa lebih mahal dan tahan hingga 6 bulan jika dikemas dengan baik,” jelas Adi Zulkarnaen, koordinator networking di YKL Indonesia, yang telah mendampingi kelompok ini sejak awal.

Untuk pemasaran mereka memiliki *brand* Indo Sea. Indo sendiri berarti ‘ibu’ sementara ‘sea’ adalah ‘laut’. Secara filosofis, ujar Adi, ini menjelaskan bagaimana kuatnya keterikatan perempuan dengan laut.

### **Tantangan Peningkatan Produk**

Meskipun sudah mandiri dan produksi terus meningkat, namun ada tantangan tersendiri untuk pengembangan produk ini lebih jauh. Pertama pada keterbatasan modal, kedua pada akses dari pulau ke daratan atau sebaliknya. Ketiga, terkait keterbatasan infrastruktur listrik pulau sehingga penyimpanan produk dan bahan produk tidak bisa maksimal. “Sempat memang ada yang menawarkan investasi, namun jika akan diproduksi lebih besar akan sulit jika dari pulau yang jauh dari daratan. produksi bisa dilakukan namun sulit dalam skala besar.”

Selain di Pulau Langkai, YKL juga memberdayakan perempuan di Pulau Lanjukang, yang telah membentuk kelompok. Hanya saja jenis produknya berbeda, yaitu olahan ikan mairo. “Kemarin kan sempat ada limpahan hasil tangkapan mairo di nelayan sehingga harga turun dan terpaksa harus dijual dengan harga rendah. kalau diolah menjadi produk makanan maka harganya bisa lebih besar dan akan tahan lama.”



*Gurita menjadi salah satu produk olahan yang diusahakan di Pulau Langkai, diolah menjadi sambal gurita dengan brand Indo Sea. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*

Untuk mengembangkan produk gurita di Pulau Lanjukang agak sulit karena infrastruktur listrik yang terbatas, hanya mengandalkan genset. Beda dengan Pulau Langkai yang telah memiliki mesin genset besar dan akan dinyalakan di malam hari. “Tetapi kedua kelompok ini saling bekerja sama. Jika perempuan di Pulau Langkai membuat produknya, maka perempuan di Pulau Lanjukang yang menjualnya ke pengunjung Pulau Lanjukang, yang memang selama ini telah menjadi salah satu objek bahari di Makassar.”

Menurut Adi, pemberdayaan kelompok perempuan sangat penting karena perannya yang vital dalam keluarga. Kehadiran kelompok olahan ini juga penting tidak sekedar mendapatkan keuntungan ekonomi hasil penjualan produk namun juga pada literasi keuangan pada keluarga nelayan. “Suami mungkin yang menghasilkan uang, namun urusan domestik ada di istri, sehingga sangat perlu literasi keuangan ke ibu-ibu, bagaimana mereka mengatur keuangan, hanya membeli hal-hal yang dibutuhkan. pendampingan ini adalah sekaligus mengajarkan literasi keuangan ini, selain terkait produk dan bagaimana mengemasnya,” pungkasnya.

*Wahyu Chandra - 22 November 2024*





## Hak Kelola Masyarakat Pulau Langkai dan Lanjukang Didukung Para Pihak

Hak kelola masyarakat Pulau Langkai dan Lanjukang, Kota Makassar, dalam mengelola wilayah laut mendapat dukungan penguatan dari berbagai pihak. Melalui sistem buka-tutup area penangkapan gurita, masyarakat telah membuktikan bahwa mereka mampu menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dukungan ini disampaikan saat peresmian penutupan sementara area penangkapan gurita periode ke-6 di Pulau Lanjukang pada Jumat, 14 Februari 2025. Acara ini dilaksanakan oleh Forum Pasibuntuluki bekerja sama dengan Yayasan Konservasi Laut Indonesia (YKL) Indonesia dengan dukungan Turning Tides, serta pemerintah pusat dan daerah.

“Kami tentunya sangat mendukung kegiatan yang telah dilakukan masyarakat Pulau Langkai dan Lanjukang, termasuk bagaimana tata kelola ini nantinya dapat diintegrasikan dalam kawasan konservasi untuk memberikan jaminan kepada nelayan dan masyarakat yang telah melakukan inisiatif lokal,” ujar perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Astuty Abuyahya.

Ia menambahkan bahwa mekanisme integrasi ini telah dipelajari dengan baik dan sangat memungkinkan untuk diterapkan. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat memperoleh jaminan dalam melaksanakan sistem buka-tutup wilayah penangkapan gurita.

Senada dengan itu, perwakilan dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Laut (BPSPL) Makassar menegaskan bahwa pengakuan legalitas menjadi langkah penting dalam melindungi hak kelola masyarakat lokal.

“Kami mendukung penuh inisiatif ini untuk diakui dalam kawasan konservasi. Jika sudah masuk dalam pencadangan, pengelolaan ini akan mendapatkan pengakuan hingga tingkat nasional,” ujar Munandar.

### Tata Kelola Berbasis Masyarakat

Tata kelola wilayah perairan laut berbasis masyarakat lokal dengan sistem buka-tutup di Pulau Langkai dan Lanjukang telah berlangsung sejak tahun 2021. Hasilnya, populasi gurita semakin meningkat dengan ukuran yang lebih besar, sehingga meningkatkan pendapatan nelayan serta efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan laut, khususnya ekosistem terumbu karang dan spesies prioritas penting.

Namun, di balik keberhasilan ini, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti penguatan jaminan pengelolaan wilayah laut berbasis masyarakat dan pengawasan terhadap nelayan dari luar Pulau Langkai dan Lanjukang yang masih sering melanggar kesepakatan buka-tutup. Selain itu, praktik penangkapan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bom atau bius, masih menjadi ancaman.

Ketua Forum Pasibuntuluki, Erwin RH, menyampaikan bahwa pengelolaan wilayah ini mencerminkan kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat lokal atas keberlanjutan ekosistem laut.

“Kami berharap sistem buka-tutup ini tidak hanya menjaga sumber daya laut tetapi juga memperkuat hak-hak masyarakat pesisir sebagai pengelola utama wilayah ini,” kata Erwin.

Forum Pasibuntuluki mengelola dua wilayah buka-tutup dengan luas total sekitar 400 hektar di perairan Pulau Langkai dan Lanjukang. Wilayah ini mencakup area yang berada di dalam dan di luar kawasan konservasi. Sistem buka-tutup diterapkan secara rotasi di tiga area, di mana masing-masing area ditutup selama tiga bulan dalam setahun.

Kesepakatan masyarakat untuk menutup sementara area penangkapan gurita didasarkan pada prinsip melindungi ekosistem laut sekaligus memberikan waktu bagi gurita untuk berkembang biak secara optimal. Aturan ini disepakati bersama melalui “Kesepakatan Bersama Tata Kelola Wilayah Laut Berbasis Masyarakat” yang ditandatangani oleh nelayan, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah.

## Penguatan Hak Kelola Masyarakat

Direktur Eksekutif YKL Indonesia, Nirwan Dessibali, menekankan pentingnya melindungi hak masyarakat lokal dalam mengelola wilayah mereka sendiri.

“Inisiatif buka-tutup ini adalah bukti bahwa masyarakat mampu mengelola sumber daya mereka secara berkelanjutan. Namun, hak kelola ini perlu diakui dan dilindungi secara hukum agar masyarakat merasa aman dalam menjalankannya,” ujarnya.

Puncak acara ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan kesepakatan bersama tata kelola wilayah laut berbasis masyarakat oleh perwakilan nelayan dan pemerintah. Kesepakatan ini mencakup aturan-aturan terkait penutupan sementara, pengawasan, serta sanksi bagi pelanggar.

Sebagai simbol dimulainya periode penutupan, dilakukan pemasangan penanda wilayah berupa pelampung dan papan informasi di laut. Pemasangan ini dilakukan secara bersama-sama oleh perwakilan pemerintah, Forum Pasibuntuluki, dan nelayan setempat.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya melestarikan ekosistem laut tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sistem buka-tutup ini menjadi contoh nyata bagaimana pengelolaan sumber daya berbasis lokal dapat berjalan berkelanjutan dengan dukungan lintas pihak.

*Nirwan Dessibali – 14 Februari 2025*



## Saatnya Perkuat Buka Tutup Area Tangkap Gurita di Makassar

Sekelompok nelayan dari Pulau Langkai dan Lanjukang berkumpul di halaman rumah seorang warga di Pulau Lanjukang, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) akhir Februari. Mereka bersiap untuk mengawasi laut dan merumuskan strategi agar kegiatan itu berjalan efektif.

Mereka ini para nelayan yang tergabung dalam Forum Pengelola Sistem Buka dan Tutup Gurita Lanjukang dan Langkai (Pasibuntuluki). Mereka merasa perlu mengawasi untuk memastikan sistem buka-tutup gurita, yang sudah berjalan sejak Januari-Maret 2025. Selama periode ini, seluruh aktivitas penangkapan gurita setop, baik nelayan setempat maupun nelayan dari luar.

Forum Pasibuntuluki mengelola sistem buka tutup di perairan sekitar Pulau Langkai dan Lanjukang dengan luas sekitar 400 hektar. Luasan itu mencakup kawasan konservasi dan area di luar pencadangan. Kawasan yang masuk dalam sistem buka tutup sudah mereka tandai dengan pelampung sebagai batas wilayah, terletak di sebelah Pulau Lanjukang.

“Kami rutin pengawasan untuk memastikan tidak ada aktivitas penangkapan gurita atau ikan lain di lokasi yang ditutup, termasuk memantau kemungkinan aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan,” kata Erwin, Koordinator Forum Pasibuntuluki.

Penerapan sistem buka-tutup ini sudah rutin dalam tiga tahun terakhir. Untuk tahun ini, penerapan berlaku di tiga lokasi, sebagaimana kesepakatan dalam pertemuan pada 14 Februari 2025 di Pulau Lanjukang. Ketiganya, adalah sebelah utara Pulau Lanjukang (Januari-Maret), sebelah selatan pulau (Mei-Juli), dan sebelah barat pulau (September-November).

Tiga periode buka-tutup sebelumnya juga berlangsung di lokasi sama, namun titik koordinat dan luasan berbeda. Pada buka-tutup 22 Maret-23 Juni 2023 seluas 55,2 hektar. Pada buka-tutup periode 16 September-17

## MENGGURITA DI PULAU

Desember 2023 seluas 30 hektar dan periode Agustus–November 2024 di area 6,8 hektar.

Lokasi buka-tutup ini di Wilayah Pencadangan Konservasi Daerah Pulau Lanjukang, berdasarkan Perda No.3/2022 tentang RTRW Sulsel tahun 2022-2041, dengan luas kawasan 1.654, 38 hektar.

Selain sistem buka-tutup, Forum Pasibuntuluki juga menjalankan program prioritas lain, seperti memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, meningkatkan pengawasan, mengembangkan konservasi melalui transplantasi karang dan pelestarian penyu, serta mendorong ekonomi masyarakat melalui pariwisata dan pengelolaan hasil laut. “Kami berharap, kesepakatan ini semakin memperkuat sistem yang kami jalankan dan mendapatkan dukungan lebih luas. Semua ini demi keberlanjutan laut kita,” kata Erwin.

### Kelestarian laut

Menurut Erwin, pertemuan 14 Februari 2025 di Pulau Lanjukang menjadi momentum penting terkait tata kelola wilayah laut berbasis masyarakat. Selain nelayan, dalam pertemuan ini juga hadir pemerintah provinsi dan kota, Polri/TNI, penyuluh perikanan, Badan Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Cabang Dinas Kelautan (CDK) Mamminasata, serta pihak terkait lain.

Dalam pertemuan itu, para nelayan menegaskan komitmen menjaga keberlanjutan ekosistem laut dengan menutup sementara lokasi penangkapan gurita sesuai jadwal. Selama masa penutupan, tidak ada yang boleh menangkap gurita, kecuali pemancing yang menggunakan metode tradisional seperti *kedo-kedo*, pemancing tenggiri, *ande-ande*, dan alat tangkap lain yang tidak mengancam kelestarian gurita.

Batas wilayah penutupan juga mereka tandai dengan pelampung dan bendera, dan papan pengumuman berisi informasi larangan penangkapan gurita. Forum Pasibuntuluki bersama masyarakat aktif melakukan pengawasan untuk memastikan aturan dipatuhi dan mencegah pelanggaran.

Larangan keras juga, katanya, merusak atau mengambil tanda pembatas sistem buka-tutup. Kalau ada yang melanggar, mereka akan mendapat teguran. Kalau pelanggaran berulang, akan ada sanksi lebih tegas, termasuk penyitaan hasil tangkapan yang kemudian mereka sumbangkan untuk kepentingan masyarakat. Pelanggar juga dapat dilaporkan kepada pihak berwenang untuk tindakan lebih lanjut.

Adi Zulkarnaen, Koordinator Networking Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam tata kelola laut. “Kita tidak hanya menutup wilayah tangkap sementara, juga menyepakati strategi penguatan tata kelola ke depan. Langkah ini menunjukkan kepedulian tinggi masyarakat pesisir terhadap kelestarian sumber daya laut yang menjadi sumber penghidupan mereka,” katanya.

Nirwan Dessibali, Direktur Eksekutif YKL Indonesia, mengapresiasi inisiatif nelayan mendorong pemanfaatan sumber daya secara lestari. Dia yakin, sistem buka-tutup tidak hanya memastikan keberlanjutan stok ikan di alam, juga mempercepat pemulihan ekosistem. “Dulu, hanya satu lokasi yang ditutup selama tiga bulan, dan setiap periode penutupan selalu dibahas ulang. Sekarang, tiga lokasi ditetapkan sekaligus untuk satu tahun penuh. Ini adalah hasil dari pembelajaran bersama,” katanya.



*Untuk menandai batas kawasan buka-tutup gurita digunakan pelampung di sejumlah titik. Pelampung ini disediakan secara swadaya masyarakat difasilitasi Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*

### Banyak tantangan

Penerapan praktik buka-tutup para nelayan sejatinya berjalan cukup efektif, kendati inisiatif hanya berdasarkan surat keputusan (SK). Walau Jala, Ketua II Forum Pasibuntuluki sedikit khawatir soal payung hukum ini karena belum cukup kuat mengikat.

Dia berharap, agar praktik ini teraplikasi dalam konteks lebih luas. "Kami ingin kegiatan berjalan aman dan berkelanjutan. Kami sudah berusaha menjaga dan mengelola laut dengan baik, tetapi kami butuh dukungan agar tidak terjadi konflik," katanya.

Menanggapi hal ini, Astuty, dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Selatan menegaskan, pemerintah mendukung penuh inisiatif masyarakat. "Kami ingin tata kelola ini terintegrasi dengan kawasan konservasi untuk memberikan perlindungan lebih bagi nelayan yang telah berinisiatif menjaga lautnya."

Rizky Sapharina dari Cabang Dinas Kelautan (CDK) Mamminasata menambahkan bahwa dalam hal pengawasan, masyarakat memiliki peran sebagai pelapor. "Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan penegakan hukum, tetapi dapat mencatat dan melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang," katanya.

Munandar Jakasukmana dari BPSPL Makassar menyoroti pentingnya peningkatan legalitas. "Jika kawasan ini masuk dalam pencadangan kawasan konservasi, maka penetapannya akan ditandatangani oleh menteri, yang berarti perlindungannya jauh lebih kuat," katanya.

Hal ini, menjadi harapan besar bagi masyarakat yang telah bekerja keras menjaga perairan mereka.

Menurut Nirwan, sistem buka-tutup ini menunjukkan, masyarakat pesisir Pulau Langkai dan Lanjukang bisa menjadi pelaku utama dalam menjaga laut mereka. "Keberhasilan sistem ini bukan hanya soal keberlanjutan ekosistem, tetapi juga membangun kemandirian nelayan dalam mengelola sumber daya alam mereka."

Namun, untuk memastikan keberlanjutan sistem ini dalam jangka panjang, perlu dukungan dari berbagai pihak. Pengakuan hukum lebih kuat, pendampingan dari pemerintah dan lembaga konservasi, serta kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya sistem ini menjadi kunci keberhasilan pengelolaan laut berbasis masyarakat.

*Wahyu Chandra - 8 Mar 2025*



## Komitmen Para Pihak Mengawal Pengakuan Hak Kelola Masyarakat Lokal di Pulau Langkai dan Lanjukang

Pagi itu, hujan turun cukup deras disertai hembusan angin kencang. Namun semangat puluhan nelayan dari Pulau Langkai dan Lanjukang di Kota Makassar, tak surut sedikit pun. Mereka bersiap memulai aktivitas penangkapan gurita yang berbeda dari hari biasanya. Dengan perahu kecil, nelayan tak sabar menuju perairan Taka Biring Kassi yang tidak jauh dari pulau mereka.

Rabu, 16 April 2025, adalah momen istimewa dimana hari pembukaan sebagian wilayah tangkap gurita yang telah ditutup selama tiga bulan sebagai bagian dari sistem buka-tutup pengelolaan perikanan berbasis masyarakat. Setelah hujan reda, kegiatan dimulai dengan doa bersama dan ritual syukuran, dilanjutkan dengan pengangkatan pelampung penanda area penangkapan telah dibuka.

Rangkaian pembukaan ini disaksikan langsung oleh berbagai pihak, termasuk dari perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, pemerintah kecamatan, penyuluh perikanan, aparat penegak hukum (Bhabinkamtibmas dan Babinsa), akademisi ITBM Balik Diwa, lembaga swadaya masyarakat dan media.

Semangat para nelayan semakin terasa dengan digelarnya lomba tangkap gurita, yang diselenggarakan oleh Forum Pasibuntuluki (Forum Pengelola Sistem Buka dan Tutup Pulau Lanjukang dan Langkai) dengan dukungan Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia dan Turning Tides serta para pihak yang hadir.

“Setelah kurang lebih 1,5 jam, 24 nelayan berhasil menangkap total 52 ekor dengan berat 54 kg. Rata-rata gurita yang didapatkan sebesar 1,04 kg. Hasil ini sebagai yang terbaik dari enam periode buka-tutup yang telah dilakukan. Gurita dengan Grade A atau diatas 2 kg juga didapatkan

nelayan sebanyak 5 ekor, dimana sebelumnya sulit didapatkan,” ujar Erwin RH, Ketua Forum Pasibuntuluki.

Erwin menyampaikan hasil ini menunjukkan inisiatif masyarakat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan dan meningkatkan perekonomian. Untuk itu ia berharap para pihak terus mengawal penguatan hak Kelola mereka. “Semoga dari pemerintah terus mendukung kami dalam pengakuan secara resmi buka-tutup ini,” ujar Erwin.

### **Pengakuan dan Perlindungan Hak Kelola Masyarakat Lokal**

Harapan Erwin direspon Plt, Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar Kementerian Kelautan dan Perikanan, A. Muhammad Ishak Yusma yang menegaskan pihaknya siap mengawal pengakuan dan perlindungan hak kelola masyarakat lokal di Pulau Langkai dan Lanjukang.

“Kami dari Kementerian bersama dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Kelautan dan perikanan siap mengawal program buka tutup. Seperti yang telah kami tekankan bahwa ini akan dimasukkan dan diakui dalam rencana pengelolaan kawasan konservasi,” jelas Ishak.

Ia menilai apa yang telah dilakukan dapat menjadi contoh dan role model untuk diterapkan di berbagai daerah lainnya. “Model ini harusnya dapat diadaptasi atau menjadi contoh pengelolaan untuk daerah lain, khususnya pada penangkapan gurita,” tambahnya.

Ishak mengapresiasi usaha yang dilakukan nelayan untuk terus konsisten menjaga hasil tangkapan secara berkelanjutan. Menurutnya, sistem buka tutup penangkapan gurita yang diterapkan menysasar 3 aspek penting yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial.

“Dengan adanya buka tutup ini maka terumbu karang menjadi lebih baik. Selain itu juga memberikan kesempatan bagi gurita untuk berkembang serta mempertahankan keanekaragaman sumber hayati,” jelasnya.

Penerapan sistem buka tutup penangkapan gurita juga dilakukan secara musyawarah untuk mufakat yang melibatkan nelayan. Hal ini, menurut Ishak merupakan hal yang sangat tepat untuk konsistensi dan perlindungan buka tutup yang diterapkan.

Senada juga dengan Ishak, Asniwati yang merupakan Penyuluh Perikanan Kota Makassar mengatakan jika dampak positif diterima oleh nelayan secara ekonomi setelah buka tutup penangkapan gurita diterapkan.

“Berdasarkan data produksi sebelum adanya sistem buka tutup, hanya 1 kg sekali menangkap, itupun untuk grade a sangat jarang didapatkan. Setelah diterapkan buka tutup, terjadi peningkatan. Ini harusnya dijadikan motivasi, ekonomi otomatis meningkat,” jelasnya.

### **Pengakuan Hak Tenurial**

Direktur Eksekutif YKL Indonesia, Nirwan Dessibali menyampaikan di tengah masih lemahnya pengakuan hak tenurial masyarakat lokal di wilayah pesisir, masyarakat Pulau Langkai dan Lanjukang menunjukkan inisiatif luar biasa melalui Forum Pasibuntuluki. Melalui pendekatan konservasi berbasis komunitas, Forum ini memperjuangkan hak atas ruang hidup dan wilayah kelola laut yang berkelanjutan.

“Tanpa pengakuan hukum atas wilayah tangkap dan hak kelola, masyarakat tidak memiliki dasar kuat untuk melindungi wilayah hidup mereka dari aktivitas penangkapan ilegal dan destruktif yang dilakukan nelayan dari luar pulau. Disinilah pentingnya hak tenurial yang mencakup hak akses, manfaat, kontrol, penegakan, hingga transformasi wilayah sebagai dasar pengakuan dan perlindungan,” jelas Nirwan.

Sebagai langkah strategis, para pihak merekomendasikan penggunaan jalur integrasi Kawasan Konservasi Daerah (KKD) sebagai bentuk legalisasi dan ruang advokasi kebijakan untuk pengakuan hak kelola masyarakat.

Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2022 tentang RTRW Sulsel, wilayah pencadangan KKD Pulau Lanjukang seluas 1.654,38 hektar. Saat ini

## MENGGURITA DI PULAU

Forum Pasibuntuluki menyepakati luasan area buka tutup mencapai 400 hektar yang mencakup 3 lokasi.

Area yang dikelola oleh Forum Pasibuntuluki menurut Nirwan akan diupayakan untuk diintegrasikan ke dalam aturan tersebut sebagai wujud pentingnya peran dan pengakuan hak tenurial masyarakat lokal.

“Forum Pasibuntuluki secara resmi dilibatkan dalam Pokja penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi KKD Lanjukang. Ini menjadi penting untuk memperkuat legitimasi hak kelola masyarakat secara hukum yang nantinya penetapannya ditandatangani Menteri,” jelas Nirwan.



*Nelayan memperlihatkan hasil tangkapan gurita yang ditangkap di lokasi buka tutup.  
Foto: YKL Indonesia.*

## Harapan Nelayan

Forum Pasibuntuluki merupakan inisiasi yang dilakukan oleh nelayan untuk mengelola sistem buka tutup penangkapan gurita yang telah dijalankan selama kurang lebih 3 tahun. Forum ini dibentuk pada 22 September 2023 dan telah mendapatkan SK dari pemerintah Kelurahan Barrang Caddi pada November 2023.

Adapun program prioritas dari Forum Pasibuntuluki yang pertama adalah memperkuat kerja sama dengan para pihak. Kedua adalah penguatan pengawasan wilayah perairan, ketiga terkait dengan konservasi sumber daya laut dan terakhir adalah penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Jala Ketua II Forum Pasibuntuluki menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi terutama dalam hal pengawasan. Dengan sudah 3 lokasi yang mereka kelola, pengawasan menjadi hal penting yang harus dilakukan.

“Dalam setahun sudah ada 3 lokasi yang kami kelola. Pengawasan ini utamanya dari nelayan dari luar, jadi mohon kami dibantu sosialisasikan,” ujarnya.

*Nirwan Dessibali – 16 April 2025*



## Nelayan Langkai dan Lanjukang Panen Gurita di Kawasan Buka-Tutup

Pulau Lanjukang agak mendung, pagi itu. Puluhan orang berkumpul di tanah kosong sekitar vila wisata. Warga sedang 'berpesta' sederhana merayakan pembukaan kawasan tangkap gurita yang telah tutup sejak tiga bulan lalu. Sekitar 24 nelayan dari Pulau Lanjukang dan Langkai berlomba-lomba menangkap gurita dengan perahu sederhana mereka.

Pulau Lanjukang, adalah pulau kecil di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan populasi 80 jiwa dari sekitar 30 keluarga. Mereka hidup sebagai nelayan juga dari sektor pariwisata. Lanjukang memiliki laut bersih dan alami dengan mercusuar di tengahnya. Sekeliling pulau juga banyak lubang penyu bertelur.

Pulau Lanjukang, menjadi salah satu pulau konservasi penyu kelolaan masyarakat. Mereka membentuk Kelompok Konservasi Lanjukang (Kompak), beranggotakan belasan anak muda. Anas sebagai ketuanya.

"Mungkin sudah ada ribuan tukik dilepas dalam tiga tahun terakhir. Tahun ini kami menemukan 10 lubang. Ada dua jenis penyu yang sering bertelur di sini, yaitu penyu hijau dan penyu sisik," katanya, Rabu (16/4/25).

Lubang tempat penyu bertelur berpagar seng dan jaring untuk melindunginya dari predator. Siapa yang menemukan lubang maka dialah yang menjadi pemilik. Tukik kemudian warga penemu pelihara. Mereka akan dirilis ke alam setelah usia sekitar tiga bulan. Atau menawarkan ke wisatawan untuk melepas dan menjadi sumber penghasilan tambahan bagi mereka.

Meskipun relatif terjaga, konservasi penyu di Pulau Lanjukang bukan tanpa tantangan. Terkadang masih ditemukan nelayan yang menangkap penyu dewasa untuk ambil daging dan cangkang secara sembunyi-sembunyi.

## MENGGURITA DI PULAU

“Beberapa hari lalu kami temukan cangkang penyu disembunyikan di sela-sela tanaman, itu sepertinya sudah digarami untuk diawetkan. Belum tahu siapa pelakunya.”

Menurut Anas, pelaku biasa beraksi malam hari hingga susah terdeteksi. Tidak hanya menangkap penyu, mereka juga kerap menangkap gurita dan ikan di wilayah yang telah disepakati untuk tutup sementara. Mereka juga tak punya kapal yang memadai untuk mengawasi dan mengejar pelaku.

Daeng Jala, tokoh masyarakat juga Ketua II Forum Pengelola Sistem Buka dan Tutup Pulau Lanjukang dan Langkai (Forum Pasibuntuluki) benarkan tantangan pengawasan ini. Tidak hanya untuk konservasi penyu juga area buka tutup yang sedang mereka jaga. Apalagi, dengan tiga lokasi kelola, mereka harus ketat mengawasinya.

“Untuk pengawasan ini, terutama dari nelayan dari luar, kami mohon dibantu sosialisasikan,” katanya.



*Proses penimbangan hasil tangkapan gurita. Sejak pemberlakuan buka tutup, gurita yang tertangkap lebih berbobot. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*

## Bobot meningkat

Hari itu istimewa. Wilayah tangkap gurita yang selama tiga bulan tutup akhirnya dibuka.

Berbagai kalangan menyaksikan rangkaian pembukaan ini. Mulai dari perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, pemerintah kecamatan, penyuluh perikanan, aparat penegak hukum (Bhabinkamtibmas dan Babinsa), akademisi ITBM Balik Diwa, lembaga swadaya masyarakat dan media dan warga.

Semangat para nelayan makin terasa dengan ada lomba tangkap gurita, yang Forum Pasibuntuluki adakan.

Setelah kurang lebih 1,5 jam melaut, 24 nelayan berhasil menangkap 52 gurita seberat 54 kilogram. Rata-rata gurita 1,04 kilogram. Ada juga nelayan yang mendapat lima gurita grade A (berat lebih dua kilogram) yang sebelumnya sulit ditemukan.

“Hasil ini sebagai yang terbaik dari enam periode buka tutup yang telah dilakukan,” ujar Erwin RH, Ketua Forum Pasibuntuluki.

Hasil ini, katanya, menunjukkan inisiatif masyarakat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan dan meningkatkan perekonomian. Untuk itu, dia berharap para pihak terus mengawal penguatan hak kelola mereka.

A. Muhammad Ishak Yusma, Plt, Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, siap mengawal pengakuan dan perlindungan hak kelola masyarakat di Pulau Langkai dan Lanjukang. “Kami dari kementerian bersama dengan pemerintah provinsi, hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan siap mengawal program buka tutup. Ini akan masuk dan diakui dalam rencana pengelolaan kawasan konservasi,” katanya.

Apa yang masyarakat lakukan dapat menjadi contoh dan *roles model* di berbagai daerah lain. “Ini harusnya dapat diadaptasi atau menjadi contoh pengelolaan untuk daerah lain, khususnya pada penangkapan gurita.”

## MENGGURITA DI PULAU

Ishak mengapresiasi usaha para nelayan yang konsisten menjaga hasil tangkapan secara berkelanjutan. Menurut dia, sistem buka tutup penangkapan gurita itu menyorot tiga aspek penting sekaligus, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial. “Dengan adanya buka tutup ini maka terumbu karang menjadi lebih baik. Selain itu juga memberikan kesempatan bagi gurita untuk berkembang serta mempertahankan keanekaragaman sumber hayati.”



*Anas menunjukkan lubang penyu bertelur. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*

Asniwati, penyuluh perikanan Kota Makassar, mengatakan, ada keuntungan ekonomi setelah nelayan menerapkan buka tutup area tangkap gurita. “Berdasarkan data produksi sebelum adanya sistem buka tutup, hanya 1 kilogram sekali menangkap, itu pun untuk grade A sangat jarang. Setelah diterapkan buka tutup, terjadi peningkatan. Ini harusnya dijadikan motivasi, ekonomi otomatis meningkat.”

### **Hak kelola masyarakat**

Nirwan Dessibali, Direktur Eksekutif YKL Indonesia, menyampaikan di tengah lemahnya pengakuan hak tenurial masyarakat di wilayah

pesisir, masyarakat Pulau Lanjukang dan Langkai melalui Forum Pasibuntuluki tunjukkan bahwa mereka bisa. Melalui pendekatan konservasi berbasis komunitas, forum ini memperjuangkan hak atas ruang hidup dan wilayah kelola laut berkelanjutan.

“Tanpa pengakuan hukum atas wilayah tangkap dan hak kelola, masyarakat tidak memiliki dasar kuat untuk melindungi wilayah hidup mereka dari aktivitas penangkapan ilegal dan destruktif yang dilakukan nelayan dari luar pulau. Di sinilah pentingnya hak tenurial yang mencakup hak akses, manfaat, kontrol, penegakan, hingga transformasi wilayah sebagai dasar pengakuan dan perlindungan,” kata Nirwan.

Sebagai langkah strategis, para pihak merekomendasikan penggunaan jalur integrasi Kawasan Konservasi Daerah (KKD) sebagai bentuk legalisasi dan ruang advokasi kebijakan untuk pengakuan hak kelola masyarakat. Berdasarkan Perda No. 3/2022 tentang RTRW Sulsel, wilayah pencadangan KKD Pulau Lanjukang seluas 1.654,38 hektar.

Saat ini, Forum Pasibuntuluki menyepakati luasan area buka tutup mencapai 400 hektar mencakup tiga lokasi. Area itu akan mereka coba integrasikan dalam aturan itu. “Forum Pasibuntuluki resmi terlibat dalam pokja penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi KKD Lanjukang. Ini penting untuk memperkuat legitimasi hak kelola masyarakat secara hukum,” katanya.

*Wahyu Chandra - 23 Apr 2025*



## Jalan Panjang Jaga Laut Sulawesi Selatan

Perairan Sulawesi menyimpan kekayaan sumber daya ikan begitu melimpah. Masalahnya, wilayah ini juga acapkali menjadi sasaran penangkapan ikan merusak (*destructive fishing*), bahkan sejak lama, mulai dari pakai racun hingga bom ikan.

Munsi Lampe, Guru Besar Antropologi Maritim Universitas Hasanuddin, mengatakan, *destructive fishing* tidak sekadar soal alat tangkap juga sistem sosial. “Ini soal cara orang hidup dari laut, dan bagaimana praktik-praktik yang merusak bisa bertahan karena didukung relasi sosial yang kuat,” katanya dalam diskusi diseminasi riset di Universitas Hasanuddin, Makassar, belum lama ini.

Sepanjang pengamatannya, praktik penangkapan ilegal itu sudah berlangsung sejak puluhan tahun. Para nelayan jamak menggunakan alat tangkap yang berpotensi merusak. Mulai dari bom ikan, bius, cantrang, bahkan palu dan linggis untuk mengambil ikan-ikan karang seperti lobster, hingga siput mata tujuh. “Praktik-praktik ini bukan sekadar penyimpangan, melainkan bagian dari sistem kehidupan. Mereka belajar dari orang tua mereka, dari teman-temannya, dan dari kebutuhan yang tak pernah selesai,” katanya.

Dia mengatakan, ada tiga wilayah penting di Sulsel yang paling banyak alami tekanan karena *destructive fishing*, yakni, Kepulauan Spermonde, Taka Bonerate, dan Pulau Sembilan. Ledakan bom, bius, dan alat tangkap destruktif lainnya telah membuat gugusan karang di kawasan ini nyaris hancur. “Kita pernah punya karang yang sehat. Tapi sekarang, di banyak titik, yang tersisa hanya reruntuhan putih yang memutih perlahan.”

Struktur sosial yang berlaku berkontribusi terhadap situasi itu. Dia menyebut, bagaimana relasi ponggawa dan sawi, patron dan anak buah, masih sangat dominan di komunitas nelayan. Ponggawa menyediakan modal, alat tangkap, bahkan jaminan sosial. Sebagai gantinya, sawi memberi loyalitas. Bahkan saat harus menggunakan bom dan bius. “Ketika ponggawa bilang pakai bom, anak buah akan menurut. Mereka tidak merasa sedang merusak. Mereka sedang bertahan hidup dalam

sistem yang sudah lama berjalan. Mereka tidak merasa bersalah, karena memahami laut sebagai berkah yang boleh diambil siapa saja. Kalau ada kerusakan, itu urusan nanti, bukan sekarang,” katanya.

### **Salah pendekatan**

Munsi menyoroti berbagai pendekatan pengelolaan wilayah pesisir justru gagal karena mengabaikan realitas sosial dan historis komunitas. Hal itu, terjadi lantaran program kerap mengabaikan suara komunitas lokal. Padahal, katanya, nelayan punya pengetahuan kaya tentang laut.

Di banyak komunitas nelayan, terdapat pranata-pranata lokal yang sesungguhnya bisa menjadi landasan kuat untuk membangun tata kelola perikanan yang adil dan berkelanjutan. Salah satunya, penguasaan lokasi tangkap berdasar kearifan lokal, seperti pengakuan atas *taka*, habitat ikan, yang diwariskan secara turun-temurun. “Kalau kearifan seperti ini diperkuat, difasilitasi dengan pendekatan yang partisipatif, maka kita tak perlu lagi repot-repot mendatangkan pengawasan dari luar. Masyarakat sendiri yang akan menjaga lautnya,” katanya.

Masyarakat tidak bisa hanya menjadi objek intervensi proyek-proyek konservasi. Mereka harus terlibat sejak awal, mendapat ruang merumuskan sendiri prioritas dan kebutuhan mereka. Dalam konteks Pulau Langkai dan Lanjukang, kegiatan buka-tutup wilayah tangkap yang sedang YKL Indonesia dorong bisa menjadi referensi awal. Program ini memungkinkan masyarakat menentukan waktu kapan laut boleh dimanfaatkan, dan kapan harus ditutup untuk pemulihan ekosistem. “Buka-tutup ini bukan sekadar soal rotasi wilayah tangkap. Ini adalah proses pendidikan sosial-ekologis. Masyarakat belajar bahwa laut itu punya batas daya dukung, dan kalau kita hancurkan terus-menerus, dia akan berhenti memberi,” kata Munsi.

Pendidikan kontekstual yang tidak hanya mengajarkan anak-anak membaca buku, juga membaca arus, mengenali musim, dan memahami perubahan ekosistem. Sebab, itu menjadi medium dalam mentransformasikan nilai bagaimana generasi muda memandang laut. Gagal mendidik generasi baru untuk peduli pada laut. “Maka kita sedang menggali kubur kita sendiri.”

Tak kalah penting, kata Mungsi, mengapresiasi nelayan yang berani berinovasi dan beralih dari praktik merusak ke cara-cara yang lebih lestari. Penghargaan sosial dan pengakuan publik bisa menjadi pemicu transformasi, menggantikan citra “jagoan laut” yang selama ini lekat dengan penggunaan bom dan bus.

### Narasi positif

Dia menekankan pentingnya membangun narasi tandingan—bahwa nelayan bukan pelaku kerusakan, tetapi bisa menjadi garda depan konservasi jika mendapatkan ruang. Selama ini, banyak dari mereka hanya menjadi penonton program. “Mereka capek disuruh ikut pelatihan, tapi tak pernah diajak bicara soal desain program.”

Dalam konteks inilah, pendekatan *etnografi kolaboratif* menjadi krusial. Baginya, ini bukan hanya metode riset, juga cara membangun empati, menyelami logika hidup nelayan, dan merancang perubahan dari bawah. Mungsi yakin, jika pendekatan seperti ini berjalan konsisten, maka praktik seperti buka-tutup wilayah tangkap tak hanya akan menjadi kebijakan teknis juga bagian dari gerakan budaya, budaya baru pesisir yang menjunjung keberlanjutan, gotong royong, dan tanggung jawab antargenerasi.

Erwin, Ketua Forum Pengelola Sistem Buka dan Tutup Gurita Lanjukang dan Langkai (Passibuntuluki), pada kesempatan ini menyoroti tantangan dalam melaksanakan buka-tutup, seperti keterbatasan fasilitas pengawasan serta tanda batas yang kerap hilang. Dia berharap, dukungan pemerintah provinsi maupun kota, seperti janji mereka. “Bagaimana kami bisa melakukan pengawasan dengan berbagai keterbatasan tersebut?” katanya.

Alief Fachrul Raazy, Program Manajer YKL Indonesia, berharap, inisiatif konservasi berbasis masyarakat yang berlangsung di Pulau Langkai dan Lanjukang bisa diikuti oleh pulau-pulau sekitar. Dengan begitu, kawasan-kawasan yang akan terlindungi, terutama dari praktik *destructive fishing* makin banyak.

Wahyu Chandra - 24 Juni 2025



## **Belajar dari Langkai dan Lanjukang, Masyarakat Pulau Bonetambu Siap Kelola Laut Sendiri**

Sepuluh masyarakat dari Pulau Bonetambu yang terdiri dari nelayan, pengumpul dan tokoh masyarakat melakukan kunjungan belajar ke Pulau Langkai dan Lanjukang Kota Makassar, dua pulau yang dikenal sebagai pelopor sistem pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat di Kepulauan Spermonde.

Kegiatan yang berlangsung pada 24–26 Juli 2025 ini merupakan bagian dari program Proteksi GAMA (Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat) yang diinisiasi oleh Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia dengan dukungan Burung Indonesia.

Dalam kunjungan ini, para nelayan Bonetambu berdiskusi langsung dengan Forum Pasibuntuluki, kelompok pengelola lokal yang telah sukses menerapkan sistem buka-tutup zona tangkap gurita sejak 2021.

Sistem ini tidak hanya membantu memulihkan habitat laut dan meningkatkan hasil tangkapan, tapi juga menjadi bukti bahwa pengelolaan wilayah laut yang partisipatif bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami datang untuk belajar langsung. Bagaimana cara menentukan lokasi penutupan, menghadapi penolakan, hingga melibatkan perempuan dan pemuda dalam pengawasan,” ujar Darmawati salah satu peserta kunjungan yang juga Pengumpul di Pulau Bonetambu.

Ia juga mengapresiasi peran perempuan di Langkai-Lanjukang yang aktif mendukung kegiatan patroli hingga mengolah hasil tangkapan menjadi sambel gurita dan abon ikan.

Salah satu sesi yang menarik adalah kunjungan ke zona tangkap yang sedang ditutup, di mana peserta menyaksikan langsung bagaimana nelayan Langkai dan Lanjukang menjaga kawasan secara kolektif. Ketua

## MENGGURITA DI PULAU

Forum Pasibuntuluki, Erwin, menjelaskan bahwa sistem buka-tutup dilakukan tiga bulanan.

“Dampaknya tidak langsung terasa di awal, tapi sekarang hasil gurita lebih besar, ikan makin banyak, dan karang sehat kembali,” ujarnya.

Menurut peserta lain, Sukri, pembelajaran yang paling penting adalah bagaimana membangun kepercayaan dan komitmen bersama antarwarga. “Awalnya banyak yang menolak, bahkan dari keluarga sendiri. Tapi mereka sabar, terus beri pemahaman, sampai akhirnya semua ikut menjaga laut,” katanya.

Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi reflektif, pengisian pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman, serta penyusunan rencana awal penerapan sistem serupa di Pulau Bonetambu. Beberapa ide yang muncul termasuk pembentukan kelompok pengelola, pencatatan hasil tangkapan, hingga pemasangan pelampung sebagai tanda zona larangan tangkap.



*Nelayan Pulau Bonetambu kunjungan belajar ke Pulau Langkai dan Lanju kang Kota Makassar. Foto: YKL Indonesia.*



*Nelayan Pulau Bonetambu kunjungan belajar ke Pulau Langkai dan Lanjukang Kota Makassar. Foto: YKL Indonesia.*

Muhammad Fauzi Rafiq, Koordinator Pemberdayaan dan Advokasi YKL Indonesia yang mendampingi kunjungan ini, menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam proses belajar antar komunitas.

“Kegiatan ini memberi ruang bagi nelayan untuk bertukar pengalaman dan merefleksikan strategi yang bisa diadaptasi sesuai kondisi lokal. Ini bukan sekadar kunjungan, tapi proses membangun kesadaran kolektif,” ujar Fauzi.

Langkah selanjutnya adalah mendampingi nelayan Bonetambu dalam menerapkan model yang sesuai dengan konteks lokal, termasuk pelibatan pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan dinas terkait. Diharapkan, semangat dari Langkai dan Lanjukang bisa menular dan menjalar ke seluruh wilayah di Kepulauan Spermonde.

*Nirwan Dessibali – 26 Juli 2025*

# MENGGURITA DI PULAU



## Nelayan Bonetambu Terapkan Buka Tutup Tangkap Gurita

Suasana di Pulau Bonetambu, salah satu pulau kecil di gugusan Kepulauan Sangkarrang, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), itu tampak lebih ramai dari biasanya, Sabtu (11/9/25). Orang berbondong-bondong menuju dermaga, tempat beberapa perahu nelayan tengah bersiap melaut.

Hari itu, menjadi momen penting bagi warga dan nelayan. Mereka tengah menyaksikan lahirnya sebuah kesepakatan bersejarah: penerapan sistem buka-tutup area penangkapan gurita seluas 71,44 hektar.

Penutupan sementara itu berlangsung selama tiga bulan. Mulai dari 11 September-11 Desember 2025. Selama periode itu, tidak ada seorang pun nelayan boleh menangkap ikan di area itu dengan komitmen pengawasan bersama.

Kesepakatan itu para pihak tandatangani bersama. Dari nelayan, pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, sektor swasta, media, serta berbagai pemangku kepentingan yang hadir dalam seremoni sederhana. Usai penandatanganan, nelayan bersama aparat dan lembaga pendukung bergerak ke laut membawa pelampung penanda batas kawasan.

Ritual pemberkatan oleh tokoh adat menandai pemasangan tanda batas. Doa-doa dipanjatkan, sebagai bentuk syukur sekaligus permohonan agar laut tetap memberi kehidupan. Bagi masyarakat pulau, laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang spiritual yang menjaga keseimbangan hidup mereka.

Haji Gassing, tokoh masyarakat Bonetambu, semringah. Dia bilang, sistem ini memberi harapan baru bagi keberlanjutan gurita dan kelestarian terumbu karang. “Kami sudah lama berupaya menjaga

## MENGGURITA DI PULAU

karang di Bonetambu. Dengan adanya kesepakatan ini, pengawasan bisa lebih teratur dan melibatkan semua pihak,” katanya.

Meski begitu, penerapan buka tutup ini bukan tanpa tantangan. Penggunaan bom dan bius ikan masih kadang terjadi. Baginya, sistem buka tutup memberi jeda pada ekosistem laut untuk memperbaiki diri demi kelestarian sumber daya ikan.

Pemerintah daerah pun menyambut positif. Andi Asdhar, Camat Kepulauan Sangkarrang, menyebut kesepakatan ini sebagai titik balik dalam menghentikan praktik destruktif. “Masih ada praktik pemboman ikan yang merusak ekosistem. Sistem buka-tutup ini menjadi solusi nyata agar laut pulih dan nelayan kecil punya masa depan.”

Achmad Saenal, Kepala Seksi Pengawasan CDK Mamminasata, DKP Sulsel, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. “YKL telah membantu nelayan dengan perhatian luar biasa. Namun tantangan terbesar ada pada pengawasan. Jika masyarakat merasakan manfaat sistem ini, mereka sendiri yang akan menjaga. Itu yang harus kita kuatkan,” katanya.



*Penandatanganan kesepakatan sistem buka tutup area tangkap di Pulau Bonatambu. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*

## Kepemilikan atas ruang laut

Senada Muhammad Fauzi Rafiq, Koordinator Pemberdayaan & Advokasi Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia, sampaikan. Menurut dia, inti dari sistem buka-tutup bukan sekadar konservasi, melainkan kepemilikan masyarakat atas ruang lautnya. “Dengan memberi waktu gurita berkembang biak dan melindungi terumbu karang, nelayan justru mendapatkan hasil lebih baik. Bukti dari Langkai dan Lanjukung menjadi inspirasi kuat bagi Bonetambu,” katanya.

Nirwan Dessibali, Direktur Eksekutif YKL Indonesia, menekankan, arti penting kolaborasi. Menurut dia, resiliensi pesisir tidak lahir dari satu pihak saja. Nelayan, pemerintah, akademisi, swasta, dan semua pihak terkait harus bekerja sama dalam posisi setara. “Inilah cara agar laut tetap menjadi ruang hidup yang adil dan berkelanjutan.”

Dukungan juga datang dari aparat kepolisian. Abustan, perwakilan Ditpolair Polda Sulsel, memastikan pihaknya siap mengawasi perairan Bonetambu. “Kami akan melindungi nelayan yang sudah berkomitmen, agar aturan ini berjalan efektif.”

Dari sektor swasta, Kalma, Factory Manager PT. Prima Bahari Inti Lestari, menilai, sistem buka-tutup memberi keuntungan ekonomi. “Dengan buka-tutup, kualitas gurita lebih terjaga, ukurannya sesuai standar, dan rantai pasarnya lebih pendek. Nilai ekonominya langsung dirasakan nelayan, bukan hanya perantara. Kami siap berkolaborasi lebih erat,” ujarnya.

Yang menarik, proses ini juga melibatkan perempuan. Mereka bukan hanya sebagai pendukung, tetapi juga bagian dari rantai produksi. Seorang istri nelayan menyampaikan harapannya. “Harga gurita sekarang lebih baik, tapi kami juga butuh dukungan tambahan seperti peralatan tangkap. Dengan begitu hasil bisa lebih maksimal.”

Testimoni ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem tidak hanya menyentuh ranah ekologi, tetapi juga ranah sosial-ekonomi rumah tangga nelayan.

## MENGGURITA DI PULAU

Menurut Nirwan, kesepakatan ini menegaskan hak kelola masyarakat lokal. Dengan tanda batas berupa pelampung dan bendera, masyarakat dapat lebih mudah melakukan pengawasan. “Kami berharap sistem ini menjadi model pengelolaan perikanan berkelanjutan yang bisa direplikasi di pesisir Sulawesi Selatan,” katanya.



*Ritual adat untuk menandai dimulainya sistem buka tutup area tangkap di Pulau Bonetambu. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*

### **Penguatan ekonomi**

Model ini, katanya, sukses di Pulau Langkai dan Lanjukang. Hasilnya, nyata, ekosistem terumbu karang membaik, populasi penyu meningkat, dan pendapatan nelayan melonjak hingga 56,6 persen berkat tangkapan gurita yang lebih besar dan bernilai tinggi.

Cerita dari Langkai dan Lanjukang menjadi motivasi kuat bagi Bonetambu. Di Langkai, misal, sebelum sistem buka-tutup, gurita rata-rata berukuran kecil dan harga rendah. Setelah jeda tiga bulan, ukuran gurita membesar, harga naik, dan nelayan bisa menjual langsung ke pasar ekspor. Hasil serupa diharapkan terulang di Bonetambu, yang ekosistem karangnya relatif masih baik meski tekanan penangkapan tinggi.

Kalau menilik lebih jauh, sistem buka-tutup ini sesungguhnya lahir dari pengetahuan lokal nelayan. Mereka paham bahwa gurita butuh waktu untuk berkembang biak. Namun pengetahuan itu sering berbenturan dengan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Dengan dukungan YKL dan berbagai pihak, pengetahuan ini makin kuat melalui kesepakatan formal, menjadikannya instrumen kolektif yang mengikat semua pihak.

Bagi masyarakat Bonetambu, ini bukan hanya soal gurita. Sistem buka-tutup memberi mereka rasa memiliki terhadap laut, rasa percaya diri bahwa mereka bisa mengelola ruang hidupnya sendiri, tanpa menunggu aturan dari atas. "Ini bentuk demokrasi ekologis, di mana keputusan diambil berdasarkan musyawarah, dipandu adat, dan dikuatkan dukungan lintas sektor."

Meski begitu, jalan ke depan tentu tidak mudah. Tantangan pengawasan, keterbatasan peralatan, hingga ancaman praktik ilegal seperti bom dan bius ikan tetap menghantui. Di sinilah pentingnya sinergi, katanya, antara aparat, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta harus memastikan komitmen mereka tidak berhenti pada seremoni, tetapi hadir secara konsisten mendukung nelayan.

Bagi Nirwan, kesepakatan buka-tutup Bonetambu adalah secercah harapan bahwa laut masih bisa dipulihkan, bahwa masyarakat pesisir masih bisa berdaya dengan pengetahuan mereka sendiri. Jika model ini berhasil, ia bisa menjadi inspirasi lebih luas bagi pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa. "Sistem buka tutup Bonetambu menjadi bukti bahwa kolaborasi nyata mampu menghadirkan solusi bagi kelestarian ekosistem laut sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir."

Praktik di Bonetambu, katanya, bukan hanya menjadi cerita tentang gurita dan terumbu karang, juga mengenai masyarakat yang berani mengambil alih masa depannya. "Sebuah pulau kecil dengan suara besar, yang menegaskan bahwa laut harus dijaga bersama, agar tetap menjadi sumber kehidupan yang adil, lestari, dan berkelanjutan."

*Wahyu Chandra - 18 September 2025*



## Jambore Nelayan dan Harapan bagi Pesisir dan Laut

Siang itu matahari berdiri hampir tepat di atas kepala ketika perahu-perahu kayu mulai mendekati Pulau Lanjukang. Mesin perahu meraung pelan, memecah permukaan laut Spermonde yang berkilau, sementara angin laut berembus membawa aroma asin yang khas.

Dari kejauhan, pulau kecil itu tampak sederhana. Hampan pasir terang membentang di tepi pantai, kontras dengan birunya laut. Beberapa pohon kelapa berdiri miring, seolah mengikuti arah angin yang tak pernah benar-benar berhenti. Di bagian lain pulau, cemara pantai menjulang tinggi, menaungi rumah-rumah kayu yang menghadap langsung ke laut lepas.

Pulau Lanjukang biasanya sunyi. Aktivitas berjalan pelan, mengikuti ritme ombak dan angin. Namun pada akhir September 2025, suasana itu berubah. Satu per satu perahu merapat di bibir pantai. Sebagian besar peserta datang dari Dermaga Kayu Bangkoa di Kota Makassar, menempuh perjalanan laut sekitar tiga jam. Sejak pagi mereka telah berkumpul di dermaga, menunggu waktu yang tepat untuk menyeberang menuju pulau.

Di atas perahu yang sama, nelayan dari berbagai wilayah pesisir duduk berdampingan, dari Kepulauan Tanakeke di Kabupaten Takalar, Barrang Caddi di Kota Makassar, Lantebung, hingga perwakilan nelayan dari Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah yang datang dari jarak yang lebih jauh. Mereka tidak hanya membawa perlengkapan, tetapi juga pengalaman, cerita, dan persoalan yang berbeda-beda tentang laut.

Namun tidak semua peserta datang dari arah Makassar. Dari barat laut, beberapa perahu kecil tampak mendekat dari Pulau Kapoposang. Sementara dari timur laut, perahu-perahu nelayan dari Pulau Langkai

dan Pulau Bonetambu juga merapat perlahan di tepi pantai Lanjukang, menambah keramaian yang jarang terjadi di pulau ini.

Nelayan, kelompok masyarakat pengawas, aparat keamanan, penyuluh perikanan, hingga aktivis lingkungan turun dari perahu mereka. Tenda-tenda mulai didirikan di bawah pepohonan, peralatan kegiatan diturunkan, dan percakapan-percakapan kecil mulai terjalin. Nelayan yang sebelumnya belum saling mengenal mulai menyapa, bertukar cerita, dan saling bertanya tentang kondisi laut di wilayah masing-masing.

Pulau Lanjukang yang biasanya tenang kini berubah menjadi ruang pertemuan. Di pulau kecil itulah, selama tiga hari, mereka berkumpul dalam sebuah kegiatan bernama Jambore Nelayan 2025, yang berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober. Sebuah pertemuan yang tidak hanya mempertemukan orang, tetapi juga mempertemukan pengalaman, pengetahuan, dan kegelisahan tentang laut yang sama-sama mereka hidupi.



*Suasana diskusi terbuka, saat para nelayan dan peserta berbagi pengalaman tentang pengelolaan laut. Foto: Panitia Jambore 2025.*

## Ruang Pertemuan yang Jarang Terjadi

Di Pulau Lanjukang, pertemuan itu bukan sekadar berkumpul. Sekitar 110 orang hadir. Nelayan, kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), pemerintah daerah, aparat penegak hukum, penyuluh perikanan, hingga organisasi masyarakat sipil dalam satu ruang yang selama ini jarang benar-benar ada di wilayah pesisir.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia bersama Burung Indonesia, Yayasan Hutan Biru, Fauna & Flora Indonesia, dan Lembaga Maritim Nusantara (LEMSA), bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Sejumlah institusi turut hadir, mulai dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Cabang Dinas Kelautan Mamminasata, Cabang Dinas Kelautan Pangkajene dan Kepulauan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, hingga Dinas Perikanan Kota Makassar. Aparat keamanan seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Polairud Polda Sulsel juga ikut duduk bersama para nelayan.

Namun yang membuat pertemuan ini berbeda bukan hanya jumlah peserta atau banyaknya lembaga yang hadir, melainkan ruang percakapan yang terbuka. “Jarang sekali kita bisa duduk bersama seperti ini. Biasanya kalau bertemu aparat atau pemerintah itu karena ada masalah di laut,” kata Andika, nelayan dari Tanakeke.

Di Lanjukang, pertemuan itu berlangsung tanpa tekanan konflik atau penegakan hukum. Untuk pertama kalinya bagi sebagian peserta, nelayan tidak datang sebagai pihak yang diperiksa atau dilaporkan, tetapi sebagai pihak yang berbicara tentang laut, tentang pengalaman mereka, dan tentang perubahan yang mereka rasakan.

# JAMBORE NEL

29 SEPTEMBER - 01 OKTOBER 2025

PULAU LANJUKANG, KOTA MAKASSAR



*Erwin RH, nelayan dari Pulau Langkai sekaligus Ketua Forum Pasibuntuluki, menyampaikan pengalaman pengelolaan perikanan berbasis masyarakat, termasuk praktik sistem buka-tutup yang mendorong pemulihan ekosistem dan peningkatan hasil tangkapan. Foto: Panitia Jambore 2025.*

## Laut yang Menghidupi Masyarakat

Bagi masyarakat pulau dan pesisir, laut bukan sekadar bentang alam. Ia adalah ruang hidup yang membentuk cara pandang sejak kecil. Anak-anak belajar membaca arah angin dari ayah mereka, mengenali musim dari cerita orang tua, dan memahami arus laut dari pengalaman melaut yang diwariskan turun-temurun.

Namun laut yang mereka kenal perlahan berubah. Erwin RH, nelayan dari Pulau Langkai sekaligus Ketua Forum Pasibuntuluki, mengatakan perubahan itu kini semakin terasa. Menurutnya, nelayan harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan ikan. “Dulu dekat sekali dari pulau sudah bisa dapat ikan. Kalau karang rusak, ikan juga tidak akan kembali cepat,” katanya.

Kerusakan terumbu karang menjadi salah satu titik krusial. Ekosistem yang selama ini menjadi tempat berlindung dan berkembang biak berbagai spesies ikan perlahan hilang. Dampaknya tidak berhenti pada lingkungan, tetapi merambat langsung ke kehidupan masyarakat pesisir.

Ketika karang rusak, populasi ikan menurun. Nelayan harus melaut lebih jauh, biaya bahan bakar meningkat, sementara hasil tangkapan belum tentu bertambah. Dalam jangka panjang, tekanan ini membentuk lingkaran yang sulit diputus, antara kebutuhan ekonomi dan kondisi ekosistem yang terus menurun.

Namun di tengah situasi itu, muncul upaya perbaikan dari masyarakat sendiri. Di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang, nelayan mulai menerapkan tata kelola berbasis masyarakat melalui sistem buka-tutup penangkapan gurita. Area tangkap ditutup dalam periode tertentu untuk memberi waktu bagi ekosistem pulih.

Hasilnya mulai terlihat. Gurita semakin mudah didapat dengan ukuran yang lebih besar, sementara terumbu karang menunjukkan tanda-tanda pemulihan alami. "Pembelajaran ini yang kami akan bagikan ke peserta," kata Erwin saat memberikan sambutan pembukaan.

Di tengah berbagai tekanan terhadap laut, pengalaman-pengalaman seperti inilah yang menjadi penting, bahwa di tangan masyarakat sendiri, upaya menjaga laut tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga mulai menunjukkan hasil.

### **Belajar Bersama dari Laut**

Di bawah tenda sederhana yang didirikan di tepi pantai, para nelayan duduk melingkar. Tidak ada podium tinggi, tidak ada jarak antara pembicara dan peserta. Yang mengisi ruang itu adalah cerita tentang laut,

tentang tangkapan, dan tentang sesuatu yang perlahan mereka rasakan mulai hilang.

Kegiatan diawali dengan rangkaian pembukaan yang sedikit formal. Pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari masyarakat setempat, pelaksana kegiatan, hingga perwakilan pemerintah. Namun setelah itu, suasana perlahan berubah menjadi lebih cair. Peserta saling memperkenalkan diri, memahami agenda kegiatan, dan mengenal area camp Jambore Nelayan yang akan menjadi ruang bersama selama tiga hari.

Rangkaian kegiatan yang padat kemudian berjalan dengan ritme yang sengaja dibuat santai. Di sela-sela materi, peserta diajak mengikuti permainan seperti *Fisheries Sustainable Games*, yang bukan sekadar hiburan, tetapi juga menjadi cara lain untuk memahami konsep keberlanjutan perikanan.

Setelah itu, peserta mulai masuk ke materi yang lebih teknis: pengenalan *Endangered, Threatened, and Protected (ETP) Species* serta *bycatch*. Mereka diajak mengidentifikasi spesies-spesies dilindungi yang tersebar di wilayah masing-masing, sekaligus memahami bagaimana cara penanganannya ketika tertangkap secara tidak sengaja.

Jambore ini memang dirancang sebagai ruang belajar kolektif. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat dalam diskusi dan simulasi lapangan. Pada sesi awal, mereka belajar mengenali spesies dilindungi dan memahami dampak dari tangkapan sampingan terhadap ekosistem laut.

Bagi sebagian nelayan, pengetahuan ini membuka perspektif baru. Selama ini, banyak dari mereka tidak menyadari bahwa spesies yang tertangkap dalam aktivitas sehari-hari ternyata termasuk dalam kategori dilindungi.

Pada hari pertama, diskusi tentang ETP Species menjadi salah satu sesi yang paling hidup. Para nelayan menyebutkan berbagai biota laut yang mereka temui—penyu, dugong, hiu paus, lumba-lumba, hingga kima dan mulai mengaitkannya dengan kondisi laut di wilayah masing-masing.

Jamal, nelayan dari Pulau Kapoposang, mengatakan bahwa perairan di wilayahnya masih menjadi habitat bagi berbagai spesies tersebut, meski jumlahnya tidak sebanyak dulu. “Kalau penyu tidak ada, karang bisa rusak karena alga tumbuh terlalu banyak,” katanya, menjelaskan bagaimana satu spesies bisa berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang.

Di Tanakeke, nelayan menyebut penyu sisik, dugong, dan kuda laut sebagai biota yang masih ditemukan, tetapi menghadapi tekanan dari aktivitas perdagangan dan penangkapan. Sementara di Barrang Caddi, penyu sisik masih sering dijumpai di sekitar pulau, meski ancaman terhadapnya datang dari pemanfaatan cangkang sebagai aksesoris.

Diskusi ini perlahan membuka kesadaran bersama. Bahwa banyak spesies yang selama ini mereka temui bukan sekadar bagian dari tangkapan, tetapi bagian dari sistem yang menjaga laut tetap hidup.

Saat malam tiba, suasana belajar tidak berhenti. Di tepi pantai, layar sederhana dipasang. Para nelayan duduk berhadapan dengan laut, menyaksikan film dokumenter dari berbagai lokasi. Film-film itu menampilkan kehidupan masyarakat pesisir, tantangan dalam mengelola laut, serta berbagai solusi yang telah dicoba di tempat lain.

Namun yang terjadi setelah film selesai justru menjadi bagian paling penting. Diskusi panjang pun dimulai.



*Diskusi malam mempertemukan nelayan, aparat, dan fasilitator dalam satu lingkaran untuk membahas pengalaman dan tantangan pengawasan, serta langkah bersama menghentikan praktik destructive fishing. Foto: Panitia Jambore 2025.*

### **Ancaman Lama yang Belum Hilang**

Namun di balik suasana belajar dan berbagi itu, satu kegelisahan terus muncul berulang, hampir di setiap diskusi, seolah menjadi benang merah yang tak pernah benar-benar putus. Di bawah tenda jambore, hingga larut malam, para nelayan kembali membicarakan hal yang sama "destructive fishing". Praktik penangkapan ikan dengan bom dan bus/bahan kimia itu, yang selama bertahun-tahun menjadi ancaman, ternyata masih terus ditemukan di sejumlah perairan Spermonde.

Bagi sebagian peserta, ini bukan sekadar cerita. Arif, nelayan dari Mattiro Baji, Tanakeke, yang juga aktif dalam kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), pernah menyaksikan langsung dampaknya. "Waktu survei karang, kami menemukan nelayan dari luar daerah melakukan pengeboman. Karang yang hancur itu bisa puluhan tahun baru kembali," katanya.

Ledakan bom ikan menghancurkan struktur karang yang terbentuk selama ratusan tahun hanya dalam hitungan detik. Sekali hancur, ekosistem yang menopang kehidupan ikan itu membutuhkan waktu sangat lama untuk pulih, jika tidak hilang sepenuhnya.

Namun kerusakan itu tidak berhenti pada ekosistem. Di banyak tempat, praktik ini juga memicu konflik antar nelayan. Nelayan pancing kerap berselisih dengan nelayan yang menggunakan alat tangkap tertentu. Ketegangan juga muncul antara nelayan lokal dan nelayan dari luar daerah yang masuk ke wilayah tangkap. “Kadang konflik terjadi karena wilayah tangkap,” kata Arif.

Situasi ini mendorong sebagian komunitas nelayan mulai menyusun aturan lokal—menetapkan zona tangkap, membangun kesepakatan bersama, hingga mencoba sistem pengelolaan berbasis masyarakat sebagai cara meredam konflik sekaligus menjaga sumber daya.



*Peserta Jambore Nelayan 2025 mengikuti permainan Fisheries Sustainable Games. Melalui aktivitas interaktif ini, nelayan belajar memahami prinsip-prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan cara yang partisipatif dan menyenangkan. Foto: Panitia Jambore 2025.*

### Pengawasan Laut oleh Masyarakat

Di tengah keterbatasan pengawasan formal, masyarakat di beberapa pulau mulai mengambil peran lebih aktif. Mereka membentuk kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), sebuah upaya kolektif untuk menjadi “mata dan telinga” di laut.

Namun peran itu tidak datang tanpa tantangan. Erwin, nelayan yang juga terlibat dalam pengawasan, mengatakan bahwa upaya mereka sering kali terhenti di tengah jalan. “Kadang kami sudah foto, sudah catat, tapi laporan tidak ditindaklanjuti,” katanya.

Menurutnya, proses hukum terhadap pelaku destructive fishing kerap tidak transparan. Nelayan yang melapor justru tidak lagi dilibatkan dalam proses lanjutan. “Nelayan yang melapor kadang tidak dilibatkan lagi dalam proses hukum,” ujarnya.

Meski demikian, sebagian masyarakat tetap memilih untuk terus melakukan patroli secara mandiri. “Tantangan menjadi pengawas laut tidak mudah. Tapi kalau kita tidak lakukan, siapa lagi?” kata seorang anggota Pokmaswas dari Kapoposang.

Persoalan ini tidak hanya dibicarakan antar nelayan. Aparat keamanan turut hadir dan terlibat dalam diskusi, membuka ruang percakapan yang selama ini jarang terjadi di lapangan. Syamsuddin, perwakilan Polairud Polda Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa penegakan hukum di laut membutuhkan bukti yang kuat agar dapat diproses. “Kalau mau proses hukum, harus ada saksi dan bukti,” katanya kepada para peserta.

Karena itu, ia mendorong masyarakat untuk mulai memperkuat dokumentasi di lapangan, baik melalui foto, video, maupun pencatatan lokasi kejadian. “Kalau sudah ada bukti kuat, kami bisa melakukan penindakan,” ujarnya.

Di sisi lain, pendekatan yang digunakan tidak selalu harus represif. Babinsa Kelurahan Barrang Caddi, Syahrul, menilai bahwa banyak persoalan di laut justru berakar pada kesalahpahaman dan konflik antar nelayan. Dalam kondisi seperti itu, pendekatan persuasif sering menjadi langkah awal yang lebih efektif. “Kalau bisa diselesaikan di tingkat masyarakat, itu lebih baik,” katanya.

Namun ia juga menegaskan batasnya. Ketika pelanggaran sudah masuk kategori berat, seperti penggunaan bom ikan, maka proses hukum tetap harus berjalan. “Kalau sudah merusak lingkungan dan merugikan banyak orang, tentu harus ada tindakan.”

Di antara keterbatasan kewenangan, lemahnya tindak lanjut, dan realitas di lapangan yang kompleks, para nelayan berada di posisi yang tidak mudah. Mereka adalah pihak yang paling dekat dengan laut, yang pertama melihat kerusakan, sekaligus yang paling merasakan dampaknya.

Beberapa nelayan mengatakan bahwa cerita dalam film terasa sangat dekat dengan pengalaman mereka sendiri. Percakapan berkembang, kadang pelan, kadang emosional. Banyak dari mereka merasa bahwa pengalaman yang selama ini mereka jalani jarang benar-benar didengar.

Pada malam pertama itu pula, peserta mendiskusikan evaluasi form pemantauan yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya. Mereka membedah hasil pengamatan di lapangan, berbagi pengalaman saat melakukan pemantauan, mengungkapkan kendala yang dihadapi, hingga memberikan masukan untuk penyempurnaan sistem ke depan.

Pengetahuan tidak datang dari satu arah. Ia tumbuh dari pengalaman, dari pertemuan, dan dari kesadaran bahwa laut yang mereka hadapi hari ini adalah laut yang sama dengan masalah yang serupa, dan mungkin, dengan solusi yang bisa mereka bangun bersama.



*Interaksi nelayan di perairan sekitar Pulau Lanjukang, saat kegiatan simulasi patroli. Selain memantau aktivitas penangkapan, peserta juga membangun komunikasi langsung dengan nelayan lain untuk meningkatkan kesadaran menjaga ekosistem laut. Foto: Panitia Jambore 2025.*

### **Simulasi Patroli Bersama**

Pagi di Pulau Lanjukang dimulai lebih awal dari biasanya. Saat cahaya matahari baru muncul di permukaan laut, para peserta sudah berkumpul di tepi pantai. Beberapa berdiri menghadap horizon, menikmati matahari terbit, sebelum kemudian kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama. Ritme sederhana yang menjadi pembuka hari kedua jambore.

Namun setelah itu, suasana berubah menjadi lebih serius. Para peserta mulai mengikuti pelatihan pemantauan laut. Mereka belajar bagaimana mencatat aktivitas kapal, mengenali jenis alat tangkap, hingga mendokumentasikan berbagai kejadian yang ditemui di laut. Bagi sebagian nelayan, ini bukan hal baru. Tetapi bagi yang lain, ini menjadi cara baru melihat laut. Bukan hanya sebagai ruang tangkap, tetapi juga ruang yang perlu diawasi.

Selain menggunakan formulir monitoring, peserta juga diperkenalkan dengan aplikasi pemetaan digital SW Maps. Melalui aplikasi ini, nelayan dapat mengambil foto sekaligus merekam titik koordinat kejadian secara langsung di lapangan.

Sahid, salah satu fasilitator pelatihan, menekankan bahwa dokumentasi yang kuat adalah kunci dalam pengawasan berbasis masyarakat. “Kalau ada foto, koordinat, dan kronologi yang jelas, laporan akan lebih kuat,” katanya.

Di titik ini, patroli tidak lagi hanya soal melihat. Ia menjadi bagian dari sistem pembuktian, sesuatu yang selama ini sering menjadi titik lemah dalam upaya penegakan hukum di laut.



*Perwakilan nelayan, aparat keamanan, dan organisasi menandatangani deklarasi “Stop Destructive Fishing & Lindungi Biota Laut” dalam Jambore Nelayan 2025 di Pulau Lanjukang, Makassar. Komitmen bersama ini menjadi langkah penting memperkuat kolaborasi lintas pihak dalam menjaga ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya pesisir. Foto: Panitia Jambore 2025.*

### Kolaborasi Menjaga Laut dan Deklarasi

Setelah kembali dari simulasi patroli, para peserta berkumpul kembali di darat. Diskusi berlanjut, namun kali ini dalam skala yang lebih besar. Pada hari kedua, jumlah peserta dan para pihak yang hadir bertambah. Perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan hadir bersama berbagai institusi lainnya. Di saat yang sama, perwakilan Rumah Sakit Labuan Baji juga datang membawa layanan kesehatan pemeriksaan gratis dan sunatan massal bagi masyarakat pulau.

Di bawah terik matahari Pulau Lanjukang, ratusan orang berkumpul menghadap laut. Nelayan, aparat, pemerintah, dan berbagai pihak berdiri dalam satu garis pandang yang sama. Di tempat itu, sesi “Stop Destructive Fishing & Lindungi Biota Laut” menjadi salah satu momen paling penting dalam Jambore Nelayan 2025.

Direktur Eksekutif YKL Indonesia, Nirwan Dessibali, membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak. Terutama di wilayah pulau yang selama ini sering berada di pinggir akses layanan.

Pesan itu kemudian diperkuat oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Ilyas. “Kalau kegiatan ini hanya mengandalkan pemerintah, itu tidak mungkin. Wilayah laut kita luas, sementara sumber daya terbatas. Karena itu, harus kolaborasi,” katanya.

Pernyataan itu tidak berdiri di ruang kosong. Ia muncul di tengah kenyataan yang terus berulang: program konservasi berjalan, tetapi praktik bom ikan masih terjadi. Ilyas menyebut pendekatan yang dibutuhkan adalah *pentahelix*, melibatkan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi sipil. Namun ia juga mengakui bahwa pendekatan yang ada selama ini belum sepenuhnya efektif. “Kita sudah tanam mangrove, transplantasi karang, tapi masih ada bom ikan. Artinya masalah belum selesai,” ujarnya.

Menurutnya, konservasi tidak bisa hanya berhenti pada larangan. “Kalau kita hanya bilang ‘jangan merusak’, itu tidak cukup. Masyarakat juga butuh solusi untuk hidup.”

Ia juga menyoroti ketimpangan yang selama ini dialami masyarakat pulau. “Pulau tidak boleh jadi alasan untuk tidak dilayani,” katanya.

Di akhir sambutannya, ia menyampaikan pesan yang lebih personal. “Kita mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi niat untuk menjaga laut itu harus dijaga.”

Momentum itu kemudian berlanjut dengan penyerahan Surat Keputusan Kelompok Masyarakat Sadar Konservasi (MASAKO) Forum Pasibuntuluki, sebuah upaya formal untuk memperkuat peran masyarakat dalam menjaga laut.

Puncaknya, Rabasiah Nutta, nelayan perempuan dari Tanakeke, berdiri membacakan deklarasi bersama. Isinya tegas: menolak praktik destructive fishing, melindungi biota laut, mendorong penegakan hukum, serta memperkuat kolaborasi lintas pihak.

Satu per satu peserta maju untuk menandatangani komitmen tersebut. Namun bagi para nelayan, deklarasi itu bukanlah akhir. “Menjaga laut itu bukan cuma soal aturan,” kata seorang peserta. “Ini soal bagaimana kita bisa tetap hidup dari laut tanpa merusaknya.”

### **Dari Simulasi ke Realitas: Wajah Ancaman di Laut**

Usai deklarasi, para peserta kembali berkumpul. Namun kali ini bukan untuk seremoni, melainkan untuk membaca ulang apa yang baru saja mereka lihat di laut. Simulasi patroli yang dilakukan di perairan sekitar Pulau Lanjukang seharusnya menjadi latihan, cara mengamati, mencatat,

dan mendokumentasikan kejadian. Tetapi di lapangan, batas antara simulasi dan kenyataan nyaris tidak ada.

Apa yang mereka temukan bukan skenario. Itu adalah situasi yang sudah lama mereka hadapi. Dalam sesi refleksi, hampir semua kelompok melaporkan hal serupa: praktik penangkapan ikan yang merusak masih berlangsung. Kelompok dari Tanakeke menemukan aktivitas pembusukan ikan di jalur patroli. "Dampaknya jelas, ikan mati dan ekosistem rusak," ujar salah satu peserta.

Di arah utara, kelompok lain mengidentifikasi indikasi penggunaan bom, sekaligus praktik bius dan tembak ikan dalam satu kawasan. "Kalau ini terus terjadi, karang hancur dan hasil tangkapan pasti turun," kata peserta lain.

Temuan-temuan itu tidak hanya menunjukkan ancaman yang masih ada, tetapi juga memperlihatkan perbedaan cara merespons di lapangan. Sebagian kelompok memilih pendekatan persuasif, memberi penyadartahuan tanpa menyita alat. "Kami hanya menegur, tidak ada perlawanan," kata salah satu perwakilan.

Namun bagi yang lain, pendekatan seperti itu sering dianggap tidak cukup. Perbedaan ini memicu diskusi yang cukup tajam. Pertanyaan yang muncul sederhana, tetapi sulit dijawab: apakah cukup dengan menegur, atau perlu tindakan yang lebih tegas?

Farid, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa kewenangan Pokmaswas memiliki batas. "Penindakan itu harus ada bukti dan kewenangan, Yang penting didokumentasikan dengan baik," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan tidak boleh berujung konflik. “Pendekatan persuasif tetap harus diutamakan.” Namun di laut, situasi tidak selalu berjalan sesuai pedoman.

Beberapa peserta mengaku bahwa tanpa mendekat, bahkan dalam kondisi tertentu harus mengejar pelaku sering lolos tanpa jejak. “Kalau tidak didekati, sulit tahu apa yang mereka lakukan,” kata salah satu peserta.

Diskusi ini memperlihatkan posisi yang tidak mudah: nelayan berada di antara keterbatasan kewenangan dan kebutuhan mendesak untuk melindungi laut yang menjadi sumber hidup mereka.

Simulasi patroli itu akhirnya berubah makna. Ia bukan lagi sekadar latihan, tetapi cermin dari kenyataan bahwa ancaman terhadap laut masih berlangsung, dan nelayan adalah pihak yang paling dekat untuk melihatnya, sekaligus paling rentan menanggung dampaknya.



*Peserta Jambore Nelayan 2025 berdiskusi saat pemantauan penyu di Pulau Lanjukang, Makassar. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran lapangan untuk mengenali habitat, pola bertelur, serta upaya perlindungan penyu yang dilakukan masyarakat setempat. Foto: Panitia Jambore 2025.*

### Cerita dari Laut dan Penyu yang Kembali

Setelah sesi refleksi yang penuh perdebatan, suasana jambore perlahan berubah. Percakapan bergeser dari ketegangan ke ruang yang lebih tenang, namun tidak kalah penting. Sharing Session 3 dilanjutkan dengan materi konservasi penyu.

Berbagi praktik cerdas dalam menjaga penyu dan habitatnya, mendiskusikan pengelolaan sarang, tukik, hingga area pantai, sekaligus menceritakan tantangan konservasi di lapangan dan belajar dari pengalaman komunitas lain.

Namun di tengah diskusi teknis itu, yang paling kuat justru datang dari cerita-cerita personal. Rusman, seorang nelayan, menceritakan pengalaman yang masih ia ingat dengan jelas. Suatu hari, saat menarik jaring, seekor penyu besar ikut terperangkap.

Bagi sebagian nelayan, itu bisa dianggap sebagai keberuntungan, tangkapan bernilai ekonomi. Tetapi Rusman memilih jalan berbeda. "Saya lihat penyu itu masih hidup, jadi saya lepaskan kembali ke laut," katanya.

Ia tahu penyu bisa dijual. Tetapi baginya, laut bukan hanya soal hasil hari ini. "Kalau semua penyu kita ambil, nanti anak-anak kita lihat penyu di mana?"

Cerita serupa datang dari Jamal, nelayan dari Kapoposang. Ia mengatakan penyu masih sering datang bertelur di pantai pulau mereka. Jika menemukan sarang, warga akan menandainya agar tidak terganggu. "Kalau penyu masih datang ke pulau kita, itu berarti laut kita masih bagus," katanya.

Di Pulau Lanjukang sendiri, tanda-tanda itu masih ada. Dua jenis, penyu hijau dan penyu sisik masih rutin bertelur di pulau ini. Para peserta mengunjungi langsung lokasi konservasi penyu yang dikelola masyarakat. Pendekatan yang digunakan sederhana, tetapi konsisten.

Jika menemukan sarang, telur tidak dipindahkan. Masyarakat hanya memagari lokasi agar tetap aman dari gangguan. Dalam satu sarang, biasanya terdapat antara 60 hingga 140 telur, dengan musim puncak peneluran terjadi antara Februari hingga April.

Di tengah cerita tentang kerusakan dan ancaman, praktik-praktik seperti ini menjadi penanda lain bahwa laut belum sepenuhnya hilang. Dan di tangan masyarakat yang memilih menjaga, selalu ada kemungkinan untuk memulihkannya kembali.



*Peserta berkumpul dalam sesi diskusi malam. Di bawah cahaya lampu sederhana, nelayan, fasilitator, dan para pihak berbagi pengalaman lapangan, membahas ancaman terhadap laut, serta merumuskan langkah bersama untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Foto: Panitia Jambore 2025.*

### Berbagai Cerita Baik dari Berbagai Pulau

Malam kembali turun di Pulau Lanjukang. Setelah makan bersama, ruang diskusi kembali hidup, bukan dengan suasana formal, tetapi dengan percakapan yang mengalir perlahan di bawah langit terbuka.

Kegiatan diawali dengan pemutaran film, lalu berlanjut ke sesi berbagi tentang tata kelola sumber daya laut. Para peserta bertukar praktik-praktik yang mereka jalankan di wilayah masing-masing. Tentang bagaimana mereka mengatur ruang tangkap, membangun kelembagaan, hingga menyusun aturan lokal yang disepakati bersama.

Sejak awal, jambore ini memang dibangun sebagai ruang silaturahmi antar nelayan. Tidak ada presentasi yang kaku. Tidak ada jarak antara “narasumber” dan “peserta”. Yang ada adalah percakapan setara dengan bahasa yang mereka pahami sendiri, berangkat dari pengalaman yang benar-benar mereka alami di laut.

Beberapa nelayan bercerita tentang upaya membatasi wilayah tangkap. Yang lain berbagi pengalaman menjaga sarang penyu di pulau mereka. Cerita-cerita ini menjadi bentuk *sharing praktik cerdas* pengetahuan yang lahir dari pengalaman lokal, dan perlahan berpindah dari satu pulau ke pulau lain.

Dari Pulau Bonetambu, H. Gassing menceritakan bagaimana mereka mulai menerapkan sistem buka-tutup penangkapan gurita. Meski hasilnya belum sepenuhnya terlihat karena masih dalam masa penutupan pertama, ia mulai merasakan perubahan. “Di wilayah buka tutup kami pasang pelampung, bendera, dan papan informasi. Ada logo pemerintah dan penegak hukum. Itu membuat pelaku bom jadi takut,” ujarnya.

Menurutnya, sistem ini tidak lahir begitu saja. Mereka belajar dari pengalaman Pulau Lanjukang dan Langkai. Dua wilayah yang lebih dulu menerapkan sistem serupa, dan mulai merasakan dampaknya: ukuran gurita yang membesar dan kondisi karang yang perlahan membaik.

Dari tempat yang lebih jauh, nelayan dari Banggai membawa cerita yang lain. Di pesisir Desa Monsongan, mereka mengembangkan kawasan “Rumah Dayah” sebuah area tangkap yang dikelola bersama oleh masyarakat. Kawasan ini mencakup Rep Batu Kolung seluas 4,6 hektare dan lokasi cadangan Rep Soku seluas 1,4 hektare.

Di sana, akses ditutup selama enam bulan. Tidak ada aktivitas penangkapan yang diperbolehkan, termasuk praktik destruktif. Setelah masa penutupan berakhir, nelayan hanya boleh menangkap ikan dengan alat tangkap sederhana dan ramah lingkungan. Pengawasan dilakukan oleh Pokmaswas, dengan dukungan pemerintah desa serta berbagai pihak seperti PSDKP, Polairud, KKP, dan dinas perikanan.

Untuk memperkuat pemulihan ekosistem, masyarakat juga mengembangkan inovasi sederhana, bioreeftek dari tempurung kelapa sebagai media tumbuh karang, serta *seanook*, struktur bambu yang menjadi tempat berlindung dan berkembang biak bagi ikan dan biota laut lainnya.

Cerita-cerita ini menunjukkan satu hal yang sama: bahwa konservasi tidak selalu harus datang dari luar, tidak selalu membutuhkan teknologi yang rumit. Dari tangan nelayan sendiri, solusi berbasis lokal justru tumbuh sebagai fondasi yang paling nyata untuk menjaga laut.



*Peserta Jambore Nelayan 2025 mengikuti sesi diskusi terbuka. Nelayan dari berbagai pulau duduk melingkar, berbagi pengalaman tentang pengelolaan sumber daya laut, ancaman ekosistem, serta praktik-praktik lokal yang mulai dikembangkan untuk menjaga keberlanjutan pesisir. Foto: Panitia Jambore 2025.*

### **Laut sebagai Masa Depan**

Keesokan paginya, di hari terakhir jambore, suasana kembali berubah. Para peserta berkumpul di tepi pantai untuk membersihkan area bersama. Setelah itu, satu per satu mulai berkemas membongkar tenda, merapikan perlengkapan, dan bersiap kembali ke pulau masing-masing.

Perahu-perahu yang sebelumnya membawa mereka datang kini kembali disiapkan untuk berlayar. Pulau Lanjukang perlahan kembali seperti semula tenang, seolah tidak pernah menjadi ruang pertemuan ratusan orang dari berbagai wilayah.

Namun bagi para nelayan yang hadir, sesuatu telah tertinggal. Bukan sekadar kenangan, tetapi kesadaran. Bahwa laut yang mereka hadapi

bukan hanya tentang hari ini, bukan hanya tentang tangkapan, atau penghasilan yang harus dibawa pulang. Laut adalah ruang hidup yang lebih panjang dari satu generasi.

Ia adalah masa depan. Dan menjaga laut dengan segala keterbatasan, dengan segala tantangan menjadi satu-satunya cara untuk memastikan bahwa masa depan itu masih ada, bagi mereka, dan bagi anak-anak yang kelak akan mewarisi laut yang sama..



*Peserta Jambore Nelayan 2025 berfoto bersama, menandai berakhirnya rangkaian kegiatan selama tiga hari. Pertemuan ini mempertemukan nelayan, pemerintah, dan berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan laut dan pesisir. Foto: Panitia Jambore 2025.*

*Nirwan Dessibali – 2 Oktober 2025*



## **Pengawasan Laut Berbasis Masyarakat, Pokmaswas Bonetambu Diperkuat Lewat Kegiatan SETARA**

Di sebuah siang di Pulau Bonetambu, Kamis, 4 Desember 2025, para nelayan, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu rumah tangga berkumpul dalam suasana belajar yang hangat namun penuh keseriusan. Mereka hadir bukan sekadar berdiskusi, tetapi untuk memperkuat peran sebagai penjaga laut. Pertemuan ini menghadirkan ruang belajar bernama Sekolah Tanpa Ragu (SETARA) sebagai wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman. Di ruang sederhana itu, anggota Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) A'bulosibatang duduk bersama, menyatukan pengalaman lapangan dengan pengetahuan baru.

Diskusi kelompok terarah (FGD) yang dipandu Rahmat Fajri berlangsung dinamis, membedah poin krusial. Mulai dari mempertegas peran dan fungsi Pokmaswas, menyusun SOP monitoring dan patroli, hingga teknik pengumpulan informasi serta identifikasi berbagai bentuk pelanggaran di laut. Setiap cerita yang dibagikan menjadi cermin realitas sekaligus pijakan untuk memperbaiki praktik pengawasan ke depan. Dari pertemuan ini, bukan hanya pengetahuan yang bertambah. Keterampilan diasah, kepercayaan diri tumbuh, dan benih kepemimpinan mulai menguat. Di Bonetambu, menjaga pesisir dan laut tak lagi dipandang sebagai beban, melainkan tanggung jawab bersama.

Ketua Pokmaswas A'bulosibatang, Haji Gassing, menyampaikan isu penting yang menjadi tantangan utama. Adanya nelayan luar dari pulau lain yang teridentifikasi melakukan penyelaman malam di area sistem buka-tutup yang telah disepakati masyarakat dan didukung para pihak. Mereka sepakat bahwa solusi awal yang diperlukan adalah melakukan sosialisasi langsung ke pulau-pulau asal nelayan tersebut. Sosialisasi ini bertujuan membangun pemahaman dan persaudaraan, sekaligus memberikan informasi yang jelas mengenai wilayah perlindungan dan pengelolaan berbasis sistem buka-tutup yang telah menjadi titik pengawasan bersama.



*Ketua Pokmaswas A'bulosibatang, Haji Gassing, menyampaikan pandangan dan isu utama yang dihadapi masyarakat dalam pengawasan wilayah pesisir dan laut pada sesi diskusi Program SETARA di Pulau Bonetambu*

Selain itu, masyarakat Pulau Bonetambu berharap dukungan dari para pihak. “Semoga Pokmaswas A’bulosibatang segera mendapatkan SK dari Dinas Kelautan Provinsi, karena strukturnya sudah ada dan sudah ditandatangani pak Luran dan penyuluh. Kami berharap juga dukungan pemerintah dan penegak hukum untuk bersama-sama nanti melakukan patroli bersama sehingga kami juga bisa belajar dan tingkatkan kepercayaan diri kami dalam mengawas,” ujar Haji Gassing.

Sementara, Nuryamin Networking and Data Analyst PROTEKSI GAMA YKL Indonesia, menyampaikan melalui program ini, masyarakat Pulau Bonetambu berharap kelestarian laut dapat terjaga, hasil laut khususnya gurita membaik, dan nelayan tidak perlu lagi mencari sumber daya hingga jauh ke perairan Pangkep atau Bone.

“Harapan jangka panjangnya adalah peningkatan pendapatan nelayan dan perlindungan efektif terhadap lokasi konservasi buka-tutup. YKL Indonesia berkomitmen terus mendukung kebutuhan alat operasional dan memperkuat sinergi semua pihak,” ujar Nuryamin.



*Nelayan Pulau Bonetambu menempelkan hasil diskusi pada lembar pemetaan saat sesi SETARA. Aktivitas ini membantu masyarakat mengidentifikasi titik-titik pengawasan dan isu utama dalam pengelolaan wilayah*

Nuryamin menambahkan pendekatan SETARA yang dilaksanakan YKL Indonesia menjadi suatu pendekatan sistem pendidikan nonformal yang secara khusus berfokus pada peningkatan kapasitas nelayan lokal skala kecil untuk memberdayakan dan memperkuat posisi tawar mereka dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya perikanan yang adil dan berkelanjutan.

“Peningkatan kapasitas nelayan SETARA dirancang dengan model interaktif oleh seluruh peserta, yakni fasilitator, narasumber, serta nelayan dan masyarakat. Ini seri ke-5, empat seri sebelumnya membahas mengenai mengenal lebih dekat kehidupan gurita, penanganan hasil tangkapan, mengenali spesies dilindungi dan penanganan jika tertangkap, dan pembuatan alat tangkap ramah lingkungan.

*Nirwan Dessibali – 4 Desember 2025*



## **Pembukaan Perdana Buka Tutup, Nelayan Bonetambu Memulai Babak Baru Tata Kelola Lokal**

Hujan yang turun sejak pagi tidak menyurutkan langkah nelayan Pulau Bonetambu. Sekitar 40 nelayan tetap melaut pada pembukaan perdana area buka–tutup penangkapan gurita, Jumat (5/12/2025). Pembukaan ini menjadi momentum penting, bukan hanya karena wilayah tersebut sebelumnya ditutup selama tiga bulan, tetapi juga karena menandai peralihan cara pandang nelayan dalam mengelola lautnya sendiri, dari praktik terbuka tanpa aturan menuju tata kelola berbasis kesepakatan komunitas.

Inisiatif buka–tutup ini merupakan yang pertama kali diterapkan di Pulau Bonetambu. Sebelum pembukaan dilakukan, masyarakat telah melalui serangkaian pertemuan peningkatan kapasitas dan diskusi internal. Dari proses tersebut lahir kesepakatan menutup sementara area seluas 71,44 hektar selama tiga bulan, dengan tujuan memberi waktu pemulihan bagi gurita dan biota lain, sekaligus menguji dampaknya terhadap hasil tangkapan nelayan.

### **Suara Nelayan: Hasil Awal, Cuaca, dan Tantangan Pengawasan**

Pembukaan area dilakukan secara terbatas sebagai uji coba. Dalam diskusi evaluasi yang digelar di hari yang sama, nelayan menyampaikan pengalaman langsung mereka. Saeni, salah satu nelayan Bonetambu, mengaku gembira meski cuaca kurang bersahabat. Beberapa nelayan lain menyebut hasil tangkapan belum maksimal karena angin kencang membatasi waktu dan ruang melaut.

Namun, hasil awal tetap memberi harapan. Dalam waktu sekitar setengah jam, nelayan berhasil mendapatkan gurita dengan ukuran hingga lebih dari tiga kilogram, ukuran yang sebelumnya jarang ditemukan di perairan sekitar pulau. Selain gurita, nelayan juga melihat peningkatan keberadaan ikan di dasar perairan. “Banyak sekali ikan di

bawah,” ungkap Saeni dalam forum diskusi, menggambarkan perubahan yang mulai terasa setelah penutupan sementara.

Di sisi lain, diskusi juga mengungkap tantangan serius selama masa penutupan. Beberapa nelayan, seperti Arifin dan Saenal, menyampaikan bahwa masih ada penyelam malam dari pulau lain yang masuk secara diam-diam ke area tutup. Tokoh masyarakat Daeng Gassing mengonfirmasi hal tersebut dan menekankan pentingnya patroli malam yang konsisten, serta kejelasan penanda batas wilayah seperti pelampung dan papan informasi.

Berbagai solusi pun mengemuka, pengumuman di masjid saat waktu magrib bagi pendatang yang singgah, pemasangan spanduk dan tanda di dermaga, penguatan kekompakan masyarakat saat menegur pelanggar, hingga pelibatan aparat dan dinas terkait untuk patroli bersama. Diskusi ini menunjukkan bahwa buka–tutup bukan hanya soal menutup dan membuka wilayah, tetapi juga tentang kesiapan sosial untuk menjaga aturan bersama.

### **Buka–Tutup sebagai Proses Belajar dan Demokrasi Hak Kelola**

Koordinator Pemberdayaan dan Advokasi YKL Indonesia, Muhammad Fauzi Rafiq, menegaskan bahwa pembukaan perdana ini memang dirancang sebagai uji coba. “Yang kita lakukan hari ini bukan keputusan final. Ini ruang belajar bersama. Kalau ada manfaatnya, meski sedikit, itu yang jadi dasar kita lanjutkan dan perbaiki,” ujarnya di hadapan nelayan.

Diskusi berkembang pada pertanyaan kunci: apakah area ini akan ditutup kembali, dipindahkan ke lokasi lain, atau dikombinasikan dengan skema rotasi seperti yang diterapkan di Pulau Langkai dan Lanjukang. Sejumlah nelayan menyampaikan pandangan berbeda, mulai dari perlunya merasakan hasil lebih lama hingga pentingnya menjaga agar wilayah tidak terlalu lama dibuka dan kembali dimasuki pengebom ikan.



*Nelayan Pulau Bonetambu mengikuti diskusi dan pengarahan dalam kegiatan pembukaan lokasi tangkap sistem buka-tutup gurita, sebagai bagian dari proses evaluasi bersama, penguatan kesepakatan. Foto: YKL Indonesia.*

Bagi Daeng Gassing, esensi buka-tutup adalah perlindungan. Ia menilai penutupan sementara terbukti mampu menekan masuknya pengebom ikan, meningkatkan jumlah ikan, dan memberi manfaat bagi nelayan lokal. “Kalau tidak ditutup, pendatang bisa masuk seenaknya. Dampaknya kita semua yang tanggung,” ujarnya.

Melalui pembukaan perdana ini, nelayan Pulau Bonetambu tidak hanya memanen gurita, tetapi juga memanen pelajaran penting: bahwa laut dapat dikelola secara adil dan berkelanjutan jika aturan lahir dari kesepakatan bersama. Buka-tutup pun dipahami bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai proses belajar kolektif—tempat konservasi, penghidupan, dan kedaulatan masyarakat pesisir bertemu.

*Nirwan Dessibali -5 December 2025*



## Cerita Perjuangan Hak Kelola Laut Masyarakat Pulau Langkai dan Lanjukang

Perjuangan masyarakat di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang, Kota Makassar, untuk memperoleh pengakuan hak kelola atas wilayah perairannya menjadi salah satu cerita penting yang mengemuka dalam Simposium Nasional Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal 2025. Bukan dalam bentuk suara protes, melainkan kisah panjang tentang laut yang dijaga, diatur, dan dirawat oleh masyarakat lokal, namun belum sepenuhnya diakui oleh negara.

Cerita tersebut disampaikan Nirwan Dessibali, Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia, dalam simposium yang digelar di IPB International Convention Center, Bogor, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Working Group ICCAs Indonesia (WGII), mengusung tema “Memperkuat Pengakuan dan Perlindungan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.”

Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang mungkin hanya tampak sebagai titik kecil di peta Kota Makassar. Namun bagi nelayan yang hidup di sana, laut di sekeliling pulau adalah ruang hidup. Selama bertahun-tahun, masyarakat setempat menjaga wilayah perairannya dengan aturan yang mereka sepakati sendiri. Persoalannya, kata Nirwan, negara belum sepenuhnya hadir untuk mengakui dan melindungi upaya tersebut.

“Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang adalah pulau terdepan di wilayah administratif Kota Makassar,” ujar Nirwan membuka paparannya. “Secara ekologis, wilayah ini sangat kaya. Terumbu karangnya masih terlihat jelas dari permukaan hingga kedalaman sepuluh meter dengan keragaman jenis karang 126 spesies. Ada ratusan jenis ikan karang, lamun, hingga spesies yang dilindungi seperti penyu, hiu, dan *whale shark*.”

## MENGGURITA DI PULAU

Namun kekayaan hayati itu, lanjut Nirwan, justru berada dalam pusaran berbagai ancaman. Rencana pengembangan pariwisata, konflik pemanfaatan ruang laut, praktik penangkapan ikan merusak, hingga bayang-bayang tambang pasir laut di Kepulauan Spermonde terus menghantui. Ia menyinggung rencana reklamasi di Makassar yang membutuhkan puluhan juta meter kubik pasir.

“Pertanyaannya sederhana, dari mana pasir itu akan diambil? Tidak mungkin jauh dari Spermonde,” katanya.



*Direktur Eksekutif YKL Indonesia, Nirwan Dessibali saat membawakan cerita dalam Simposium Nasional Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal 2025. Foto: WGII.*

### Hak yang Dijaga, Belum Sepenuhnya Diakui

Di tengah tekanan tersebut, masyarakat Langkai dan Lanjukang tidak tinggal diam. Sejak 2022, nelayan secara kolektif menerapkan sistem buka–tutup penangkapan gurita. Wilayah tangkap ditutup pada periode tertentu agar sumber daya pulih, lalu dibuka kembali secara bersama. Sistem ini lahir dari kesepakatan internal masyarakat, diperkuat dengan pemetaan partisipatif serta penguatan kelembagaan.

Sebagai wadah pengelolaan, masyarakat membentuk Forum Pasibuntuluki. “Anggotanya hampir seluruh masyarakat pulau—kelompok nelayan, kelompok perempuan, pengawas masyarakat, hingga kelompok pariwisata,” ujar Nirwan.

Masalahnya, seluruh upaya tersebut berjalan de facto tanpa pengakuan de jure. “Kami belajar bahwa di laut, hak kelola masyarakat lokal nyaris tidak memiliki rumah hukum,” kata Nirwan. Status Pulau Langkai dan Lanjukang sebagai kelurahan membuat jalur peraturan desa tidak bisa ditempuh, sementara kewenangan pengelolaan laut berada di tingkat provinsi.

Upaya mencari cantolan hukum pun berliku. Skema Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sempat dicoba, tetapi hanya mengakomodasi permukiman dan alat tangkap menetap. Opsi *Other Effective Area-Based Conservation Measures* (OECM) juga diuji, namun kandas karena persyaratan administratif dan kelembagaan yang belum diakui.

“Keanekaragaman hayatinya ada, praktiknya ada, tetapi karena tidak terdokumentasi secara administratif dan sebagian besar wilayah telah masuk dalam pencadangan kawasan konservasi, upaya ini dianggap tidak memadai,” kata Nirwan.

Akhirnya, jalur yang dinilai paling mungkin adalah integrasi ke dalam Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Lanjukang. Dengan satu catatan tegas: ruang kelola masyarakat harus diakomodasi sejak awal. “Dalam peta zonasi, ruang kelola masyarakat dimunculkan lebih dulu, baru zona lainnya. Forum Pasibuntuluki juga dimasukkan dalam kelompok kerja penyusunan KKD,” ujarnya.

### **Negara, Regulasi, dan Kekosongan di Laut**

Akademisi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Akhmad Solihin, menyebut persoalan masyarakat lokal sebagai “wilayah abu-abu kebijakan”. Menurut dia, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat relatif lebih jelas karena dijamin konstitusi, sementara masyarakat lokal belum memiliki dasar hukum yang kuat.

## MENGGURITA DI PULAU

“Banyak regulasi hanya menyebut ‘dapat melibatkan masyarakat’. Dalam hukum, kata ‘dapat’ itu paling lemah,” ujar Solihin. Akibatnya, masyarakat lokal kerap sulit dilibatkan secara penuh, termasuk dalam pengawasan ruang laut, di tengah meningkatnya konflik ruang dan tekanan pembangunan.

Dari sisi pemerintah, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menegaskan komitmen negara untuk memperkuat pengakuan hak masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal. “Ini bukan sekadar aspek administratif. Pengakuan hak adalah bentuk penghargaan negara terhadap sistem pengelolaan yang telah menjaga keseimbangan antara manusia dan alam,” katanya.

Ia mengakui fondasi hukum sebenarnya sudah tersedia, mulai dari Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil hingga regulasi turunan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, tantangan implementasi di lapangan masih besar, terutama dalam menyatukan kepentingan lintas sektor.



*Foto bersama peserta Simposium Nasional Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal 2025. Foto: WGII.*

## Antara Dokumen dan Realitas

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Permana Yudiarso, menilai negara sejatinya tidak sedang memberikan hak baru kepada masyarakat pesisir. “Negara hanya mengakui hak-hak yang sejak lama telah mereka jalankan,” ujarnya.

Masalahnya, banyak ruang hidup masyarakat belum tercatat dalam sistem perencanaan negara. Ketika izin baru terbit—untuk reklamasi, industri, atau proyek strategis nasional—masyarakat justru menjadi pihak pertama yang tersingkir.

Bagi Nirwan, inilah inti persoalan yang dialami masyarakat Langkai dan Lanjukang. “Masyarakat sudah menjaga lautnya. Mereka membatasi diri, menegakkan aturan, bahkan membangun kemitraan ekonomi,” katanya, merujuk pada kerja sama Forum Pasibuntuluki dengan Asosiasi Demersal Indonesia yang menjamin harga tangkapan nelayan.

Yang belum hadir, menurut dia, adalah kepastian hak. Hak akses, hak pengelolaan, hak eksklusif, hingga hak penegakan masih diperjuangkan satu per satu. “Kami masih belajar. Tapi satu hal jelas, tanpa pengakuan hak kelola, semua praktik baik ini sangat rapuh,” ujarnya.

Simposium di Bogor itu memperlihatkan satu benang merah, laut Indonesia tidak bisa dikelola hanya dengan peta dan izin. Ia membutuhkan pengakuan terhadap mereka yang hidup paling dekat dengannya. Akademisi, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil sepakat bahwa pengelolaan pesisir tidak mungkin berhasil tanpa melindungi dan memberdayakan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal.

*Nirwan Dessibali – 10 Desember 2025*



## Cerita Nelayan Pulau Kecil Spermonde, dari Gurita ke Tata Kelola

Pulau-pulau kecil di Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan, menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus mempertahankan penghidupan nelayan skala kecil. Tekanan pasar, kerusakan ekosistem karena penangkapan yang merusak, perubahan iklim, dan keterbatasan akses ekonomi membuat laut kian dieksploitasi, sementara daya dukungnya terus menurun.

Di Pulau Langkai, Lanjukang, dan Bonetambu Kota Makassar, gurita menjadi salah satu komoditas utama yang menopang ekonomi rumah tangga nelayan. Nilai jualnya tinggi dan permintaannya stabil. Namun, intensitas penangkapan yang meningkat dalam dua dekade terakhir mulai memunculkan tanda-tanda tekanan ekologis. Ukuran gurita mengecil, hasil tangkapan fluktuatif, dan nelayan harus melaut lebih jauh. “Tidak bisa lagi mengandalkan satu titik tangkap. Sebelum kami memulai program yang namanya buka tutup, daerah tangkap lumayan jauh padahal kalau dulu dekat pulau cukup,” kata Erwin RH, nelayan Pulau Langkai di Kota Makassar, Rabu 24/12/2025.

Kondisi ini diperparah oleh perubahan iklim. Musim barat yang semakin panjang membatasi hari melaut nelayan. Dalam situasi tersebut, laut tetap menjadi tumpuan utama karena alternatif mata pencaharian di pulau kecil sangat terbatas.

### **Gurita sebagai Pintu Masuk Tata Kelola**

Sejak 2021, Yayasan Konservasi Laut Indonesia (YKL) Indonesia bersama masyarakat pesisir Spermonde melalui Program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat (PROTEKSI GAMA). Pendekatan yang digunakan menempatkan nelayan sebagai aktor utama dalam pengelolaan perikanan.

## MENGGURITA DI PULAU

“Gurita dipilih karena secara ekonomi penting bagi nelayan, tetapi secara biologis sangat sensitif terhadap penangkapan berlebih. Jika diberi ruang dan waktu, stoknya bisa pulih relatif cepat,” ujar Alief Fachrul Raazy, Program Manager YKL Indonesia.

Pendampingan tidak dimulai dengan pembatasan atau larangan, melainkan penyusunan profil perikanan secara partisipatif. Nelayan dilibatkan mencatat alat tangkap, musim, lokasi penangkapan, volume hasil, hingga harga jual. Data ini kemudian menjadi dasar diskusi bersama untuk memahami kondisi sumber daya secara lebih objektif.

Dari proses tersebut, muncul kesepakatan untuk menerapkan sistem buka-tutup wilayah penangkapan gurita. Sebagian area ditutup sementara agar gurita dapat tumbuh dan berkembang biak, lalu dibuka kembali dalam periode yang disepakati bersama.



*Warga Pulau Bonetambu menandatangani dokumen dan peta wilayah penutupan sebagai bentuk persetujuan terhadap penerapan Sistem Buka Tutup Penangkapan Gurita. Foto: YKL Indonesia..*

## **Kesepakatan dari Nelayan, untuk Nelayan**

Sistem buka–tutup tidak ditetapkan dari luar. Nelayan sendiri yang menentukan lokasi, durasi penutupan, serta mekanisme pengawasan. “Awalnya memang ada keraguan. Takut hasil turun,” kata Erwin. “Tapi setelah dibuka kembali, gurita lebih besar dan hasilnya terasa.”

Menurut Nirwan Dessibali, Direktur Eksekutif YKL Indonesia, proses musyawarah menjadi kunci utama. “Ketika aturan lahir dari kesepakatan nelayan sendiri, kepatuhan tumbuh secara alami. Yang dijaga bukan hanya wilayah, tetapi juga kepercayaan.”

Di Pulau Langkai dan Lanjukang, sistem ini berkembang menjadi praktik kolektif lintas pulau. Wilayah kelola berbasis buka–tutup kemudian diselaraskan dengan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Lanjukang. Pengawasan dilakukan oleh nelayan melalui kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), dengan sanksi sosial sebagai instrument.

## **Dampak Ekologi dan Ekonomi**

Pemantauan menunjukkan peningkatan kondisi ekosistem di wilayah kelola. Tutupan karang hidup meningkat, sementara praktik penangkapan merusak seperti bom dan bius menurun. Ukuran gurita yang tertangkap menjadi lebih besar dan seragam.

Dari sisi ekonomi, pendapatan nelayan meningkat seiring membaiknya kualitas hasil tangkapan dan harga jual. Di darat, kelompok perempuan nelayan mulai mengembangkan produk olahan seperti nugget dan sambal gurita, membuka peluang nilai tambah di tingkat lokal.

Kesadaran konservasi juga meluas ke spesies lain. Di Pulau Lanjukang, masyarakat aktif melindungi sarang penyu dan melepasliarkan ribuan tukik dalam beberapa tahun terakhir. “Dari gurita, kami belajar menjaga yang lain,” ujar Anas nelayan dari Pulau Lanjukang.

### Replikasi di Pulau Bonetambu

Pada 2024–2025, pendekatan PROTEKSI GAMA direplikasi di Pulau Bonetambu, salah satu sentra perikanan gurita terbesar di Kota Makassar. Bonetambu menjadi ruang pembelajaran penting untuk melihat apakah model ini dapat bekerja di wilayah dengan tekanan tangkap yang tinggi.

Sekitar 70 hektar wilayah buka tutup mulai dirintis. Monitoring hasil tangkapan diperkuat melalui pencatatan harian nelayan, sementara Sekolah Tanpa Ragu (SETARA) digelar sebagai ruang belajar bersama.

“Bonetambu menjadi ujian penting. Jika tata kelola berbasis masyarakat bisa berjalan di sini, peluang replikasi di wilayah pesisir lain akan semakin besar,” kata Nirwan.

“Setelah belajar di Pulau Langkai dan Lanjukang, kami coba buka tutup. Hasilnya setelah dibuka luar biasa, nelayan yang menangkap sebentar saja bisa dapat gurita grade A atau yang paling tinggi. Selama ditutup juga menurun bahkan hilang pelaku bom ikan,” ujar H. Gassing Tokoh Masyarakat di Pulau Bonetambu.

### Pembelajaran dari Pulau-Pulau Kecil

Pengalaman dari Spermonde menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan skala kecil yang berkelanjutan tidak selalu membutuhkan instrumen rumit. Data sederhana, kesepakatan lokal, dan kepercayaan antar nelayan dapat menjadi fondasi kuat tata kelola sumber daya.

Lebih dari sekadar menjaga stok gurita, pendekatan ini memperkuat posisi nelayan sebagai pengelola lautnya sendiri. Di tengah tekanan perubahan iklim dan pasar global, pembelajaran dari pulau-pulau kecil Spermonde memberi pesan penting keberlanjutan laut dan penghidupan nelayan dapat berjalan beriringan, jika dikelola dari bawah dan berbasis pada pengetahuan lokal.

*Nirwan Dessibali – 24 Desember 2025*





## Upaya Nelayan Bonetambu Jaga Wilayah Tangkap Gurita

Hujan turun sejak pagi di Pulau Bonetambu, pulau kecil di gugusan Kepulauan Spermonde, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ombak tak terlalu tinggi, namun angin membawa rintik yang cukup membuat perahu-perahu kayu bergoyang pelan di bibir pantai.

Sekitar 40 nelayan tetap bersiap dengan memeriksa alat selam, tali, dan keranjang untuk membawa hasil tangkapan. Awal Desember lalu itu, menandai sesuatu yang baru bagi nelayan Bonetambu. Mereka buka perdana area buka tutup penangkapan gurita.

Area yang selama tiga bulan terakhir tertutup kini dibuka secara bersama-sama. Ini kali pertama nelayan Bonetambu menerapkan sistem buka tutup gurita secara resmi dan kolektif.

Pendampingan Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia lakukan dengan dukungan Burung Indonesia melalui Program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat (Proteksi Gama).

Sejak pagi, nelayan berkumpul di titik yang mereka sepakati. Tidak ada aba-aba khusus, hanya kesepakatan bersama bahwa area yang sebelumnya tertutup itu kini boleh mereka masuki.

Beberapa nelayan langsung turun ke air, menyelam di sekitar terumbu karang dangkal yang menjadi habitat gurita.

Pulau Bonetambu, salah satu pulau terpadat di Spermonde. Luas daratannya terbatas, dengan permukiman rapat, sebagian besar penduduk menggantungkan hidup dari laut.

Perikanan tangkap skala kecil menjadi sumber penghidupan utama, termasuk penangkapan gurita, ikan karang, dan biota bernilai ekonomi lainnya.

## MENGGURITA DI PULAU

Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap sumber daya laut meningkat seiring tingginya kebutuhan ekonomi dan masuknya nelayan luar pulau. Berangkat dari situ, mereka kemudian sepakat untuk menginisiasi sistem buka tutup.

Serangkaian pertemuan dilakukan di pulau ini, melibatkan nelayan, tokoh masyarakat, dan pihak pendamping. Pertemuan membahas pengelolaan perikanan berkelanjutan, siklus hidup gurita, kondisi terumbu karang, hingga pengalaman pulau lain di Spermonde yang lebih dulu menerapkan sistem serupa.



*Nelayan Bonetambu bersiap turun ke laut untuk menangkap gurita, menandai proses awal pembukaan kawasan yang telah ditutup selama 3 bulan untuk penangkapan gurita. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.*

### **Pelajari siklus dan upaya jaga laut**

Muhammad Fauzi Rafiq, Koordinator Pemberdayaan dan Advokasi YKL Indonesia, menjelaskan, proses ini tidak terjadi secara instan. “Buka tutup area penangkapan gurita di Pulau Bonetambu merupakan tahap

pertama. Ini lahir dari pembelajaran bersama, terutama tentang pentingnya berkelompok,” katanya.

Nelayan Bonetambu, mempelajari siklus hidup gurita, musim tangkap, dan hubungan antara kesehatan terumbu karang dengan ketersediaan gurita. Mereka juga melakukan kunjungan belajar ke Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang, dua pulau di Spermonde yang lebih dulu menerapkan sistem buka tutup. “Nelayan melihat langsung bagaimana hasil tangkapan bisa meningkat setelah area ditutup sementara,” kata Fauzi.

Dari situ, muncul kesadaran untuk mencoba hal serupa di Bonetambu. Tahap awal, area yang tertutup seluas 71,44 hektar. Selama tiga bulan, nelayan sepakat tak menangkap gurita di wilayah itu. Penutupan berlangsung kolektif dengan pengawasan warga pulau itu. Setelah masa penutupan berakhir, area mereka buka kembali secara bersama-sama.

Saat pembukaan berlangsung, cuaca menjadi tantangan. Hujan dan angin membatasi jangkauan nelayan untuk menjelajahi seluruh area yang dibuka. “Cuaca yang kurang bersahabat membatasi nelayan untuk mengeksplor seluruh wilayah,” kata Fauzi.

Dalam waktu sekitar setengah jam, seorang nelayan berhasil menangkap gurita seberat 3,36 kilogram. Ukuran ini tergolong besar untuk perairan sekitar Bonetambu.

Secara keseluruhan, hasil tangkapan hari itu mencapai 16, 94 kilogram. Selain gurita, beberapa nelayan juga mendapatkan lobster dan sotong. Hasil ini, katanya, menjadi indikator awal dari dampak penutupan sementara, meski belum dapat disimpulkan sebagai tren jangka panjang.

Daeng Gassing, tokoh masyarakat Pulau Bonetambu, mengatakan, sistem buka tutup bukan hanya soal hasil tangkapan. “Ini juga soal menjaga wilayah perairan kita,” katanya. Dia bilang, nelayan Bonetambu berkomitmen melindungi laut dari praktik penangkapan ikan ilegal, terutama pengeboman ikan. “Pengawasan dilakukan tiap malam untuk memastikan tidak ada yang masuk dalam area buka tutup,” ujar Gassing.

## MENGGURITA DI PULAU

Pengawasan berbasis masyarakat menjadi kunci, mengingat keterbatasan pengawasan formal di pulau-pulau kecil. Dia mengingatkan daya rusak pengeboman ikan yang pernah terjadi di wilayah Spermonde. *"Pertama, merusak terumbu karang, kedua, ikan mati. Ketiga, rumah-rumah warga rusak akibat getaran,"* katanya.

Karena itu, larangan terhadap praktik destruktif menjadi bagian tak terpisahkan dari kesepakatan buka tutup ini. Pulau Bonetambu memiliki sejarah panjang sebagai pulau nelayan. Terumbu karang di sekitarnya menjadi sumber pangan dan pendapatan utama warga. Namun, tekanan berlebih dan praktik penangkapan tidak ramah lingkungan pernah menurunkan kualitas ekosistem laut di beberapa titik.

Buka tutup pun dipandang sebagai salah satu cara mengatur kembali ruang tangkap. Kesepakatan buka-tutup di Bonetambu melibatkan berbagai pihak. Selain nelayan dan tokoh masyarakat, dukungan datang dari pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Proses ini membuka ruang demokratisasi hak kelola laut di tingkat lokal, di mana keputusan tidak datang dari luar, tetapi disepakati bersama oleh warga pulau.

Gassing juga memaparkan rencana perluasan zona tutup tangkap. Saat ini, area yang mereka tutup berada di wilayah barat daya pulau. Ke depan, perluasan secara bertahap. Tahap kedua mencakup wilayah barat tapak, lalu utara barat laut. *"Kita bersyukur karena upaya ini mulai menunjukkan perkembangan,"* kata Gassing. *"Meskipun baru berjalan sekitar tiga bulan."*

Upaya perlindungan ini juga mulai mendapatkan dukungan kelembagaan. Gassing menyebut, sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dinas terkait di provinsi. Dukungan itu dia harapkan memperkuat posisi masyarakat dalam menjaga wilayah perairan mereka.

Pulau Bonetambu bukan satu-satunya pulau di Spermonde yang mencoba mengatur ulang ruang tangkap. *"Bagi nelayan di pulau ini, pembukaan perdana buka-tutup menjadi momen penting, menandai*

peralihan dari praktik tangkap individual menuju pengelolaan bersama,” ujar Fauzi.

Pulau Bonetambu berada di jantung Kepulauan Spermonde, gugusan pulau karang yang membentang di perairan Selat Makassar. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut di Sulawesi Selatan, namun rentan terhadap tekanan aktivitas manusia.

Kepadatan penduduk, keterbatasan lahan darat, serta ketergantungan tinggi pada sumber daya laut menjadikan pulau-pulau kecil seperti Bonetambu sangat sensitif terhadap degradasi ekosistem.

Menurut Nirwan Dessibali, Direktur YKL Indonesia, dalam beberapa dekade terakhir, nelayan Bonetambu menghadapi perubahan yang nyata.

Hasil tangkapan tidak lagi mudah diperoleh seperti dahulu. Beberapa nelayan harus melaut lebih jauh atau menyelam lebih lama untuk mendapatkan hasil yang sama. “Kondisi ini diperparah oleh masuknya nelayan dari luar pulau yang memanfaatkan wilayah perairan sekitar Bonetambu tanpa keterikatan sosial dengan masyarakat setempat.”

Melalui proses pendampingan YKL Indonesia bersama mitra, diskusi tentang buka tutup tidak hanya membahas aspek teknis penangkapan gurita, juga hak kelola dan tanggung jawab bersama.

Nelayan memetakan wilayah tangkap, mengenali area terumbu karang yang masih sehat, serta mendiskusikan batas-batas yang perlu perlindungan.

*Wahyu Chandra - 6 Januari 2026*

# EPILOG

## **Gurita Pintu Masuk: Menjaga Laut, Pemenuhan Hak, dan Masa Depan Masyarakat Lokal Pulau-Pulau Kecil**

*Oleh : Alief Fachrul Raazy (Program Manager YKL Indonesia)*

Pulau-pulau kecil di Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan, sejak lama hidup dari laut. Di Langkai, Lanjukang, dan Bonetambu, laut bukan sekadar bentang alam biru di sekeliling pulau, melainkan ruang hidup yang menopang ekonomi, budaya, dan identitas sosial masyarakat. Menjadi nelayan di pulau-pulau ini bukan sekadar pilihan kerja, tetapi juga warisan lintas generasi.

Puluhan tahun lalu, masyarakat memanfaatkan laut secara sederhana. Mereka menangkap ikan, cumi, sotong, dan gurita dengan alat-alat tradisional yang menyesuaikan musim. Sebagian besar hasil tangkapan dikonsumsi sendiri, sebagian dijual ke pengepul lokal. Ritme pemanfaatan laut berjalan perlahan, mengikuti kemampuan alam untuk memulihkan diri.

Namun, dinamika itu berubah ketika permintaan pasar, khususnya terhadap gurita, meningkat tajam sejak awal 2000-an. Harga gurita yang terus naik menjadikannya salah satu komoditas paling menjanjikan bagi nelayan. Di Bonetambu, sekitar 70–75 persen nelayan kemudian berfokus menangkap gurita. Di Langkai dan Lanjukang, gurita menjadi komoditas penting di samping ikan karang dan pelagis.

Perubahan ini membawa konsekuensi besar. Dari yang semula menangkap secukupnya, perlahan berkembang menjadi menangkap sebanyak mungkin ketika peluang terbuka. Bukan karena keserakahan, tetapi sebagai respons atas kebutuhan hidup yang terus meningkat: biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan rumah tangga, hingga akses layanan dasar di pulau yang tidak selalu mudah. Dalam situasi itu, laut menjadi

tumpuan utama. Di fase inilah gurita tak lagi sekadar biota laut, tetapi simbol harapan ekonomi banyak keluarga.

### **Tantangan Ekologi dan Ketidakpastian Hidup Nelayan**

Seiring meningkatnya intensitas penangkapan, tantangan ekologis mulai terasa. Di beberapa lokasi, hasil tangkapan semakin fluktuatif. Ukuran gurita tidak selalu seperti sebelumnya. Nelayan harus melaut lebih jauh ketika stok di sekitar pulau berkurang. Pada saat yang sama, kondisi terumbu karang di beberapa titik menunjukkan tekanan, dari kategori rusak hingga sedang. Padang lamun pun berada pada kondisi yang rentan.

Perubahan iklim turut memperberat situasi. Musim barat yang semakin panjang, gelombang tinggi, dan angin kencang membatasi hari kerja nelayan di laut. Pada musim-musim tertentu, mereka bahkan tidak bisa melaut sehari-hari. Ketika hasil tangkapan menurun sementara kebutuhan hidup tak bisa ditunda, tekanan ekonomi pun terasa makin kuat.

Tantangan lain datang dari sistem pendukung yang terbatas. Akses pasar masih sangat bergantung pada pengepul, fasilitas penyimpanan dingin terbatas, dan fluktuasi harga sering kali tajam. Dalam posisi seperti ini, nelayan kerap tidak punya banyak pilihan selain menjual hasil tangkapan secepat mungkin, meski dengan posisi tawar yang lemah.

Namun di balik semua keterbatasan itu, satu hal tetap bertahan: nilai kebersamaan dalam memanfaatkan laut. Nelayan dari Bonetambu, Langkai, dan Lanjukang bisa menangkap gurita di perairan yang sama tanpa konflik berarti. Mereka berbagi ruang, berbagi musim, dan memegang etika tidak tertulis yang tumbuh dari pengalaman panjang hidup berdampingan di laut.

Nilai inilah yang kelak menjadi pondasi penting ketika masyarakat mulai memikirkan cara baru untuk menjaga laut secara lebih terencana.

### **Dari Kekhawatiran Menjadi Kesadaran Bersama**

Seiring waktu, kekhawatiran mulai muncul dari nelayan sendiri. Beberapa lokasi yang dulu produktif perlahan menurun. Biaya melaut meningkat, sementara hasil tidak selalu sebanding. Dari percakapan sederhana di perahu, dermaga, hingga rumah-rumah nelayan, tumbuh kesadaran bahwa laut tidak bisa terus diperlakukan seperti sebelumnya.

Kesadaran ini tidak lahir dalam satu malam. Ia tumbuh pelan-pelan, melalui pengalaman gagal panen, musim buruk, hingga diskusi kecil antar nelayan. Dari sinilah ruang untuk perubahan mulai terbuka.

Tahun 2021 menjadi titik penting ketika Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia mulai membangun kerja bersama masyarakat pesisir dengan pendekatan yang tidak langsung berbicara tentang larangan, tetapi tentang pemahaman, data, dan kesepakatan. Inisiatif ini kemudian dikenal sebagai PROTEKSI GAMA (Program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita berbasis Masyarakat).

Program ini tidak lahir sebagai proyek instan dengan paket solusi siap pakai. Ia tumbuh sebagai proses belajar bersama antara masyarakat, pendamping, akademisi, pemerintah, dan berbagai pihak lain, untuk menjawab satu pertanyaan sederhana namun mendasar: bagaimana menjaga laut tetap produktif tanpa memutus penghidupan nelayan kecil?

### **Mengapa Gurita Menjadi Pintu Masuk?**

Pemilihan gurita sebagai fokus utama program bukan tanpa alasan. Gurita memiliki nilai ekonomi tinggi dengan permintaan pasar yang terus meningkat.

Secara biologis, siklus hidupnya relatif pendek, sekitar 12–18 bulan. Ia bertelur sekali dalam hidupnya lalu mati setelah menjaga telur. Karakter ini membuat gurita sangat sensitif terhadap penangkapan berlebihan, tetapi sekaligus memberi peluang pemulihan stok yang cepat jika diberi ruang dan waktu yang cukup.

Selain itu, gurita ditangkap oleh nelayan skala kecil dengan alat tangkap yang relatif selektif. Ia menjadi tumpuan pendapatan harian bagi banyak

keluarga di Bonetambu, Langkai, dan Lanjukang. Dari sinilah gurita dipandang sebagai pintu masuk strategis: menjaga gurita berarti sekaligus menjaga ekosistem dasar laut tempat ia hidup, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nelayan.

### **Memulai dari Data dan Kesepakatan**

Langkah pertama PROTEKSI GAMA bukanlah penetapan aturan, melainkan penyusunan profil perikanan secara partisipatif. Nelayan terlibat langsung memetakan alat tangkap, musim, lokasi tangkapan, volume hasil, harga jual, serta pola pemasaran. Data yang sebelumnya hanya tersimpan sebagai pengalaman personal kini menjadi pengetahuan bersama.

Dari proses inilah diskusi berkembang. Nelayan mulai melihat pola: kapan gurita melimpah, kapan menurun, wilayah mana yang mulai jarang menghasilkan. Dari sinilah gagasan sistem buka–tutup penangkapan gurita mulai dirumuskan secara serius: sebagian wilayah ditutup sementara agar gurita dapat tumbuh dan berkembang biak, lalu dibuka kembali dalam periode tertentu secara bersama-sama.

Kesepakatan ini tidak lahir dari paksaan, melainkan dari musyawarah. Nelayan sendiri yang menentukan di mana wilayah ditutup, berapa lama, dan bagaimana mengawasinya. Pada fase awal, keraguan tentu ada.

Namun saat wilayah dibuka kembali, hasil mulai terlihat: ukuran gurita membesar, jumlah tangkapan meningkat, dan harga jual bertambah. Dari sini tumbuh kepercayaan bahwa menjaga laut bukan berarti kehilangan, tetapi menunda demi hasil yang lebih baik.

### **Langkai–Lanjukang: Dari Perintisan Menjadi Tata Kelola**

Di Langkai dan Lanjukang, sistem buka–tutup berkembang menjadi praktik kolektif. Pada tahap awal, total wilayah kelola berbasis buka–tutup mencapai ±375 hektar. Seiring penguatan tata kelola, wilayah ini kemudian diselaraskan menjadi ±245,15 hektar yang terintegrasi dalam

## **MENGGURITA DI PULAU**

Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Lanjukang, serta diperkuat oleh wilayah kelola masyarakat di Taka Sallangang seluas ±50 hektar.

Pengawasan dilakukan melalui patroli berbasis nelayan dan Pokmaswas. Sanksi yang berlaku lebih bersifat sosial, karena yang dijaga bukan hanya wilayah, tetapi juga kepercayaan antar sesama nelayan.

Kesadaran konservasi pun meluas ke spesies lain. Di Pulau Lanjukang, perlindungan penyu dijalankan secara aktif. Dalam periode 2022–2024, masyarakat berhasil melindungi 63 sarang penyu dan melepasliarkan ±5.961 tukik ke laut. Ini menjadi simbol bahwa pengelolaan gurita juga berkontribusi pada perlindungan biodiversitas yang lebih luas.

### **Bonetambu: Replikasi dalam Skala Lebih Besar**

Tahun 2024–2025, PROTEKSI GAMA memasuki fase baru di Pulau Bonetambu, salah satu sentra perikanan gurita terbesar di Kota Makassar. Pendekatan yang digunakan bukan merintis dari nol, tetapi memindahkan pembelajaran. Profil perikanan kembali disusun, monitoring hasil tangkapan diperkuat melalui pencatat harian nelayan, dan Sekolah Tanpa Ragu (SETARA) digelar sebagai ruang belajar bersama.

Sekitar ±71,44 hektar wilayah buka–tutup mulai dirintis di Bonetambu. Dalam periode tertentu, perputaran ekonomi dari komoditas gurita di pulau ini mencapai ratusan juta rupiah dalam satu siklus tangkap. Bonetambu menjadi ruang akselerasi: jika Langkai–Lanjukang adalah ruang perintisan, Bonetambu adalah ruang pengujian model dalam skala lebih besar.

### **Dampak yang Terlihat Nyata**

Dampak PROTEKSI GAMA terasa di banyak sisi. Secara ekologi, pemantauan menunjukkan peningkatan tutupan karang hidup sebesar 5–10 persen serta menurunnya ancaman penangkapan merusak seperti bom dan bius. Gurita tumbuh lebih besar dan lebih beragam ukurannya.

Dari sisi ekonomi, pendapatan nelayan meningkat hingga 56,6 persen berkat ukuran gurita yang lebih besar dan harga jual yang lebih stabil. Di sektor pengolahan, berkembang ±3 jenis produk utama—nugget gurita, sambal gurita, dan abon ikan—yang dikelola oleh 33 ibu-ibu nelayan.

Secara sosial, ratusan nelayan lintas Langkai, Lanjukang, dan Bonetambu terlibat aktif, dengan 155 orang telah mengikuti peningkatan kapasitas. Kelembagaan lokal diperkuat melalui 11 kelompok masyarakat serta terbentuknya Forum Pasibuntuluki sebagai wadah koordinasi lintas pulau. Sistem buka–tutup tak lagi sekadar kesepakatan sosial, tetapi mulai memperoleh pengakuan dalam kerangka kebijakan resmi daerah melalui KKD.

### **Dari Spermonde untuk Indonesia**

Pengalaman PROTEKSI GAMA menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan skala kecil yang adil dan berkelanjutan dapat dibangun dari bawah, dipimpin oleh masyarakat yang hidup paling dekat dengan laut. Ia selaras dengan agenda ekonomi biru, ketahanan iklim, dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Yang terpenting, menjaga satu hal mendasar: roh kolaborasi. Masyarakat, pendamping, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan media hadir dengan peran masing-masing. Tak ada satu aktor pun yang berjalan sendiri.

Kisah dari Langkai, Lanjukang, dan Bonetambu mengajarkan bahwa laut tidak harus selalu dihadapkan pada pilihan antara ekonomi atau ekologi. Keduanya bisa berjalan bersama, jika dikelola dengan ilmu, kesepakatan, dan kepercayaan.

Dari pulau-pulau kecil di Spermonde, Indonesia belajar satu hal besar: ketika nelayan diberi ruang untuk mengatur lautnya sendiri, laut pun kembali memberi kehidupan.

# GLOSARIUM

## Daftar Istilah

<i>Ande-ande</i>	Alat tangkap tradisional nelayan yang diperbolehkan tetap beroperasi saat penutupan wilayah tangkap gurita.
Biota Laut Prioritas	Jenis organisme laut yang diidentifikasi masyarakat sebagai spesies penting atau dilindungi di wilayah kelola.
Bius Ikan	Metode penangkapan ikan menggunakan bahan kimia beracun untuk melumpuhkan ikan; termasuk destructive fishing.
Buka-Tutup	Sistem pengelolaan perikanan berbasis waktu dengan menutup sementara wilayah tangkap untuk memberi kesempatan sumber daya tumbuh.
<i>By Catch</i>	Hasil tangkapan sampingan yang tidak menjadi target utama penangkapan.
<i>Destructive Fishing</i>	Praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem, seperti bom dan bius.
<i>Endline Survey</i>	Survei akhir untuk mengukur dampak program setelah intervensi dilakukan.
<i>Fisheries Profiling</i>	Pendataan partisipatif kondisi sosial-ekonomi dan ekologi perikanan masyarakat.
Grade Gurita	Klasifikasi mutu gurita (A, B, C, D, Lokal) berdasarkan ukuran dan nilai jual.

Illegal Fishing	Aktivitas penangkapan ikan yang melanggar hukum atau aturan yang berlaku.
Insentif Ekonomi	Peningkatan nilai jual hasil tangkapan yang mendorong perubahan perilaku nelayan.
Jolloro	Perahu kecil yang digunakan nelayan di Pulau Langkai dan Lanjukang.
Kedo-kedo	Alat tangkap tradisional nelayan yang tetap diperbolehkan saat wilayah gurita ditutup.
Overfishing	Penangkapan ikan secara berlebihan hingga melampaui kemampuan regenerasi sumber daya.
Pocong-pocong	Alat pancing tradisional berbentuk menyerupai gurita kecil untuk menarik perhatian gurita.
Pokmaswas	Kelompok Masyarakat Pengawas yang berperan dalam pengawasan perikanan berbasis masyarakat.
Recovery Karang Terumbu Karang	Proses pemulihan kondisi terumbu karang setelah tekanan aktivitas merusak berkurang.
Spesies Kunci	Spesies yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.
Temporal Closure	Penutupan wilayah tangkap dalam jangka waktu tertentu sebagai bagian dari pengelolaan.
Terumbu Karang	Ekosistem laut yang menjadi habitat utama gurita dan berbagai biota laut lainnya.
Tukik	Anak penyu yang baru menetas dan dilepaskan ke laut.

## Daftar Singkatan

ADI	Asosiasi Demersal Indonesia
BKIPM	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
BPSPL	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
CEPF	<i>Critical Ecosystem Partnership Fund</i>
CI	<i>Conservation International</i>
CITES	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CR	<i>Critically Endangered</i> . Kategori spesies dengan tingkat ancaman kepunahan sangat tinggi di alam dalam waktu dekat.
DKP	Dinas Kelautan dan Perikanan
EN	<i>Endangered</i> . Kategori spesies yang menghadapi risiko kepunahan sangat tinggi di alam, namun belum berada pada tingkat paling kritis.
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
GT	Gross Tonnage
IUCN	International Union for Conservation of Nature
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
NT	<i>Near Threatened</i> . Kategori spesies yang belum masuk kategori terancam, tetapi berada dekat dengan ambang batas dan berpotensi menjadi terancam dalam waktu dekat.

PROTEKSI GAMA	Program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat
RRA	<i>Rapid Reef Assessment</i>
VU	<i>Vulnerable</i> . Kategori spesies yang rentan terhadap kepunahan apabila faktor ancaman terus berlangsung atau meningkat.

# PROFIL PENULIS



## **Nirwan Dessibali**

Membuka hati, pikiran, dan niatan di pesisir, laut, serta pulau-pulau kecil adalah jalan hidup yang saya tekuni hingga hari ini. Bersama Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia, mengemban amanah sebagai Direktur Eksekutif, menggerakkan inisiatif konservasi dan rehabilitasi ekosistem, penguatan tata kelola sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta advokasi kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan dan keadilan ekologis.

Bagi saya, pengelolaan wilayah pesisir dan laut bukan sekadar kerja teknis, melainkan upaya merawat relasi antara manusia dan alam, serta menjembatani kebijakan dengan praktik lapangan. Saya meyakini masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, sehingga kolaborasi, penguatan kapasitas komunitas, dan pendekatan berbasis bukti menjadi prinsip dalam setiap langkah kerja.

Menyelesaikan Magister Lingkungan pada Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin dan Sarjana Ilmu Kelautan dari Universitas Lambung Mangkurat. Latar belakang ini membentuk cara pandang saya bahwa persoalan kelautan tidak hanya soal ekologi, tetapi juga sosial, ekonomi, dan kebijakan.

Kecintaan pada laut tumbuh dari pengalaman menjelajahi mangrove dan terumbu karang serta belajar dari masyarakat pulau. Sejak mahasiswa aktif di pers kampus, saya terus menulis dan sempat berkarier sebagai jurnalis selama lima tahun. Sebelumnya, saya turut berkontribusi dalam sejumlah terbitan, di antaranya Keanekaragaman Hayati Laut Kota Makassar, Perikanan Gurita Pulau Bonetambu, Siasat dari Pulau, Mangrove Teluk Palu, dan Dinamika Kelautan Nasional.

Bagi saya, laut adalah ruang hidup dan harapan. Melalui kerja dan tulisan, saya berupaya menghadirkan praktik pengelolaan yang adil, berkelanjutan, dan berakar pada kekuatan

**Wahyu Chandra**

Lahir di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ia adalah jurnalis, peneliti, penulis, dan pengajar yang selama lebih dari dua dekade menaruh perhatian pada isu lingkungan, masyarakat adat, pesisir, serta tata kelola sumber daya alam di Indonesia timur.

Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin (1997–2003), kemudian meraih gelar Magister Antropologi di FISIP Unhas (2016–2019). Saat ini ia merupakan mahasiswa Program Doktor Antropologi FISIP Universitas Hasanuddin (2024–sekarang). Selain itu, ia juga mengajar di Jurusan Antropologi FISIP Universitas Hasanuddin, dengan minat pada kajian masyarakat pesisir, perubahan sosial, dan ekologi politik.

Karier jurnalistiknya dimulai sebagai freelancer Kantor Berita Antara Biro Makassar (2002–2004). Sejak 2013 hingga sekarang, ia menjadi kontributor Mongabay Indonesia, melakukan peliputan mendalam terkait pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi dan Papua. Ia juga aktif memberikan pelatihan menulis, diskusi tematik, dan penguatan literasi media bagi mahasiswa, komunitas, serta organisasi masyarakat sipil.

Di bidang penelitian dan advokasi, Wahyu pernah menjadi peneliti di Lembaga Otonomi Daerah dan Demokrasi (LeDO) Makassar (2004–2009), Program Officer Media untuk Program KINERJA USAID di Sulawesi Selatan, serta Direktur Komunikasi dan Informasi AMAN Sulawesi Selatan (2016–2017), termasuk terlibat dalam pendampingan perumusan dan implementasi Perda Masyarakat Adat di Kabupaten Enrekang.

Ia terlibat dalam berbagai proyek riset dan penulisan buku, antara lain tentang pemberdayaan masyarakat pesisir, tata kelola gurita di Pulau Langkai dan Lanjukang, konservasi dan ketahanan pangan komunitas adat Kaluppini dan Kajang, nilai sosial-budaya dan ekologi Taman Nasional Lore Lindu, mangrove Teluk Palu, hingga strategi pengembangan masyarakat adat Malaumkarta di Papua Barat Daya. Pada 2023–2024, ia menjadi peneliti utama dalam riset tentang pekerja gig di Indonesia bersama Universitas Hasanuddin.

Selain itu, ia juga menjadi konsultan dalam produksi film dokumenter mengenai dampak tambang pasir laut dan tambang nikel di Sulawesi. Berbagai pelatihan jurnalistik dan penelitian kualitatif yang diikutinya membentuk pendekatannya yang memadukan reportase mendalam dengan perspektif antropologis.

Bagi Wahyu Chandra, menulis dan mengajar adalah dua ruang yang saling menguatkan. Keduanya berangkat dari keyakinan bahwa dokumentasi, riset, dan refleksi kritis adalah bagian penting dari merawat ingatan kolektif dan membangun pengetahuan yang berpihak pada masyarakat

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari Nirwan Dessibali dan Wahyu Chandra yang merekam perjalanan pelaksanaan program penguatan ekonomi dan konservasi gurita berbasis masyarakat di Kepulauan Spermonde, Kota Makassar. Seluruh proses yang dituliskan dalam buku ini lahir dari pengalaman langsung mendampingi masyarakat Pulau Langkai, Pulau Lanjukang dan Pulau Bonetambu melalui Program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat, serta program penguatan hak kelola masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Diterbitkan oleh:

**Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia**

Perumahan Bumi Pesona Pelangi, Jl. Kuning No.15  
Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar  
Website: [www.yklindonesia.org](http://www.yklindonesia.org)  
Email : [info@yklindonesia.org](mailto:info@yklindonesia.org)

ISBN 978-634-05-0072-1



9

786340

500721